



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERKEMBANGAN KOPERASI DI TASIKMALAYA:
ALAT PERJUANGAN EKONOMI RAKYAT
(1930-1947)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Humaniora**

**NURUL IMAN
NPM. 0806462344**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
DEPOK
JULI 2012**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Depok, 02 Juli 2012



NURUL IMAN

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : NURUL IMAN

NPM : 0806462344

Tanda Tangan : 

Tanggal : 02 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang diajukan oleh :
Nama : NURUL IMAN
NPM : 0806462344
Program Studi : Ilmu Sejarah
Judul : Perkembangan Koperasi di Tasikmalaya:
Alat Perjuangan Ekonomi Rakyat
(1930-1947)

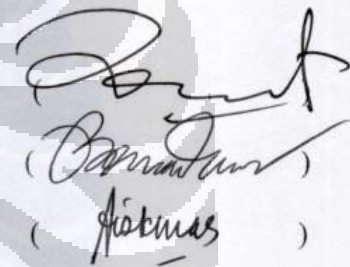
Ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua/penguji : Abdurakhman, M.Hum.

Pembimbing : Dr. Bondan Kanumoyoso, M.Hum.

Penguji : Tri Wahyuning Mudaryanti S.S., M.Si



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 02 Juli 2012

Oleh

Dekan

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia



Dr. Bambang Wibawarta, S.S., M.A.

NIP 19651023 199003 1 002

KATA PENGANTAR

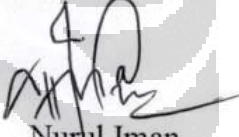
Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Humaniora, Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Dr. Bondan Kanumayoso, M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
- (2) Abdurakhman, M.Hum. sebagai Ketua Panitia Ujian beserta Tri Wahyuning Mudaryanti S.S., M.Si yang telah bersedia menjadi Penguji, dan memberikan kritik yang membangun dan saran yang bermafaat untuk penulis;
- (3) Saya tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada orang perorangan yang telah membantu dan membuka kemudahan pada masa pencarian sumber; (Pak Nana Rukmana, Pak A. Basrah Enie, Pak Komar, Pak Hilman dan keluarga Pak Udin Karto);
- (4) Bapak/Ibu Dosen, para staf pengajar di Program Studi Ilmu Sejarah yang telah mendidik penulis selama menuntut ilmu di Universitas Indonesia, terutama Bu Dien, Mbak Linda, Mas Is dan Mas Iman;
- (5) Pihak perpustakaan Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, dan Universitas Siliwangi yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
- (6) Orang tua, adik dan kakak saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; (Bapak Lili, Mamah Aton, Teh Siti, Teh Isyeu dan Fajar);
- (7) Pihak Tanoto Foundation (TF) yang telah memberikan beasiswa kuliah kepada penulis dan para pengurus BEM FIB UI 2008 yang telah memperjuangkan keringanan biaya kuliah, sehingga penulis dapat melanjutkan kuliah, khususnya Teh Raisye, Teh Hera dan Kak Miki.

- (8) Teman-teman seperjuangan yang telah banyak memotivasi dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini; (Ryan, Odi, Owi, Diana, Hendra, Bary, Rara, Iit dan Griffith);
- (9) Teman dan sahabat di beragam komunitas dan organisasi, baik intra maupun ekstra kampus; (FORMASI, MBO, AEGIS VOICE, SALMAN, BEM FIB, SKS, dan SALAM UI);
- (10) Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 02 Juli 2012



Nurul Iman

**LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Iman
NPM : 0806462344
Program Studi : Ilmu Sejarah
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Perkembangan Koperasi di Tasikmalaya:
Alat Perjuangan Ekonomi Rakyat
(1930-1947)

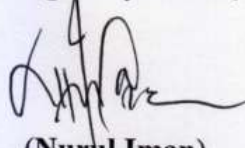
Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 02 Juli 2012

Yang menyertakan,


(Nurul Iman)

ABSTRAK

Nama : Nurul Iman
Program Studi : Ilmu Sejarah
Judul : Perkembangan Koperasi di Tasikmalaya:
Alat Perjuangan Ekonomi Rakyat (1930-1947)

Skripsi ini membahas perkembangan koperasi di Tasikmalaya. Skripsi ini mengambil periodisasi tahun 1930-1947. Tahun 1930 merupakan tahun krisis bagi dunia yang berdampak terhadap perekonomian di Tasikmalaya dan tahun berdirinya koperasi-koperasi sebagai tanggapan dari krisis tersebut, sedangkan tahun 1947 merupakan tahun ketika Kongres Koperasi Indonesia pertama diselenggarakan di Tasikmalaya yang membawa nilai berharga bagi perkembangan koperasi di Tasikmalaya pada khususnya. Skripsi ini memberikan pengetahuan mengenai berdirinya koperasi-koperasi pada masa tersebut beserta contoh koperasinya. Selain itu, skripsi ini menunjukkan bagaimana terjadinya Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya sebagai tanda perjuangan ekonomi bangsa Indonesia yang sangat berarti bagi perkembangan koperasi di Indonesia selanjutnya.

Kata kunci:

Koperasi, kongres koperasi, ekonomi, Tasikmalaya

ABSTRACT

Name : Nurul Iman
Study Program : History
Title : Development of Cooperatives in Tasikmalaya:
Tool of people's economic struggle (1930-1947)

The focus of this study is development of cooperatives in Tasikmalaya. The period of this study is 1930-1947. In 1930 is times of depression great of economy in the world that to impact to Tasikmalaya economy, but in same times, cooperatives was built as response from crisis it. Whereas 1947 is times when the First Congress of Cooperatives Indonesia was hold in Tasikmalaya give the value for cooperatives Tasikmalaya especially. This study give the knowledge about building of cooperatives and cooperatives sample. This study is also indicate how the First Congress of Cooperatives Indonesia in Tasikmalaya become the symbol of economy struggle in Indonesia that it is valuable for next development of cooperatives in Indonesia.

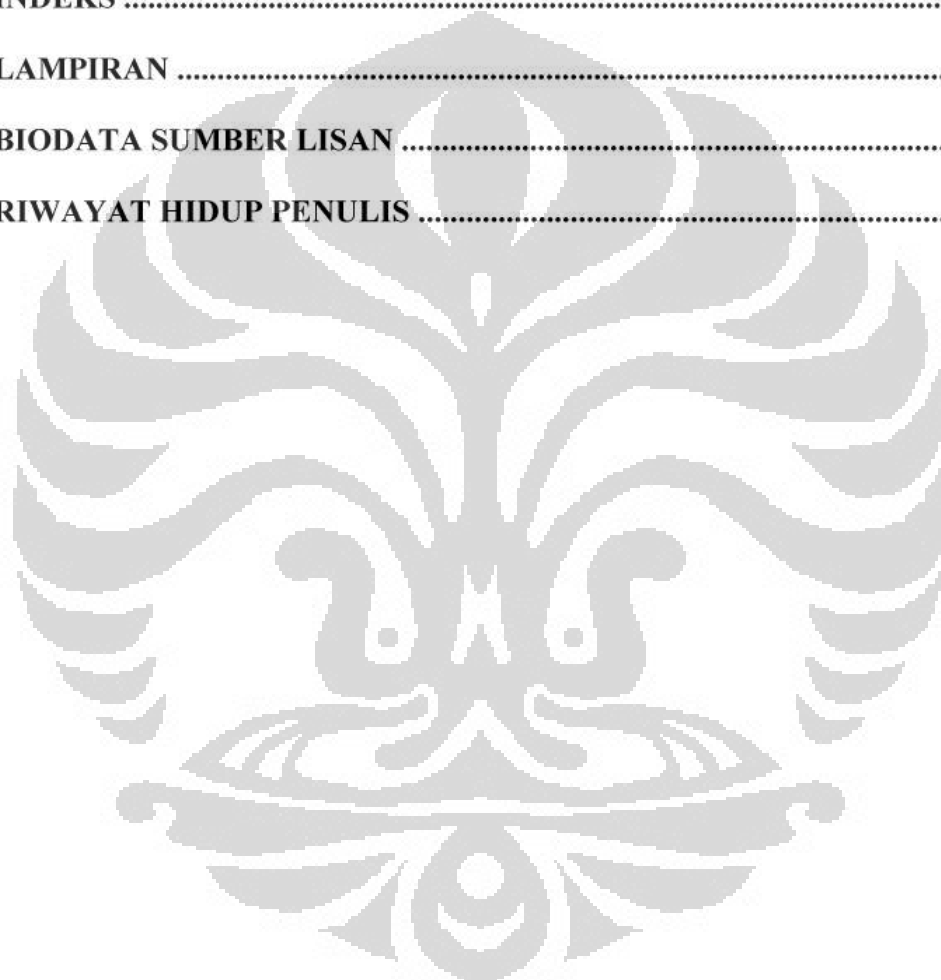
Key words:

Coopertives, congress of cooperatives, economy, Tasikmalaya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISTILAH	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Ruang Lingkup Penulisan	4
1.4 Tujuan Penulisan	5
1.5 Metode Penelitian	6
1.6 Sumber Sejarah	10
1.7 Sistematika Penulisan	11
BAB 2 KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT TASIKMALAYA (1930-1947)	13
2.1 Kondisi Sosial dan Ekonomi Tasikmalaya memasuki Abad ke-20	13
2.2 Depresi Ekonomi bagi Masyarakat Tasikmalaya pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda	15
2.3 Ekonomi Perang pada Masa Pendudukan Jepang	18
2.4 Bangkitnya Perekonomian di Tasikmalaya pada Masa Kemerdekaan	21
BAB 3 PERKOPERASIAN DI TASIKMALAYA	23
3.1 Sejarah Awal Perkembangan Koperasi di Tasikmalaya	23
3.2 Berdirinya Koperasi-Koperasi di Tasikmalaya pada Tahun 1930-an 30	
3.2.1 Koperasi Selamat	32
3.2.2 Koperasi Simpanan Pamengkeut Banda	34
3.2.3 Koperasi Mitra Batik	37
3.3 Peranan Koperasi di Tasikmalaya	46

BAB 4 KONGRES KOPERASI SEBAGAI TANDA PERJUANGAN EKONOMI BANGSA INDONESIA	48
4.1 Latar Belakang Kongres Koperasi Indonesia Pertama.....	48
4.2 Suasana Kongres Koperasi Indonesia Pertama.....	54
4.3 Pengaruh Kongres Koperasi Indonesia Pertama	60
BAB 5 KESIMPULAN	63
DAFTAR PUSTAKA	67
INDEKS	73
LAMPIRAN	74
BIODATA SUMBER LISAN	105
RIWAYAT HIDUP PENULIS	107



DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Jumlah Perkembangan Koperasi di Indonesia Tahun 1927-1941
Tabel 2. Nama dan Jenis Koperasi di Tasikmalaya Tahun 1930-an
Tabel 3. Jumlah Anggota Koperasi Mitra Batik Tahun 1939 – 1949



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Peta Topografi Tasikmalaya Tahun 1944
- Lampiran 2 Salinan Akte Pertama Koperasi Mitra Batik Tahun 1941
- Lampiran 3 Akte Pendirian Koperasi Mitra Batik yang Asli
- Lampiran 4 Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Koperasi Mitra Batik
- Lampiran 5 Kantor Pertama (Sementara) Koperasi Mitra Batik
- Lampiran 6 Kantor Tetap Koperasi Mitra Batik
- Lampiran 7 Tokoh-Tokoh Koperasi Mitra Batik Tahun 1939
- Lampiran 8 Para Pengrajin Batik Tasikmalaya
- Lampiran 9 Tokoh-Tokoh Koperasi Simpenan Pamengkeut Banda
- Lampiran 10 Foto Bersama Mohammad Hatta dengan Para Utusan Kongres Koperasi Indonesia Pertama di Tasikmalaya
- Lampiran 11 Ilustrasi Letak Bangunan PKKT dan Rumah Saksi Mata Kongres Koperasi Indonesia Pertama pada tahun 1947
- Lampiran 12 Kongres Koperasi: Koperasi Hasil Kecerdasan Peradaban
- Lampiran 13 Monumen Kongres Koperasi Indonesia Pertama di Tasikmalaya
- Lampiran 14 Gedung PKKT: Tempat Kongres Koperasi Indonesia Pertama
- Lampiran 15 Foto Niti Sumantri: Ketua Kongres Koperasi Indonesia Pertama
- Lampiran 16 Gedung Kantor Koperasi Simpenan Pamengkeut Banda
- Lampiran 17 Gedung Kantor Koperasi Mitra Batik
- Lampiran 18 Pabrik Tenun Koperasi Mitra Batik
- Lampiran 19 Gedung Kantor Koperasi Selamat
- Lampiran 20 Gedung Pusat Koperasi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012
- Lampiran 21 Monumen Koperasi Indonesia

DAFTAR ISTILAH

- Depresi Ekonomi : Suatu krisis ekonomi yang ditandai dengan penurunan aktivitas ekonomi dalam jumlah yang besar dan dalam jangka waktu yang panjang, sehingga yang berakibat pada pengangguran dan kenaikan harga barang.
- Ekonomi kerakyatan : Suatu sistem perekonomian di mana berbagai kegiatan ekonomi diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi semua anggota masyarakat, hasilnya dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat, sementara penyelenggaraan kegiatan-kegiatan ekonomi itu pun berada di bawah pengendalian atau pengawasan anggota-anggota masyarakat.
- Enterpreneurship* : Kewirausahaan
- Hulp en Spaar Bank* : Bank Pertolongan dan Simpanan
- Koperasi : Perkumpulan atau badan usaha yang beranggotakan orang-seorang dengan berdasar atas asas kekeluargaan dalam mencapai tujuan bersama.
- Koperasi desa : Koperasi yang berada di suatu desa yang usahanya meliputi segala usaha menurut kebutuhan penduduk desa.
- Koperasi ekonomi : Koperasi yang berdasarkan asas-asas ekonomi pasar yang rasional dan kompetitif.

Koperasi produksi : Koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang, baik dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi.

Koperasi kredit : Koperasi yang didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya dalam memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos (bunga) yang ringan. Nama lain Koperasi Kredit adalah Koperasi Simpan Pinjam.

Malam : Lilin yang digunakan untuk membatik.

Moeder Centrale: Gabungan koperasi yang dibentuk pada tahun 1936 oleh Jawatan Koperasi untuk memperkuat penyiapan modal bagi koperasi. Nama asal dari GAPKI (Gabungan Pusat Koperasi Indonesia).

Onderneming : Perusahaan atau perkebunan

Peningmeester : Bendahara

Selfhelp : Suatu prinsip untuk menolong diri sendiri.

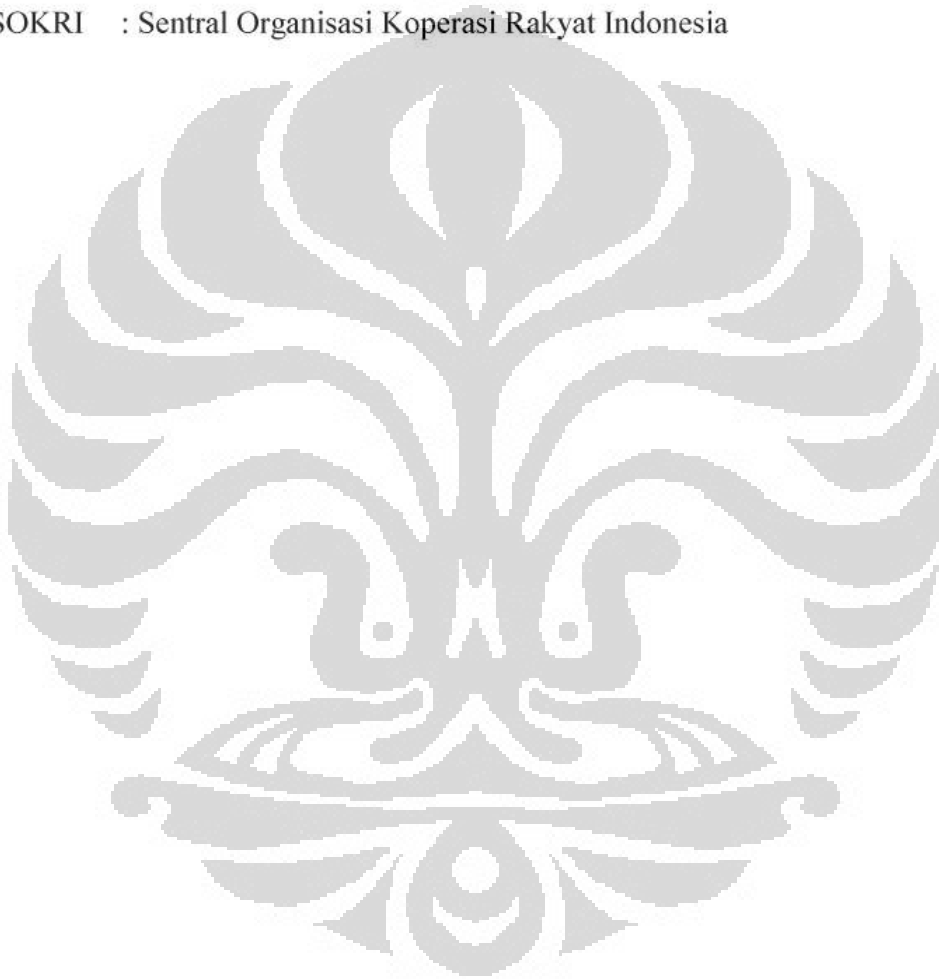
Volksbank : Bank rakyat

Vooziter : Ketua

White cambrics : kain katun putih yang ditenun dengan sistem tenunan sederhana, biasanya digunakan dalam pembuatan kain batik. Kain tersebut sering disebut dengan kain mori.

DAFTAR SINGKATAN

- SPB : Simpanan Pamengkeut Banda
PKKT : Pusat Koperasi Kabupaten Tasikmalaya
UUD'45 : Undang-Undang Dasar 1945
GAPKI : Gabungan Pusat Koperasi Indonesia
SOKRI : Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Daerah Tasikmalaya merupakan daerah yang terletak di bagian tenggara Jawa Barat yang memiliki sumber daya alam yang mendukung. Berbagai sumber daya alam digunakan masyarakat Tasikmalaya, baik dalam bidang pertanian, peternakan, kerajinan tangan, hingga didirikannya berbagai industri guna meningkatkan perekonomian Tasikmalaya. Sebagaimana mata pencaharian pokok dari masyarakat pribumi Tatar Sunda pada umumnya adalah pertanian. Sektor pertanian menjadi mata pencaharian pokok karena tanahnya yang subur dan iklimnya yang baik untuk pertanian.¹ Berdasarkan sensus penduduk tahun 1930, masyarakat Tasikmalaya bermatapencaharian sebagai petani sebanyak 67,7%.² Selain sebagai petani, masyarakat Tasikmalaya dalam kehidupan ekonomi dikenal sebagai pedagang, pengusaha, pengrajin³, dan perantau yang ulet, sehingga tidak mengherankan jika daerah Tasikmalaya dijuluki sebagai daerah sentra pengrajin di Jawa Barat.⁴

Walaupun demikian, bukan berarti masyarakat Tasikmalaya dapat bekerja tanpa hambatan, mereka membutuhkan suatu wadah untuk menyatukan mereka sehingga dapat bahu membahu bekerjasama dalam menghadapi persaingan di dunia kerja. Kekurangan modal usaha maupun sulitnya mendapatkan bahan baku dari luar daerah menjadi permasalahan yang dihadapi masyarakat Tasikmalaya. Sebagai jawaban dari permasalahan yang terjadi, maka masyarakat Tasikmalaya dari golongan kelas menengah, seperti kaum cendekiawan, para pengusaha dan pengrajin mulai membicarakan dan berusaha untuk mendirikan suatu wadah usaha, terutama dalam penyediaan bahan baku dan pinjaman modal.

¹ Nina Herlina Lubis, *Sejarah Tatar Sunda Jilid II*, (Bandung: CV.Satya Historika, 1956), hlm. 98.

² Svensson, Thommy (1983), *Peasant and Politics in Early Twentieth-Century West Java* dalam Amin Mudzakkir, 'Pergulatan Pengusaha Santri di Tasikmalaya dan Kebijakan Ekonomi Pemerintah di Tingkat Lokal', *Jurnal Pesantren Ciganjur*, Edisi 04/Tahun II/2007, hlm. 86.

³ 'Pengrajin' berarti orang yang pekerjaannya membuat barang kerajinan atau pengusaha kerajinan tangan. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (edisi keempat), Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hlm. 1157.

⁴ Didin Saripudin dan Ahmad Ali Seman, 'Tradisi Merantau *Tukang Kiridit* dari Tasikmalaya', *Makalah Simposium Kebudayaan Indonesia-Malaysia (SKIM)*, Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 2007, hlm. 2.

Adapun wadah yang cocok untuk keberlangsungan usaha mereka dalam penyediaan bahan baku dan modal, yaitu koperasi. Oleh karena itu, koperasi menjadi suatu wadah yang dapat menghimpun para pengusaha maupun pengrajin di Tasikmalaya untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan berazaskan kekeluargaan, sehingga mereka tidak perlu khawatir lagi dalam mendapatkan bahan baku dan tidak takut terjerat oleh para pemberi modal atau rentenir yang biasanya membuat mereka sengsara di kemudian hari akibat pinjaman ditambah bunganya yang terus membesar jika tidak dibayar jatuh tempo.

Ada banyak pengertian dari koperasi sebagaimana Prof. Hans H. Munkner memberi pengertian koperasi sebagai lembaga yang menyatukan kekuatan dan potensi ekonomi individu-individu untuk secara bersama mencapai sesuatu tujuan, yang karena keterbatasan sumber dayanya tidak dapat dicapai secara sendiri-sendiri.⁵ Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, koperasi adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan kebendaan para anggotanya dengan cara menjual barang-barang kebutuhan dengan harga murah (tidak bermaksud mencari untung).⁶ Adapun pengertian koperasi yang dipakai penulis dalam penulisan skripsi ini sesuai dengan pengertian koperasi menurut Mohammad Hatta, Ko-operasi berasal dari kata “ko” yang berarti “bersama” dan “operasi” yang berarti “bekerja”. Jadi, perkumpulan Kooperasi ialah perkumpulan kerjasama dalam mencapai suatu tujuan.⁷

Sebagaimana pengertian di atas bahwa koperasi merupakan kumpulan orang yang bekerjasama dalam mencapai tujuan, maka contoh koperasi yang ada di daerah Tasikmalaya adalah Koperasi Mitra Batik yang didirikan oleh para pengrajin batik. Usaha tersebut tidak terlepas dari tokoh “tiga serangkai”, yakni Enie, Naseh dan Dion.⁸ Mereka sama-sama merupakan pengrajin batik, kecuali Naseh merupakan pengusaha tegel⁹ dan orang pergerakan. Mereka berkumpul bersama membicarakan berbagai macam masalah dan usaha para pengrajin guna memajukan para pengrajin batik di Tasikmalaya. Mereka menginginkan agar para

⁵ Hans H. Munkner, *Masa Depan Koperasi* (Djabaruddin Djohan, Penerjemah.) (Jakarta: DEKOPIN, 1997), hlm. 1.

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (edisi keempat), Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hlm. 753.

⁷ Mohammad Hatta, *Meninjau Masalah Kooperasi* (Djakarta: P.T. Pembangunan, 1954), hlm. 2.

⁸ Lihat Lampiran 7 dalam skripsi ini.

⁹ *Tegel* adalah batu ubin (untuk lantai). Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *op cit.*, hlm. 1469.

pengrajin batik tidak menjadi objek permainan oleh para pedagang non-pribumi penyalur *white cambrics* dan bahan batik lainnya yang pada umumnya dikuasai oleh para pedagang Cina, sehingga mereka mendirikan sebuah wadah yang bernama Koperasi Mitra Batik pada tanggal 17 Januari 1939 untuk menghimpun para pengusaha dan perajin batik agar dapat bekerjasama dalam memenuhi kebutuhan mereka dalam usaha batik.¹⁰

Selain koperasi Mitra Batik, ada beberapa koperasi lainnya berperan penting dalam perkembangan perkoperasian di Tasikmalaya, seperti Koperasi Simpanan Pamengkeut Banda (SPB)¹¹ dan Koperasi Selamat¹² yang termasuk koperasi tertua di Tasikmalaya dan mendapat reputasi baik sebagai koperasi teladan Tasikmalaya. Ketiga koperasi tersebut merupakan koperasi yang berdiri pada tahun 1930-an dan banyak memberikan andil dalam membantu masyarakat Tasikmalaya dalam meningkatkan taraf hidupnya.

Kemudian, Tasikmalaya dikenal juga sebagai Kota Koperasi¹³ karena Tasikmalaya pernah dijadikan lokasi diadakannya Kongres Koperasi Indonesia pertama pada tanggal 11-14 Juli 1947, tepatnya di Gedung Pusat Koperasi Kabupaten Tasikmalaya (PKKT) yang terletak di Jalan Ciamis.¹⁴ Sebelum daerah Tasikmalaya diresmikan sebagai tempat kongres tersebut, Bandung dan Garut sempat menjadi pilihan utama yang dijadikan lokasi kongres tersebut. Akan tetapi, kedua daerah tersebut tidak memungkinkan diadakannya kongres koperasi, sehingga daerah Tasikmalaya yang dipilih sebagai tempat Kongres Koperasi pertama di Indonesia. Adapun isi keputusan kongres koperasi tersebut menjadi langkah awal dalam memajukan koperasi di Indonesia selanjutnya dalam memperjuangkan ekonomi rakyat.¹⁵

¹⁰ Tim Penerbitan Buku Dokumenter Koperasi Mitra Batik, *Setengah Abad Koperasi Mitra Batik 17 Januari 1939*, (Tasikmalaya: Koperasi Mitra Batik, 1989), hlm. 16.

¹¹ Koperasi Simpanan Pameungkeut Banda (SPB) adalah koperasi simpan pinjam yang didirikan oleh Kosim Danumihardja dan Ahmad Atmadja pada bulan Oktober 1933 di Tasikmalaya. Lihat Lampiran 10 dalam skripsi ini.

¹² Koperasi Selamat merupakan koperasi produksi sepatu yang didirikan oleh Omo Suharna pada tanggal 29 Maret 1931 di Tasikmalaya.

¹³ M. Ahman Sya, *Bukit Sepuluh Ribu Tasikmalaya*, cetakan pertama (Tasikmalaya: CV. Gadjah Poleng, 2004), hlm.16.

¹⁴ Momo Surtama, *Sekitar Lahirnya Hari Koperasi Indonesia 12 Juli 1947 dan Kehadiran Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) beserta kegiatannya*. (Tasikmalaya: DEKOPINDA Kabupaten Tasikmalaya, 2000), hlm. 4.

¹⁵ Pengurus Pusat Koperasi Kabupaten Tasikmalaya (PKKT), *Sejarah Hari Koperasi 12 Juli 1947* (Tasikmalaya: PKKT), hlm. 2.

Dari topik tersebut membuat penulis tertarik untuk mengetahui sejarah perkembangan dan kejayaan dunia perkoperasian di Tasikmalaya, sehingga daerah Tasikmalaya terkenal dengan daerah atau kota koperasi di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengetahui perjalanan sejarah perkembangan perkoperasian di Tasikmalaya, diperlukan penelitian yang lebih lanjut untuk menjelaskan perkembangan perkoperasian tersebut, sehingga dapat diketahui peristiwa-peristiwa yang menjadikan daerah Tasikmalaya terkenal dengan perkoperasiannya. Topik tersebut dipilih sebagai tema dari penulisan skripsi ini karena penelitian yang membahas sejarah perkembangan koperasi di Tasikmalaya masih terbatas. Adapun bahan yang menjadi sumber tinjauan dalam skripsi ini, salah satunya adalah dokumen milik PPKT (Pusat Koperasi Kabupaten Tasikmalaya) sebagai sumber primer dari penulisan skripsi saya.

1.2 Perumusan Masalah

Pada penulisan skripsi saya ini, masalah yang hendak dikaji adalah bagaimana perkembangan koperasi di Tasikmalaya, sehingga koperasi menjadi alat perjuangan ekonomi rakyat. Adapun pertanyaan yang hendak dijawab dalam penulisan skripsi yang akan saya buat, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Tasikmalaya?
2. Bagaimana awal perkembangan koperasi di Tasikmalaya?
3. Mengapa daerah Tasikmalaya dipilih sebagai tempat Kongres Koperasi Indonesia Pertama?

1.3 Ruang Lingkup Penulisan

Skripsi yang akan saya buat membahas mengenai ‘Perkembangan Koperasi di Tasikmalaya: Alat Perjuangan Ekonomi Rakyat (1930-1947)’. Adapun ruang lingkup spasial yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah daerah Tasikmalaya. Daerah Tasikmalaya sebelum merdeka masuk ke dalam Keresidenan Priangan, sedangkan setelah Indonesia Merdeka, Tasikmalaya masuk ke dalam Provinsi Jawa Barat. Tasikmalaya dipakai sebagai tempat penulisan skripsi yang akan saya buat karena Tasikmalaya merupakan daerah yang memiliki nilai sejarah dalam perkembangan koperasi di Indonesia, terutama pada saat awal

kebangkitan koperasi di Indonesia dengan diadakannya Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya pada tanggal 11-14 Juli 1947 yang bertempat di Gedung Pusat Koperasi Kabupaten Tasikmalaya (PKKT). Kongres Koperasi Indonesia pertama adalah sebagai tanda perjuangan ekonomi rakyat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan ekonomi.

Kemudian, ruang lingkup temporal penulisan dimulai pada tahun 1930 ketika Depresi Ekonomi dunia berdampak terhadap perekonomian di Indonesia, khususnya Tasikmalaya, sehingga untuk menghadapi kondisi tersebut, koperasi muncul sebagai wadah masyarakat dalam melakukan usaha bersama. Pada masa tersebut bermunculanlah koperasi-koperasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Tasikmalaya. Demikian juga yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, awal perkembangan koperasi terjadi pada tahun 1930-an yang dibangun oleh gerakan kebangsaan yang dipimpin oleh golongan kelas menengah dalam merespon kemiskinan.¹⁶ Sementara itu, ruang lingkup temporal penelitian ini dibatasi sampai tahun 1947 karena pada tahun tersebut Tasikmalaya menjadi tempat Kongres Koperasi Indonesia pertama yang memiliki arti penting dalam perkoperasian di Indonesia dan merupakan tahun kebangkitan dunia koperasi di Tasikmalaya khususnya dan Indonesia pada umumnya

1.4 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan saya memilih topik mengenai perkembangan perkoperasian di Tasikmalaya yang dijadikan tema dari skripsi yang akan saya buat. *Pertama*, penelitian yang membahas sejarah perkembangan perkoperasian di Tasikmalaya dari tahun 1930 hingga 1947 masih terbatas. Oleh karena itu, saya ingin mengumpulkan sumber-sumber sejarah menjadi suatu tulisan yang berharga dan bermanfaat, sehingga sejarah perkembangan perkoperasian di Tasikmalaya dapat dipublikasikan melalui tulisan akademik. *Kedua*, saya sangat tertarik untuk mengangkat topik tersebut agar dapat menggugah kembali masyarakat Tasikmalaya pada khususnya dan Indonesia pada umumnya mengenai awal kebangkitan koperasi ketika diselenggarakannya Kongres Koperasi Indonesia pertama sebagai tanda perjuangan ekonomi Indonesia.

¹⁶ M. Dawam Rahardjo, 'Apa Kabar Koperasi Indonesia', dalam Rikard Bagun (editor), *Seratus Tahun Bung Hatta* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), hlm. 294.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode sejarah. Metode tersebut terdiri dari empat tahapan, yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pada tahap heuristik penulis mengumpulkan data yang bisa dijadikan sumber, baik primer maupun sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulan sumber dilakukan dengan dua cara, yakni dengan metode studi pustaka dan metode wawancara. Metode studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber tertulis yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, terutama mengenai perkembangan koperasi di Tasikmalaya, sedangkan metode wawancara digunakan untuk mendapatkan sumber lisan dari para tokoh maupun saksi sejarah mengenai perkembangan koperasi di Tasikmalaya. Penulis melakukan penelitian ke enam daerah di Indonesia dalam mengumpulkan berbagai macam sumber, yakni Tasikmalaya, Garut, Bandung, Bogor, Depok dan Jakarta.

Pertama, penulis melakukan banyak penelitian untuk mendapatkan sumber di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, seperti penelitian ke Kantor Pusat Koperasi Kabupaten Tasikmalaya (PKKT) untuk mencari data primer karena di tempat ini pernah diadakan Kongres Koperasi Indonesia pertama dan merupakan Pusat Koperasi yang pernah menghimpun koperasi-koperasi di Tasikmalaya, sehingga memiliki sumber-sumber tertulis maupun lisan mengenai perkembangan koperasi di Tasikmalaya. Penelitian selanjutnya di Tasikmalaya adalah pencarian data kepada pihak pemerintah Tasikmalaya, seperti Dinas Koperasi Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Akan tetapi, penulis mendapatkan kesulitan dalam mendapatkan data karena data pemerintah Tasikmalaya mengenai koperasi maupun perkembangan ekonomi Tasikmalaya sangat terbatas dan kebanyakan data yang dimiliki pemerintah Tasikmalaya adalah data tahun 2000-an ke atas. Begitu juga di Sekretariat Daerah (Setda) Kota Tasikmalaya, penulis tidak mendapatkan sumber yang relevan. Walaupun demikian, penulis melakukan penelitian selanjutnya ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, sehingga penulis mendapatkan beberapa sumber yang relevan mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Tasikmalaya.

Selain itu, di Tasikmalaya penulis juga melakukan penelitian dengan mengunjungi beberapa kantor koperasi yang sudah berdiri sejak 1930-an dan penulis mendapatkan beberapa sumber yang relevan, baik sumber tertulis maupun lisan. Adapun nama-nama koperasi yang menjadi tempat penelitian penulis, yakni Koperasi Selamat, Koperasi Simpanan Pamengkeut Banda dan Koperasi Mitra Batik. Selain itu, penulis melakukan penelitian ke Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota dan Kabupaten Tasikmalaya dan mendapatkan beberapa sumber tertulis mengenai sejarah Tasikmalaya dan perkembangan perkoperasian di Indonesia. Untuk melengkapi pengumpulan sumber, maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan maupun saksi sejarah yang mengetahui perkembangan perkoperasian di Tasikmalaya pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, sehingga penulis mendapatkan sumber lisan yang relevan untuk penulisan skripsi.

Kedua, penulis melakukan penelitian di Garut, yakni penelitian di Perpustakaan Daerah Garut yang memiliki buku-buku mengenai sejarah Jawa Barat, termasuk mengenai Tasikmalaya. *Ketiga*, penelitian di Bandung, yakni penelitian di Perpustakaan Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung. Disana penulis mendapatkan sumber tertulis mengenai Sejarah Jawa Barat yang didalamnya dibahas juga tentang sejarah Tasikmalaya. *Keempat*, penulis mengadakan penelitian di Bogor untuk mendapatkan sumber tertulis dan lisan dari keluarga Enie: Pengusaha Batik Tasikmalaya dan Pendiri Koperasi Mitra Batik Tasikmalaya. Di Bogor, penulis bertemu dengan Bapak Basrah Enie (putra Enie) yang mengetahui sejarah pembatikan dan pendirian Koperasi Mitra Batik di Tasikmalaya. *Kelima*, penulis melakukan penelitian di Depok, antara lain di Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia (UI). Di Perpustakaan Pusat UI, penulis mendapatkan cukup banyak sumber tertulis yang berkaitan dengan koperasi. *Keenam*, penelitian dilakukan di Jakarta. Penulis mengumpulkan sumber dari Perpustakaan Nasional (Pernas), Perpustakaan Pribadi keluarga Hatta dan bertemu dengan Ibu Meutia Hatta, putri dari Bapak Mohammad Hatta (Bapak Koperasi Indonesia) di Rawamangun, kantor Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) di Pasar Minggu dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Setelah sumber-sumber didapat, tahap selanjutnya adalah kritik. Dalam tahapan ini, penulis bisa memilah dan memilih serta mempertimbangkan sumber-sumber yang didapat bisa digunakan atau tidak bisa digunakan untuk dijadikan sumber penelitian, sehingga penulis mendapatkan sumber yang relevan dengan topik penelitian, kredibilitasnya dapat dipercaya dan sesuai dengan metode sejarah. Dalam tahap kritik, penulis membandingkan sumber yang berasal dari media masa nasional maupun lokal dengan sumber yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang terkait dengan penulisan skripsi ini agar menghasilkan sumber yang dapat dipercaya kredibilitasnya.

Penulis mendapatkan sumber primer dari Pusat Koperasi Kabupaten Tasikmalaya berupa dokumen yang diterbitkan. Dokumen tersebut menjelaskan sejarah diselenggarakannya Kongres Koperasi Indonesia Pertama di Tasikmalaya beserta hasil keputusan kongres. Dokumen tersebut menjelaskan juga pendirian PKKT yang menjadi tempat kongres koperasi tersebut. Selain itu, sumber primer didapatkan dari ANRI berupa keterangan mengenai perkembangan koperasi di Priangan pada masa kolonial dan kartografi Tasikmalaya yang menggambarkan kondisi topografi di Tasikmalaya, sehingga akan diketahui kecenderungan mata pencaharian di Tasikmalaya. Sumber primer juga didapatkan dari media cetak berupa koran sezaman pada tahun 1930-an dan 1940-an, seperti Koran *Soeara Merdeka* yang merupakan salah satu koran lokal Tasikmalaya.

Dari sumber koran, penulis mendapatkan beberapa data baru yang jarang dipublikasikan dalam sejarah perkembangan perkopersian di Indonesia pada umumnya. Seperti halnya penyebutan Konferensi Koperasi Rakyat Seluruh Jawa dan Madura lebih dikenal daripada Kongres Koperasi Indonesia Pertama pada saat diselenggarakannya kongres koperasi tersebut. Kemudian dari sumber koran menjelaskan jumlah peserta kongres yang hadir adalah 116 utusan¹⁷, sedangkan buku-buku koperasi kontemporer menjelaskan bahwa yang menghadiri kongres sebanyak 500 utusan. Disinilah perlunya tahapan kritik untuk mengetahui sumber yang relevan. Setelah mengadakan kritik dari berbagai sumber tertulis, kemudian sumber lisan yang menguatkan kredibilitas sumber yang didapatkan penulis, maka jumlah utusan yang hadir sebenarnya adalah 116 utusan, sedangkan jumlah yang

¹⁷ *Soeara Merdeka*, 12 Djoeli 1947, hlm. 3.

diundang adalah 500 utusan. Utusan yang diundang dalam kongres koperasi tersebut tidak semuanya hadir disebabkan adanya blokade jalur transportasi perairan atau laut oleh tentara Belanda, sehingga utusan dari beberapa wilayah di luar Jawa tidak dapat mengikuti kongres koperasi tersebut. Demikianlah beberapa kritik dari sumber-sumber yang didapatkan oleh penulis.

Selain sumber primer, penulis mendapatkan banyak buku sekunder mengenai koperasi. Akan tetapi, penulis perlu memilah dan memilih buku yang relevan karena ada sebagian buku yang isinya memiliki perbedaan padahal membahas tema yang sama, sehingga tidak semua buku yang didapatkan dapat dipakai dalam penulisan skripsi ini. Kadang-kadang buku-buku yang diterbitkan tidak sepenuhnya betul, sehingga perlu dilakukan pembandingan dengan manuskrip aslinya.¹⁸ Hal tersebut dapat terjadi karena terjadi kesalahan cetak maupun informasi dalam penulisan buku.

Kemudian, tahapan selanjutnya adalah tahapan interpretasi. Dalam tahapan ini, sumber-sumber yang ditemukan diberikan pemaknaan oleh penulis sehingga sumber-sumber tersebut bisa berbicara dan dapat menggambarkan suasana zamannya. Dalam tahapan interpretasi, penulis harus bisa menggambarkan bagaimana perkembangan perkoperasian di Tasikmalaya, sehingga koperasi merupakan model badan usaha yang cocok bagi ekonomi masyarakat Tasikmalaya pada khususnya dan Indonesia para umumnya.

Sementara itu, tahapan terakhir adalah tahapan historiografi, yakni tahapan penulisan sebuah peristiwa menjadi sebuah karya sejarah perkembangan perkoperasian di Tasikmalaya, sehingga menjadi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

1.6 Sumber Sejarah

Sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan ini adalah sumber primer dan sekunder. Sumber primer yang digunakan penulis berasal dari beberapa sumber tulisan dan sumber lisan dari saksi sejarah. Penulis mendapatkan sumber primer dari kantor Pusat Koperasi Kabupaten Tasikmalaya (PKKT), Kantor Koperasi Mitra Batik, Kantor Koperasi Simpanan Pemengkeut Banda (SPB), dan

¹⁸ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Nugroho Notosusanto, Penerjemah.), cetakan keempat (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006), hlm. 105-106.

koleksi pribadi keluarga Enie (pendiri Koperasi Mitra Batik mengenai perkembangan perkoperasian di Tasikmalaya pada tahun 1930-1947). Selain itu, penulis mendapatkan sumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), berupa kartografi topografi wilayah Tasikmalaya untuk mengetahui jenis mata pencaharian masyarakat Tasikmalaya dilihat dari keadaan muka bumi daerah Tasikmalaya, sedangkan sumber primer berupa koran, penulis mendapatkannya di Perpustakaan Nasional Indonesia, salah satunya adalah Koran *Soeara Merdeka* yang merupakan koran lokal Tasikmalaya.

Sementara itu, sumber lisan didapatkan dari Bapak Nana Rukmana dari pihak pengurus PKKT yang mengetahui sejarah perkembangan perkoperasi di Tasikmalaya, Bapak Drs. H. Komar Raksadiwangsa dari pihak pengurus koperasi Simpanan Pamengkeut Banda (SPB) yang menjelaskan sejarah perkembangan Koperasi SPB, dan Bapak A. Basrah Enie dari pihak keluarga Enie (pendiri Koperasi Mitra Batik) yang mengetahui sejarah pendirian Koperasi Mitra Batik dan dua orang bersaudara, yaitu Udin Karto dan Ude Kurnaedi sebagai saksi mata dari warga Tasikmalaya yang melihat adanya Kongres Koperasi Indonesia pertama dan menjelaskan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Tasikmalaya di sekitar tempat kongres koperasi tersebut.

Kemudian, sumber sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku yang berjudul *Panca Windu Gerakan Koperasi Indonesia (12 Juli 1947-1987)* yang diterbitkan oleh Dewan Koperasi Indonesia mengenai Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya. Selain itu, dalam buku tersebut terdapat gambar tokoh dan tempat kongres tersebut, serta monumen koperasi yang menandai bahwa di Tasikmalaya pernah diselenggarakan Kongres Koperasi Indonesia pertama pada tanggal 11-14 Juli 1947. Kemudian penulis mendapatkan buku *Direktori Perkoperasian Kota Tasikmalaya* yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Kota Tasikmalaya. Buku tersebut berisi sejarah singkat perkoperasian Tasikmalaya dan nama-nama koperasi yang ada di Kota Tasikmalaya. Penulis juga mendapatkan satu buku yang berjudul, *Sekitar Lahirnya Hari Koperasi Indonesia 12 Juli 1947* dari Dewan Koperasi Daerah (DEKOPINDA) Kota Tasikmalaya.

Selain itu, penulis mendapatkan sumber sejarah sekunder juga dari Perpustakaan Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, seperti buku *Hari Jadi Tasikmalaya* yang diterbitkan Pemerintah Daerah Tingkat II Tasikmalaya mengenai sejarah Tasikmalaya. Demikian juga di Perpustakaan Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung, penulis mendapatkan buku-buku mengenai sejarah Tasikmalaya, seperti *Sejarah Kota-Kota Lama di Jawa Barat dan Sejarah Tatar Sunda Jilid II* yang ditulis oleh Nina Herlina Lubis. Sementara itu, penulis mendapatkan beberapa sumber sekunder dari Perpustakaan Universitas Indonesia (UI) yang memiliki banyak buku-buku mengenai koperasi, seperti buku *Indonesia Berkoperasi* yang ditulis oleh Sagimun M.D, *et al.* dan *Meninjau Masalah Kooperasi* yang ditulis Mohammad Hatta.

1.7 Sistematika Penelitian

Untuk memahami permasalahan yang diungkapkan diawal, skripsi ini akan dibahas dalam lima bab sebagai berikut:

Bab 1 merupakan bab pendahuluan yang membahas tentang latar belakang penulisan, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2 membahas mengenai kondisi sosial dan ekonomi di Tasikmalaya untuk mengetahui kehidupan masyarakat Tasikmalaya, sehingga menggambarkan kondisi masyarakat Tasikmalaya pada masanya sesuai dengan kurun waktu penulisan skripsi ini, yakni tahun 1930-1947. Dalam kurun waktu tersebut, kondisi sosial dan ekonomi di Tasikmalaya dibagi menjadi beberapa masa, yakni masa penjajahan Kolonial Belanda memasuki abad ke-20 dan pada masa Depresi Ekonomi, masa pendudukan Jepang dan masa kemerdekaan Indonesia.

Bab 3 membahas mengenai awal perkembangan perkoperasian di Tasikmalaya yang tidak terlepas dari sejarah awal perkembangan perkoperasi di Indonesia dengan disertai jumlah perkembangan koperasi di Indonesia. Dalam bab ini juga membahas beberapa koperasi yang menjadi percontohan, seperti Koperasi Mitra Batik, Koperasi Selamat dan Koperasi Simpanan Pamengkeut Banda. Selain itu, bab ini juga membahas peranan perkoperasian bagi masyarakat Tasikmalaya.

Bab 4 membahas mengenai Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya pada tanggal 11-14 Juli 1947 sebagai tanda perjuangan bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi, sehingga dapat mengembangkan ekonomi rakyat, khususnya bagi masyarakat di Tasikmalaya. Dalam bab ini membahas juga latar belakang, suasana dan pengaruh dari Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya, sehingga memiliki arti penting dalam perkembangan koperasi di Tasikmalaya pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Bab 5 adalah kesimpulan. Dalam bab ini merupakan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan berdasarkan permasalahan yang diajukan. Dengan demikian, diharapkan diperoleh suatu gambaran mengenai sejarah perkembangan perkoperasian di Tasikmalaya yang memiliki nilai sejarah yang tidak dapat dilupakan dalam sejarah perkoperasian Indonesia, sehingga dapat menambah wawasan bagi para pembaca skripsi ini dan menjadi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, dijelaskan juga relevansi koperasi dengan perkembangan ekonomi zaman sekarang untuk membangun kesadaran bahwa koperasi merupakan badan usaha yang sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia.

Tambahan catatan mengenai ejaan nama tokoh yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah ejaan lama sesuai yang telah tercantum dalam sumber yang diperoleh penulis, seperti *oe* untuk *u*, *dj* untuk *j*, dan *j* untuk *y*.

BAB 2

KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT TASIKMALAYA

2.1 Kondisi Sosial dan Ekonomi Tasikmalaya memasuki Abad ke-20

Memasuki abad ke-20, Tasikmalaya dikenal dengan nama Sukapura karena Sukapura merupakan pusat kabupaten pada saat itu. Wilayah Kabupaten Sukapura terletak di bagian tenggara Jawa Barat¹⁹. Pada tahun 1901, batas wilayah Kabupaten Sukapura berbatasan dengan Galuh (Ciamis), Limbangan (Garut) dan Cilacap²⁰. Sebagian besar dari jumlah penduduk Tasikmalaya memeluk agama Islam.²¹ Adapun mata pencaharian sebagian penduduk Sukapura adalah bertani, berdagang dan bekerja sebagai buruh. Sebagaimana mata pencaharian pokok dari masyarakat pribumi Tatar Sunda pada umumnya adalah pertanian. Sektor pertanian menjadi mata pencaharian pokok karena tanahnya yang subur dan iklimnya yang baik untuk pertanian.²²

Memasuki awal abad ke-20, telah terjadi perubahan sosial yang signifikan dalam perekonomian di Hindia Belanda. Pemerintah Kolonial Belanda melalui Undang-Undang Agraria 1870 sebagai bentuk liberalisasi ekonomi, memberikan ruang kepada para pengusaha swasta untuk menanamkan modalnya di Hindia Belanda. Oleh karena itu, dibuatlah perusahaan atau perkebunan-perkebunan besar (*onderneming* besar) untuk menghasilkan barang-barang bagi pasar dunia yang berdampak pada perubahan sosial ekonomi masyarakat, sehingga berdampak pula terhadap wilayah Kabupaten Sukapura. Dengan dikeluarkannya Undang-undang tersebut terjadi perubahan penting, yaitu kedudukan pemerintah diganti oleh usahawan perkebunan dan kerja paksa diganti dengan kerja upah. Sebagai *onderneming* besar, masyarakat Hindia Belanda dipandang semata-mata sebagai daerah persediaan buruh yang murah.

¹⁹ Sali Iskandar, *West Mosaic Java* (Bandung: Yayasan Wahana Citra, 1992), hlm. 100.

²⁰ 'Peta 5 Wilayah Kabupaten Sukapura Tahun 1901' dalam R. Unang Sunardjo, *et al.*, *Hari Jadi Tasikmalaya*. (Tasikmalaya: Pemerintah Daerah Tingkat II Tasikmalaya, 1975).

²¹ Widy Nugrahanto, *et al.*, *Perkreditasi Rakyat di Tasikmalaya Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda dan Republik Indonesia (1900-2003)* (Bandung: Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran, 2008), hlm. 21.

²² Nina Herlina Lubis (1956), *op cit.*, hlm. 98.

Adapun dasar ekonominya adalah “export-economie”²³ yang pada dasarnya digunakan untuk memenuhi keperluan rakyat. Akan tetapi, dalam realitanya justru lebih menguntungkan pihak pengusaha perkebunan besar dan orang-orang Barat dalam penyediaan barang keperluannya daripada untuk memenuhi keperluan hidup rakyat.²⁴ Perkebunan-perkebunan besar tumbuh dengan jumlah yang cukup banyak di Jawa barat. Demikian juga di Sukapura yang merupakan bagian wilayah administrasi Propinsi Jawa Barat, sehingga di Sukapura juga banyak terdapat perkebunan-perkebunan yang cukup luas. Perkebunan-perkebunan yang ada di Sukapura, terutama terdapat di dua distrik, yaitu Singaparna dan Banjar (sebelum menjadi daerah bagian Ciamis) dengan pemilik perkebunan dari pihak swasta. Sementara itu, jenis tanamannya berupa tanaman ekspor, seperti teh, lada dan kelapa. Adapun dampak sosial ekonomi dari adanya perkebunan-perkebunan tersebut adalah lahirnya kelompok masyarakat yang menjadi tenaga buruh di perkebunan, sehingga memberikan dampak bagi mata pencaharian masyarakat Sukapura yang semula hanya bekerja sebagai petani berubah menjadi buruh. Mereka mengenal uang sebagai imbalan atau upah bekerja, sehingga dipakai sistem ekonomi uang.²⁵

Untuk menunjang pengangkutan barang-barang hasil perkebunan, maka dibangunlah jalan kereta api. Wilayah Sukapura termasuk salah satu wilayah yang dilalui jalur kereta api. Bahkan pembangunan jalur kereta api di Sukapura, bukan hanya jaringan antar kota, tetapi dibangun pula jalur dalam kota yaitu Tasikmalaya-Singaparna. Tarbangunnya jaringan transportasi kereta api berpengaruh pada mobilitas masyarakat. Sukapura menjadi bagian jalur lalu-lintas penting di pulau Jawa. Posisi seperti ini sangat memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan kabupaten Sukapura.²⁶

²³ “Export-economie” adalah dasar ekonomi yang mengutamakan ekspor untuk memenuhi keperluan yang tidak dapat dihasilkan sendiri, sehingga didatangkan dari luar negeri (diimpor) sebagai tukaran ekspor.

²⁴ Pidato Mohammad Hatta pada pembukaan Konferensi Ekonomi di Yogyakarta, 3 Februari 1946 dalam Mohammad Hatta, *Membangun Kooperasi dan Kooperasi Membangun*, cetakan pertama (Jakarta: Pusat Koperasi Pegawai Negeri Djakarta-Raja (PKPN), 1971), hlm. 178-179.

²⁵ Tim Penulis Badan Perencanaan dan pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Tasikmalaya, *Sejarah Kota Tasikmalaya*, (Tasikmalaya: BAPPEDA Kota Tasikmalaya, 2003), hlm. 60.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 61.

Pada tanggal 1 Oktober 1901, Kabupaten Sukapura dipindahkan ke Tasikmalaya dan Tasikmalaya pun ditetapkan menjadi pusat daerah kabupaten pada saat itu. Pada akhirnya, nama Kabupaten Sukapura pada tahun 1913 diganti namanya menjadi Kabupaten Tasikmalaya. Bupati pada waktu itu dijabat oleh Raden Aria Adipati Wiratanuningrat (1908-1937). Pada masa beliau, Tasikmalaya mengalami kemajuan dalam berbagai bidang, seperti membuka rawa Lakbok dan hutan Gagayunan menjadi daerah perkebunan dan pesawahan, memajukan koperasi dagang, dan jembatan, seperti jembatan di Mangunreja, sehingga perkembangan ekonomi Tasikmalaya awal abad ke-20 dapat berkembang baik.²⁷

2.2 Depresi Ekonomi pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda

Memasuki tahun 1930, pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dipimpin oleh Raden Aria Adipati Waratanuningrat. Pada masa awal pemerintahan Raden Aria Adipati Waratanuningrat, Kabupaten Tasikmalaya mengalami kemajuan. Akan tetapi, diakhir pemerintahannya, terutama pada saat memasuki tahun 1930, kehidupan para pengusaha dan petani mulai mengalami kesulitan ekonomi. Hal itu tidak terlepas dari Depresi Ekonomi Dunia yang dikenal juga sebagai zaman *Malaise* adalah suatu keadaan di mana menurunnya tingkat suku bunga dan harga saham secara drastis yang mengakibatkan timbulnya kekacauan ekonomi di seluruh dunia.²⁸ Depresi Ekonomi 1930-an merupakan depresi terparah sepanjang masa yang berawal dari Amerika Serikat.

Depresi Ekonomi 1930-an telah membawa dampak negatif bagi perekonomian di Tasikmalaya. Di daerah Tasikmalaya, krisis ekonomi tersebut sangat dirasakan pengaruhnya, terutama di kalangan para pengusaha dan petani. Depresi ekonomi dunia dan tekanan-tekanan yang dilancarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda yang disibukan menyelamatkan neraca perdagangan di negerinya mengakibatkan kondisi sosial dan ekonomi di daerah Tasikmalaya menjadi memprihatinkan. Akibatnya, daerah Tasikmalaya yang memiliki posisi cukup strategis dan potensial karena daerah Tasikmalaya terletak di jalur

²⁷ Nina Herlina Lubis, *Sejarah Kota-Kota Lama di Jawa Barat* (Bandung: Alqaprint, 2000), hlm.104.

²⁸ Widyo Nugrahanto, *et al.*, *Perkreditasi Rakyat di Tasikmalaya Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda dan Republik Indonesia (1900-2003)* (Bandung: Laporan Penelitian Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran, 2008), hlm. 27.

pertemuan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah dalam suatu rute lalu lintas darat jalur selatan, terutama dalam jalur perdagangan menyebabkan harga barang untuk keperluan hidup sehari-hari meningkat berlipat ganda dari masa sebelumnya, sedangkan mata pencaharian rakyat tidak ada peningkatan.²⁹ Hal itu membuat Tasikmalaya sangat merasakan akibat depresi ekonomi pada waktu itu.

Keperihatinan kondisi ekonomi tersebut tidak terlepas dari beberapa sebab. *Pertama*, pemerintah kolonial Belanda menjalankan politik perekonomian yang mengutamakan kepentingan bangsa asing, terutama bangsa Eropa, Cina, bahkan bangsa Jepang daripada memperhatikan perekonomian penduduk pribumi.³⁰ *Kedua*, pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu menjalankan taktik perekonomian tidak berdasar pada sifat-sifat kompromis terhadap masyarakat Tasikmalaya. *Ketiga*, sebagai akibat gencarnya tekanan-tekanan dari para pengusaha minoritas Cina yang cukup berpengalaman dalam dunia dagang, dan modal cukup memadai, sehingga mereka selalu lebih unggul dalam dunia perdagangan. Selain itu, orang Cina juga bertindak sebagai pelepas uang dalam bentuk perjanjian mengikat (rentenir), sehingga banyak penduduk Tasikmalaya yang terjatuh utang. *Keempat*, belum adanya kesadaran akan integrasi dalam usaha dari para pengusaha Tasikmalaya dalam memperkecil tingkat ketidakpastian dalam usaha, sehingga para pengusaha yang masih baru mendapatkan kesulitan dalam upaya pengadaan bahan baku.³¹

Sebagaimana terjadi dalam salah satu kasus kesulitan pengadaan bahan baku pernah dialami oleh para pengusaha batik dari salah satu koperasi yang pernah berjaya di Tasikmalaya pada tahun 1930-an, yakni Koperasi Mitra Batik. Mereka mendapatkan kesulitan dalam pengadaan barang, seperti *white cambrics* dan ban-bahan batik lainnya disebabkan oleh kondisi ekonomi yang tidak menentu dan adanya permainan harga bahan-bahan batik yang dikuasai oleh para pedagang Cina³², sehingga dibentuklah Koperasi Mitra Batik.

²⁹ Nina Herlina Lubis (1956), *op cit.*, hlm. 105.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 105.

³¹ Widyo Nugrahanto, *et al.*, *Perkreditasi Rakyat di Tasikmalaya Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda dan Republik Indonesia (1900-2003)* (Bandung: Laporan Penelitian Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran, 2008), hlm. 28.

³² A. Basrah Enie, *Enie Sosok Pengusaha Batik Tasik (1906-1966)*, (Bogor: A. Basrah Enie, 1995), hlm. 14.

Selain itu, adanya perhatian dari bupati Bandung, yakni Raden Aria Adipati Wiranatakusumah V (1920-1945) juga telah menggugah tokoh-tokoh *Paguyuban Pasundan* dan sejumlah saudagar dari *Himpunan Soedara* untuk mengatasi krisis ekonomi di kalangan rakyat. Seiring dengan perbaikan ekonomi di Jawa Barat, berdirilah banyak bank dan koperasi yang didirikan oleh organisasi dan lembaga sosial yang ikut mendorong kalangan pengusaha menengah bumiputra untuk menghimpun beberapa koperasi kredit menjadi “Koperasi Kredit Pusat” (*Centrale Crediet Cooperaties*).³³ Sementara itu, untuk di Tasikmalaya tidak terlepas dari peranan bupati Tasikmalaya sendiri yang bernama Raden Aria Adipati Wiratanuningrat (1908-1937) yang banyak melakukan pembangunan di Tasikmalaya, seperti membangun sarana transportasi dan koperasi dagang. Bupati Raden Aria Adipati Wiratanuningrat pun diberi gelar oleh rakyat Tasikmalaya sebagai “Bupati Pembangunan Tasikmalaya”.³⁴ Beliau wafat pada tanggal 5 Mei 1937 dan dimakamkan di Tanjungmalaya (makam para Bupati Sukapura di Manonjaya). Sebagai penggantinya diangkat Raden Tumenggung Wiradiputra, putra Raden Aria Wirahadiningrat yang merupakan keturunan Bupati Sukapura yang ke-15.

Pada 1 Januari 1938 sebagian wilayah Kabupaten Tasikmalaya yaitu distrik Banjar, Pangandaran dan Cijulang dimasukkan kedalam Wilayah Kabupaten Ciamis. Perubahan ini dilangsungkan dengan persetujuan Bupati Ciamis waktu itu, yaitu Raden Tumenggung Aria Sunarya, yakni adik dari Raden Tumenggung Wiradiputra.³⁵ Hal tersebut membuat berkurangnya luas wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Memasuki tahun 1940, koperasi kredit berkembang ke berbagai daerah di Jawa Barat, seperti Tasikmalaya, Sukabumi, Garut dan Ciamis. Sejalan dengan perkembangan koperasi, di Kota Tasikmalaya dan Bandung berdirilah “Sekolah Dagang Kecil” (*Klein Handel School*). Sistem sekolah tersebut sangat praktis, yaitu mewajibkan para siswa untuk berjualan di jalan-jalan dan ke rumah-rumah.³⁶ Sementara itu, dampak *malaise* terhadap kehidupan orang-orang non-pribumi tidak begitu berat karena penduduk bangsa Eropa dan bangsa asing

³³ Nina Herlina Lubis (1956), *op cit.*, hlm. 106.

³⁴ Nina Herlina Lubis (2000), *op cit.*, hlm. 109.

³⁵ Tim Penulis BAPPEDA Kota Tasikmalaya, *op cit.*, hlm. 65-66.

³⁶ Nina Herlina Lubis (1956), *op. cit.*, hlm. 106.

mendapat perlindungan dan hak-hak istimewa dari pemerintah kolonial Belanda, sehingga menimbulkan kekecewaan bagi rakyat pribumi dan mendapat kritikan dari wakil-wakil rakyat pribumi di *Volksraad*.³⁷

Raden Tumenggung Wiradiputra memerintah Tasikmalaya dalam dua kurun waktu, yang pertama tahun 1938-1944 dan yang kedua tahun 1948-1949, sedangkan diantara dua kurun waktu tersebut, yakni pada tahun 1944-1948 Kabupaten Tasikmalaya diperintah oleh Raden Tumenggung Aria Sunarya. Raden Tumenggung Wiradiputra yang menjadi Bupati untuk kedua kalinya pada tahun 1948-1949 merupakan Bupati terakhir turunan Sukapura yang menjadi Bupati Tasikmalaya. Dengan demikian tradisi jabatan Bupati tidak lagi menurut keturunan satu keluarga dan hal ini sesuai dengan alam merdeka dan demokratis.

2.3 Ekonomi Perang Pada Masa Pendudukan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 secara langsung telah menyebabkan terjadinya perubahan sosial yang signifikan dalam rakyat pribumi, termasuk yang dialami oleh rakyat pribumi di Tasikmalaya. Salah satu perubahan sosial yang mencolok adalah perubahan dalam pelapisan sosial. Pada masa penjajahan Belanda, ada tiga lapisan dalam masyarakat yang didasarkan atas ras. Lapisan pertama terdiri dari golongan orang Belanda dan Eropa lainnya. Lapisan kedua adalah orang Timur Asing (Cina, Arab dan India), dan yang terakhir adalah bangsa Indonesia. Akan tetapi, setelah Jepang berkuasa, susunannya berubah. Lapisan pertama diduduki oleh orang Jepang sebagai pemenang perang melawan bangsa Eropa. Selanjutnya diikuti oleh bangsa Timur Asing dan Indonesia pada lapisan kedua, sedangkan orang Belanda dan Eropa menempati lapisan ketiga.

Sistem persekolahan di zaman pendudukan Jepang banyak mengalami perubahan karena sistem diskriminasi menurut golongan bangsa maupun status sosial dihapuskan, sehingga terdapat integrasi berbagai macam sekolah yang sejenis. Sejak masa pendudukan Jepang, bahasa dan istilah-istilah Indonesia mulai digunakan di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan. Pada saat itu hanya ada satu macam sekolah untuk Sekolah Dasar, yaitu yang disebut Sekolah Rakyat (*Kuokumin Gakko*). Sekolah tersebut terbuka untuk umum, semua

³⁷ *Ibid.*, hlm. 107.

golongan penduduk, dan lama pendidikan selama enam tahun.³⁸ Setelah Sekolah Rakyat diteruskan ke Sekolah Menengah Pertama (*Soto Chu Gokko*) dengan lama pendidikan selama tiga tahun, salah satu daerah dibukanya sekolah tersebut adalah di Tasikmalaya. Kemudian dibuka juga Sekolah Menengah Atas yang sering disebut Sekolah Menengah Tinggi (SMT). Mula-mulanya hanya ada di empat buah di Indonesia, yakni di Jakarta, Semarang, Yogya dan Surabaya. Kemudian pada tahun 1943, didirikan lagi dua buah SMT di Surakarta dan Bandung, sedangkan di Tasikmalaya dibukanya Sekolah Kejuruan Menengah, yakni Sekolah Pertanian. Di Tasikmalaya juga terdapat sekolah untuk mendidik guru yang terdiri dari tiga jenis sekolah, yakni Sekolah Guru dua tahun (*Syoto Sihan Gokko*), Sekolah Guru empat tahun (*Guto Sihan Gokko*), dan Sekolah Guru empat tahun (*Koto Sihan Gokko*). Perhatian pemerintah militer Jepang terhadap pendidikan tidak lain karena untuk menjalankan kebijakan politiknya di Indonesia guna mendapatkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan dapat menanamkan semangat *Dai Nippon*, sehingga dapat membantu Jepang dalam memenuhi keperluan perangnya.³⁹

Disamping perhatian dalam pendidikan, Jepang juga mengambil alih semua kendali kegiatan ekonomi dari keadaan ekonomi normal menjadi keadaan ekonomi perang untuk keperluan perangnya melawan tentara sekutu dalam Perang Asia Timur Raya.⁴⁰ Seluruh rakyat Jawa Barat, termasuk Tasikmalaya dikerahkan untuk menanam pohon jarak, mencari dan mengumpulkankelapa, beras, kain, perhiasan emas, serta permata untuk dibawa ke Jepang guna keperluan Perang Asia Timur Raya.⁴¹ Rakyat di Tasikmalaya diharuskan mengumpulkan beras sebanyak tiga kuintal sebulan pada masa pendudukan Jepang. Akan tetapi, pada waktu itu bupati Tasikmalaya, yakni Raden Tumenggung Wiradiputra⁴² menolak dan hanya menyanggupi satu kuintal sebulan melihat kondisi bahaya kelaparan yang akan menimpa rakyatnya.

³⁸ Marwati Djoened dan Nograho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Cetakan keenam (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 51.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 176.

⁴⁰ Marwati Djoened dan Nograho Notosusanto, *op cit.*, hlm. 41.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 160.

⁴² R.T Wiradiputra pernah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya sebanyak dua kali, yakni sejak tahun 1938-1944 dan 1947-1949. R. Unang Sunardjo, *et al.*, *op cit.*, hlm. 85.

Peraturan pengumpulan beras pada masa pendudukan Jepang juga mendapat reaksi perlawanan dari KH. Zaenal Mustofa dengan pemberontakannya yang terkenal dengan “Pemberontakan Sukamanah” bersama bupati dan para santrinya di Pesantren Sukanamah, Singaparna.⁴³ Walaupun pada akhirnya pemberontakan dapat dihentikan oleh bala tentara Pemerintahan Militer Jepang. Pada masa pendudukan Jepang harus menghadapi kesulitan kembali karena perekonomian di Tasikmalaya digunakan untuk keperluan perang Jepang, bukan untuk kepentingan rakyat di daerah Tasikmalaya. Oleh karena itu, pada waktu jaman Jepang, pemerintahan di Kabupaten Tasikmalaya tidak banyak mengalami perubahan yang prinsipil. Pemerintahan berjalan biasa, dan merupakan kelanjutan dari Pemerintahan sebelumnya. Hal yang perlu dicatat bahwa pada zaman Jepang, di Singaparna tepatnya di Sukamanah terjadi perlawanan rakyat kepada pihak Jepang yang dipimpin oleh K.H. Zaenal Mustofa pada tanggal 25 Pebruari 1944.⁴⁴

Sementara itu, pada masa pendudukan Jepang istilah koperasi lebih dikenal menjadi istilah “*Kumiai*”. *Kumiai* pada mulanya bertugas untuk mendistribusikan barang-barang kebutuhan rakyat. Namun, pada kenyataannya menjadi alat dari Jepang untuk mengumpulkan hasil bumi dan barang-barang kebutuhan untuk Jepang.⁴⁵ Oleh karena itu, perekonomian rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang tidak lain adalah untuk digunakan dalam memenuhi keperluan perang Jepang. Ada dampak positif yang dapat diambil dari pendirian *Kumiai* ini, jelas bahwa *Kumiai* bukanlah sebenar-benarnya koperasi, tetapi justru melalui *Kumiai* ini pengalaman ber-“koperasi” menjadi menyeluruh ke segenap lapisan masyarakat Indonesia⁴⁶, termasuk Tasikmalaya juga.

⁴³ Nina Herlina Lubis, *Sejarah Kota-Kota Lama di Jawa Barat* (Bandung: Alqaprint. 2000), hlm.109.

⁴⁴ Tim Penulis BAPPEDA Kota Tasikmalaya, *op cit.*, hlm. 65-66. Beliau dianugrahi gelar Pahlawan Nasional dengan Surat Presiden Republik Indonesia Nomor : 064/TK/92 tanggal 6 Nopember 1992.

⁴⁵ Masngudi, *Penelitian Tentang Sejarah Perkembangan Koperasi Di Indonesia* (Jakarta: Laporan Penelitian Badan Penelitian Pengembangan Koperasi, Departemen Koperasi), 1990.

⁴⁶ Wahyu Sukotjo, ‘Sejarah Perkembangan Permasalahan dan Peranan Koperasi’, *Prisma*, No. 6, Tahun VII, Juli 1978, hlm. 32.

2.4 Bangkitnya Perekonomian di Tasikmalaya pada Masa Kemerdekaan

Negara Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan penuh perjuangan melalui peperangan dan diplomasi dalam menghadapi penjajah, sehingga kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia sebelum merdeka mengalami kondisi yang kurang menguntungkan akibat penjajahan. Akan tetapi, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, dengan tegas perekonomian di Indonesia ditulis di dalam konstitusi Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 33 yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Selain itu, bumi, air dan kekayaan alam yang penting dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat.⁴⁷ Oleh karena itu, kemerdekaan Indonesia telah memberi babak baru bagi masyarakat Indonesia untuk berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, baik dalam bidang ekonomi maupun politik.

Sejak Indonesia merdeka, masyarakat Tasikmalaya mendapatkan kebebasan dalam menjalankan aktivitasnya dari tangan penjajah. Perekonomian Tasikmalaya pun dapat berjalan dengan lebih baik daripada sebelumnya karena didukung oleh pemerintahan Indonesia sendiri tanpa campur tangan penjajah. Adapun yang memerintah Tasikmalaya setelah Indonesia merdeka adalah Bupati Raden Tumenggung Sunarya (1944-1948) yang merupakan putera Bupati Raden Aria Adipati Wiratanuningrat dan adik dari Bupati Raden Tumenggung Wiradiputra, merupakan Bupati turunan Sukapura yang ke-16.⁴⁸

Pada masa jabatan Bupati Raden Tumenggung Sunarya banyak peristiwa penting yang tercatat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pada tanggal 18 September 1945 sebanyak kurang lebih 2.000 pemuda dari semua lapisan, melakukan penyerbuan markas Kempeitai di Kantor Asisten Residen dan berhasil melucuti senjata Kempeitai. Pada masanya juga, diadakannya penerbangan pertama pesawat terbang "*Nishikoren*" hasil rampasan dari tentara Jepang yang kemudian diperbaiki dan dapat diterbangkan oleh Pilot Adisutjipto dari pangkalan

⁴⁷ J.C.T Simorangkir dan B. Mang Reng Say, *Tentang dan Sekitar Undang-Undang Dasar 1945*, cetakan kesebelas (Jakarta: Djambatan, 1987), hlm. 94.

⁴⁸ Tim Penulis BAPPEDA Kota Tasikmalaya, *op cit.*, hlm. 74.

udara Cibereum dengan bendera Merah Putih pada tanggal 10 Oktober 1945. Dalam menjaga keamanan, dibentuknya Divisi Siliwangi tanggal 20 Mei 1946 dengan panglima pertamanya adalah Kolonel A. H. Nasution dengan markas komando terletak di Hotel Pemandangan, Jalan Manonjaya.⁴⁹

Pada masa Bupati Raden Tumenggung Sunarya, Tasikmalaya menjadi pemerintahan pengungsian Jawa Barat yang berkantor di Jalan Otto Iskandardinata No. 9 Tasikmalaya. Akan tetapi, Kota Tasikmalaya mendapat serangan hebat dari tentara Belanda dan Tasikmalaya dapat diduduki selama kurang 7 bulan, sehingga kedudukan Pemerintahan Daerah Jawa Barat dengan Gubernur Sewaka terpaksa berpindah-pindah ke tempat lain di pedalaman antara lain di Sukaraja, kemudian pindah lagi ke Lebaksiuh Desa Cipicung Kecamatan Bantarkalong (sekarang Kecamatan Culamega), pindah lagi ke Kampung Culamega Desa Cikuya Kecamatan Culamega, pindah lagi ke Cisurupan Desa Bantarkalong, pindah lagi ke Desa Cikuya dan kemudian ke Desa Tawangbanteng Kecamatan Indihiang (sekarang Kecamatan Sukaratu). Sementara itu, pada saat Tasikmalaya berada ditengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak kondusif, pada tanggal 11 sampai dengan 14 Juli 1947 berlangsung Kongres Koperasi seluruh Indonesia bertempat di Kantor Pusat Koperasi Kabupaten Tasikmalaya (PKKT) di Jalan Ciamis⁵⁰ yang antara lain melahirkan keputusan ditetapkannya Hari Koperasi tanggal 12 Juli.⁵¹

Berbagai pembangunan oleh pemerintah Tasikmalaya dilakukan untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia setelah Indonesia mencapai kemerdekaan, salah satunya adalah memperjuangkan perkembangan koperasi untuk menyediakan bahan baku dan pinjaman modal yang diperlukan oleh masyarakat Tasikmalaya. Kemerdekaan Indonesia telah memberikan harapan dan babak baru untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Tasikmalaya dan bangkit dari keterpurukan akibat penjajahan dari bangsa asing.

⁴⁹ Sekarang Hotel Pemandangan berubah fungsi menjadi Bank Mandiri, sedangkan Jalan Manonjaya diganti dengan nama Jalan Otto Iskandardinata. Tim Penulis BAPPEDA Kota Tasikmalaya, *op cit.*, hlm. 74-75.

⁵⁰ Saat penulisan skripsi ini, Jalan Ciamis sudah berganti nama menjadi Jalan Moh. Hatta.

⁵¹ Tim Penulis BAPPEDA Kota Tasikmalaya, *op cit.*, hlm. 75-76.

BAB 3

PERKEMBANGAN KOPERASI DI TASIKMALAYA

3.1 Perkembangan Koperasi memasuki abad ke-20

Sejarah awal perkoperasian di Tasikmalaya tidak terlepas dari sejarah awal perkoperasian Indonesia. Sejarah koperasi di Indonesia bermula ketika pada tahun Raden Aria Wiraatmadja, Patih Purwokerto dengan mendirikan *Hulp en Spaar Bank* (Bank Pertolongan dan Simpanan). Bank ini bukanlah suatu bank koperasi. Akan tetapi, dalam kegiatannya semacam Koperasi Simpan Pinjam (KSP)⁵² yang bertujuan memberikan kredit atau pinjaman kepada para pegawainya agar terlepas dari cengkaman lintah darat.⁵³ Dari usaha Raden Aria Wiraatmadja inilah yang menggerakkan hati De Wolff van Westerode, asisten Residen Wilayah Purwokerto di Banyumas menganjurkan pembangunan koperasi kredit guna kaum tani di seluruh keresidenan Banyumas.⁵⁴

Saat De Wolff van Westerode cuti ke Eropa, ia mempelajari cara kerja *volksbank*⁵⁵ secara Raiffesien (koperasi simpan pinjam kaum tani) dan Schulze-Delitzsch (koperasi simpan pinjam kaum buruh di kota) di Jerman. Setelah kembali lagi ke Purwokerto, ia mengubah *Hulp en Spaar Bank* menjadi *Poerwokertosche Hulp Sparr en Landbouweredietbank* untuk membantu kaum tani.⁵⁶ Akan tetapi, usahanya tidak banyak berhasil karena kondisi ekonomi kaum pribumi pada saat itu masih lemah dan pemerintah Hindia Belanda merasa khawatir bahwa organisasi koperasi akan dijadikan alat politik untuk melawan penjajah.⁵⁷

⁵² Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya dalam memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos (bunga) yang ringan. Nama lain Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi Kredit. Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, cetakan keempat (Jakarta: PT Bina Adiaksara dan PT. Rineka Cipta, 2003), hlm. 22.

⁵³ Momo Surtama, *op cit.*, hlm. 2.

⁵⁴ Mohammad Hatta, *The Co-operative Movement in Indonesia* (New York: Cornell University Press, 1957), hlm. 6.

⁵⁵ "Volksbank" dapat diartikan sebagai "Bank Rakyat". 'Dari Bank Priayi ke Bank Rakyat', <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1999/02/09/INT/mbm.19990209.INT93448.id.html> diunduh pada Selasa, 26 Juni 2012, pukul 19:11 WIB.

⁵⁶ Mohammad Hatta (1971), *op cit.*, hlm. 202-203.

⁵⁷ Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *op cit.*, hlm. 40.

Kekawatiran pemerintah Hindia Belanda menjadi kenyataan saat berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 dan Sarekat Dagang Islam pada tahun yang kemudian menjadi Sarekat Islam pada tahun 1911 yang sama-sama membangkitkan gerakan koperasi.⁵⁸ Kedua organisasi ini mendorong pembentukan koperasi rumah tangga dan koperasi konsumsi yang menjadi alat dalam meningkatkan tarat hidup kaum pribumi, sehingga pemerintah Hindia Belanda segera menyusun rencana untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dari pendirian koperasi.

Pemerintah Hindia Belanda menerapkan peraturan yang ketat untuk menghambat perkembangan perkoperasian di Indonesia guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Adapun peraturan yang dikeluarkan oleh Hindia Belanda, yakni Undang-Undang Koperasi yang dikenal dengan nama *Verodening op de Cooperatieve Verenigingen* 1915.⁵⁹ Undang-undang ini cenderung menghambat perkembangan koperasi karena dalam pasal-pasalny menyebutkan bahwa akte atau rancangan pendirian koperasi harus diperiksa dan disetujui oleh Gubernur Jenderal, sehingga pendirian koperasi terasa sulit bagi kaum pribumi, disamping mereka kekurangan skill dan modal. *Pertama*, akte pendirian koperasi dibuat oleh notaris. *Kedua*, akte pendirian harus dibuat dalam Bahasa Belanda. *Ketiga*, akte pendirian koperasi harus mendapat ijin dari Gubernur Jenderal. *Keempat*, pembuatan akte pendirian koperasi diperlukan biaya meterai f50.⁶⁰

Pada awal tahun 1920-an banyak perkumpulan koperasi didirikan di daerah Priangan. Akan tetapi, programnya sering terlalu luas, kekurangan pemimpin yang baik dan terpercaya, sehingga banyak koperasi yang tidak dapat hidup lama. Ada beberapa koperasi yang baik, yaitu Perkumpulan Koperasi “Mangun Subaya” dan “Guna Perniagaan”. Mangun Subaya adalah koperasi di Ciamis yang bertujuan melawan sistem ijon kelapa, sedangkan Guna Perniagaan adalah koeperasi kredit untuk pedagang kecil dan orang-orang yang sangat

⁵⁸ Sagimun M.D., *et al.*, *Indonesia Berkoperasi*, cetakan ke-II (Jakarta: P.N. Balai Pustaka, 1965), hlm. 69.

⁵⁹ Undang-undang tersebut dinamai juga Ketetapan Raja No. 431 tahun 1915 (*Koninklijke Besluit* no. 431 tahun 1915). Masngudi, *op cit.*

⁶⁰ *Ibid.*

memerlukan kredit dengan bunga rendah⁶¹. Untuk mengawasi perkembangan koperasi, maka pada tahun 1920 dibentuk suatu ‘Komisi Koperasi’ yang dipimpin oleh J.H. Boeke (*Adviseur Voor Volks-Credietwezen*) yang diberi tugas meneliti sampai sejauh mana keperluan penduduk bumiputera untuk berkoperasi dan bagaimana cara untuk menumbuhkan semangat berkoperasi agar tertanam di kalangan rakyat.⁶² Dalam buku yang diterbitkan oleh Kantor Statistik Departemen Urusan Ekonomi (*Groei en Bloei van de Koperatieve Beweging in Neerlands-Indie*) dapat diketahui bahwa jumlah perkembangan koperasi yang mempunyai hak berbadan hukum dari tahun 1927-1941, sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Perkembangan Koperasi di Indonesia Tahun 1927-1941⁶³

Tahun	Jumlah Koperasi
1927	1
1928	27
1929	43
1930	89
1931	133
1932	172
1933	233
1934	263
1935	299
1936	324
1937	410
1938	540
1939	574
1940	639
1941	696

⁶¹ Arsip Nasional Republik Indonesia, *Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Barat)* (ANRI: Jakarta, 1976), hlm. LXIII dan 94-95.

⁶² Sagimun M.D., *et al.*, *op cit.*, hlm. 71.

⁶³ Kamaralsyah, *Tentang Pengertian Hal Organisasi Perkumpulan Ko-operasi* (Djakarta: J.B. Wolters-Groningen, 1954), hlm. 95.

Dalam tabel tersebut menggambarkan bahwa pada tahun 1927, jumlah koperasi yang terdaftar hanya satu koperasi. Hal tersebut akibat peraturan koperasi tahun 1915 yang mempersulit dalam pembuatan akte pendirian koperasi. Berbeda halnya setelah dikeluarkannya peraturan koperasi tahun 1927 yang memberikan kemudahan dalam pembuatan akte pendirian koperasi, seperti penggunaan bahasa Indonesia, bahkan bahasa daerah dalam pembuatan akte serta tidak perlu melalui perantara notaris⁶⁴, sehingga jumlah koperasi yang mempunyai hak berbadan hukum bertambah banyak mencapai 27 koperasi. Pada tahun 1927, di Surabaya didirikan “Indonesische Studie Club” oleh Soetomo yang merupakan pendiri Budi Utomo dan melalui organisasi tersebut beliau menganjurkan berdirinya koperasi kepada para anggotanya, sehingga mendorong perkembangan koperasi⁶⁵. Selain itu, untuk menggiatkan perkembangan koperasi, pada akhir tahun 1930 didirikan Jawatan Koperasi yang bertugas mengawasi dan memeriksa pertumbuhan koperasi.⁶⁶ Hal tersebut memberikan dampak positif, sehingga jumlah koperasi bertambah dua kali lipat dari tahun sebelumnya dari 43 koperasi menjadi 89 koperasi.

Perkembangan koperasi di Indonesia yang berkembang pesat di berbagai daerah dapat dirasakan juga pengaruhnya oleh masyarakat Tasikmalaya. Perkembangan perkoperasian di Tasikmalaya mulai berkembang pada tahun 1930-an ketika saat itu para pengusaha, perajin dan petani di Tasikmalaya mengalami kesulitan dalam menyediakan bahan baku dan modal, terutama saat terjadi krisis ekonomi dunia yang menyebabkan lumpuhnya perekonomian di Tasikmalaya. Oleh karena itu, mereka berkumpul dan membicarakan untuk membentuk suatu wadah yang dapat menghimpun mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka sehingga didirikanlah koperasi sebagai wadah yang cocok untuk memenuhi kebutuhan mereka yang berlandaskan kekeluargaan sesuai dengan keadaan masyarakat Tasikmalaya yang mengedepankan kerukunan dan keramahmataman dalam kehidupan.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 224.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 69.

⁶⁶ Masngudi, *op cit.*

Adapun koperasi yang pertama didirikan di Tasikmalaya adalah Koperasi Selamet⁶⁷ yang bergerak di bidang produksi, yakni memproduksi alas kaki⁶⁸. Koperasi Selamet didirikan pada tanggal 29 Maret 1931. Kemudian bermunculanlah koperasi-koperasi lainnya yang terbentuk karena adanya kebutuhan bersama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Tasikmalaya, seperti Koperasi Pamengkeut Banda didirikan pada tahun 1933 yang bergerak dalam usaha simpan pinjam dan Koperasi Mitra Batik didirikan pada tahun 1939 yang bergerak di bidang pembatikan Tasikmalaya.

Pada tahun 1940-an, data mengenai jumlah koperasi di Indonesia hanya sampai tahun 1941 karena tidak ada pencatatan secara teratur sejak tahun 1942 masa pendudukan Jepang hingga 1949 masa perjuangan merebut kemerdekaan.⁶⁹ Akan tetapi, keterangan data dari Jawatan Koperasi dapat diketahui bahwa pada tahun 1942 jumlah koperasi mencapai 728 buah, sedangkan pada tahun 1947 jumlah koperasi mencapai 2.160 buah.⁷⁰

Setelah Indonesia mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, perekonomian di Indonesia mulai mendapatkan babak baru bagi para pengusaha Indonesia yang lebih mandiri dan dapat mengembangkan usahanya tanpa campur tangan pihak kolonial lagi yang sering memberatkan para pengusaha pribumi. Indonesia memiliki dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD'45) yang menjadi stimulus bagi perkembangan perekonomian di Indonesia dengan memandang pada kesejahteraan bersama.

Perkoperasian dicantumkan pada Pasal 33 UUD'45 yang berlaku secara resmi pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada Pasal 33 ayat 1 menyebutkan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan" memberikan stimulus berlangsungnya perkoperasian di negara Indonesia, sehingga peranan koperasi di Indonesia sangatlah diutamakan.⁷¹ Selain itu, Wakil Presiden Mohammad Hatta sangat mendukung koperasi daripada

⁶⁷ Sekarang Koperasi Selamet berada di Jalan KH. Zaenal Mustofa No. 95.

⁶⁸ Dinas KUKM Kota Tasikmalaya, *Direktori Koperasi Kota Tasikmalaya Tahun 2010*, (Tasikmalaya: Dinas KUKM, 2010), hlm. 93.

⁶⁹ Pencatatan mengenai perkembangan koperasi dimulai kembali pada tahun 1950. Kamaralasyah, *Tentang Pengertian Hal Organisasi Perkumpulan Ko-operasi* (Jakarta: J.B. Wolters-Groningen, 1954), hlm. 160. Lihat juga Sagimun M.D., *et al.*, *op cit.*, hlm. 95.

⁷⁰ Mohammad Hatta (1957), *op cit.*, hlm. 109.

⁷¹ Sudasono dan Edilius, *Koperasi dalam teori dan praktek* (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 43.

perusahaan kapitalis, khususnya di daerah pedesaan sebagai dasar dari masyarakat yang adil.⁷² Mohammad Hatta-lah yang sangat berperan dalam kelahiran pasal 33 UUD'45 karena inti dari pemikiran Mohammad Hatta tertuang dalam pasal tersebut, yakni untuk kesejahteraan sosial⁷³, walaupun ide koperasi sebenarnya bukan berasal dari Mohammad Hatta sendiri. Ide koperasi berasal dari negera-negara di Eropa, seperti yang diperlihatkan oleh kaum buruh di Inggris dan kaum tani di Denmark pada abad ke-19. Moh. Hatta berharap melalui koperasi dapat meletakkan usaha bersama agar orang belajar mengenal diri sendiri, percara pada diri sendiri, melaksanakan *selfhelp*⁷⁴, auto-aktivitas serta solidaritas, setia kawan dan tolong-menolong.⁷⁵ Adapun pemikiran Mohammad Hatta yang dirumuskan ke dalam UUD'45 mengenai sistem ekonomi Indonesia adalah demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan⁷⁶ dan koperasi merupakan bangun perusahaan yang sesuai dengan kondisi di Indonesia, sebagai berikut:

“Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasarkan atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu, harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”⁷⁷

⁷² Howard Dick, *et al. The Emergence of A National Economy: An Economic History of Indonesia, 1800–2000* (New South Wales dan Honolulu: Allen & Unwin dan University of Hawai'i Press, 2002, hlm. 172.

⁷³ Wawancara dengan Meutia Hatta, Rabu, 16 Mei 2012.

⁷⁴ *Selfhelp* adalah prinsip tolong diri sendiri.

⁷⁵ P. Swantoro, ‘Genesis Pemikiran dan Cita-cita Bung Hatta’, dalam Rikard Bagun (editor), *Seratus Tahun Bung Hatta* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), hlm. 22.

⁷⁶ Revrison Baswir, (1995), ‘Tiada Ekonomi Kerakyatan Tanpa Kedaulatan Rakyat’, dalam Revrison Baswir, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 1997).

⁷⁷ Sri Edi Swasono, ‘Pembangunan Berwawasan Sejarah: Kedaulatan Rakyat, Demokrasi Ekonomi dan Demokrasi Politik’ dalam *Pemikiran Pembangunan Bung Hatta*; kumpulan tulisan (Jakarta: Pustaka LP3ES Indoneisa, 1995), hlm. 84. Lihat juga J.C.T Simorangkir dan B. Mang Reng Say, *op cit.*, hlm. 94.

Dalam Pasal 33 UUD'45 ditegaskan berlakunya demokrasi ekonomi yang kemudian melahirkan asas kekeluargaan dan kebersamaan sebagai asas koperasi. Koperasi mendahulukan kepentingan bersama dan membelakangkan kepentingan orang seorang. Pembangunan ekonomi Indonesia sesudah perang haruslah didasarkan cita-cita tolong menolong, yaitu berdasarkan koperasi.⁷⁸ Negara bukan berarti penguasa yang memiliki kewenangan penuh dalam penguasaan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, melainkan negara mengurus rakyat dengan mempergunakan kekayaan tersebut untuk kemakmuran rakyat.⁷⁹ Sebagaimana yang disampaikan Mohammad Hatta bahwa dalam Pasal 33 UUD'45 adalah pokok dari pelaksanaan kesejahteraan sosial. Bentuk koperasi adalah bentuk perusahaan yang dianjurkan untuk rakyat dalam memajukan perekonomian rakyat kecil, sedangkan pemerintah bertugas membangun perusahaan besar yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mengawasi perusahaan-perusahaan swasta untuk melindungi warga dan alam negara sendiri.⁸⁰

Begitu juga di Tasikmalaya, koperasi-koperasi yang berada di Tasikmalaya mendapatkan udara segar atas tercapainya kemerdekaan Indonesia dan adanya dukungan dari pemerintah Indonesia, baik dalam hal kebijakan maupun bantuan dalam mengembangkan perkoperasian di Tasikmalaya. Sebagai upaya untuk melaksanakan Pasal 33 UUD'45, maka pada tahun 1946 dimulai kembali pendaftaran koperasi-koperasi yang masih ada atau baru didirikan. Kebijaksanaan pemerintah inilah yang memberikan kesempatan dan sambutan hangat dari masyarakat dalam mendukung kembali koperasi.⁸¹

Semakin pesatnya pertumbuhan koperasi ternyata membuat banyak pemimpin koperasi menggunakan kesempatan tersebut dengan menjadikan koperasi sebagai alat perjuangan golongan, sehingga telah melanggar prinsip koperasi. Melihat gejala yang kurang sehat tersebut, maka para pemimpin koperasi pada waktu itu berusaha meluruskan asas dan sendiri dasar koperasi

⁷⁸ Pidato Mohammad Hatta pada pembukaan Konferensi Ekonomi di Yogyakarta, 3 Februari 1946 dalam Mohammad Hatta (1971), *op cit.*, hlm. 180.

⁷⁹ Negara dalam pandangan Mohammad Hatta bukan penguasa melainkan yang mengurus rakyat. Wawancara dengan Meutia Hatta, Rabu, 16 Mei 2012.

⁸⁰ Mohammad Hatta, *Pikiran-Pikiran dalam Bidang Ekonomi* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1972), hlm. 6-7.

⁸¹ Kamaralsyah, *et al.*, *Panca Windu Gerakan Koperasi Indonesia (12 Juli 1947-1987)* (Jakarta: Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN), 1987), hlm. 5.

sebagai organisasi ekonomi yang berasaskan demokrasi. Para pemimpin koperasi pun segera menyelenggarakan konferensi di Ciparay, Bandung yang salah satu isinya menyelenggarakan Kongres Koperasi seluruh Indonesia secepat-cepatnya⁸² dan daerah Tasikmalaya dipilih sebagai tempat Kongres Koperasi Indonesia pertama yang diselenggarakan pada tanggal 11-14 Juli 1947 berdasarkan pada keputusan Konferensi di Ciparay, Bandung. Oleh karena itu, Tasikmalaya sebagai tempat Kongres Koperasi Indonesia pertama pada tahun 1947 telah membuat daerah Tasikmalaya lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia dan memberikan angin segar bagi perkembangan koperasi di Tasikmalaya untuk bangkit dan mendukung kembali perekonomian masyarakat Tasikmalaya di tengah-tengah suasana revolusi dan ancaman agresi militer dari Belanda.

3.2 Berdirinya Koperasi-Koperasi di Tasikmalaya pada Tahun 1930-an

Perkembangan koperasi di Indonesia dan khususnya di Tasikmalaya, sejak sebelum mendapatkan kemerdekaan telah dipengaruhi oleh dua kekuatan yang tidak dapat dihilangkan. *Pertama*, awal perkembangan koperasi di Tasikmalaya tidak dapat lepas dari peranan atau campur tangan dari pemerintah, seperti Bupati Raden Aria Adipati Wiratanuningrat yang berjasa dalam pembangunan Tasikmalaya, kemudian Gubernur Jawa Barat Sewaka, Rusli Rahim dari Jawatan Koperasi Pusat dan Patih Tasikmalaya Kartaatmadja yang ikut mendukung perkembangan koperasi di Tasikmalaya. *Kedua*, kekuatan yang berpengaruh dalam mendorong berdirinya koperasi di Tasikmalaya adalah golongan kelas menengah pribumi.

Para pencetus pendirian koperasi yang berasal dari golongan kelas menengah di Tasikmalaya, antara lain berasal dari para pengusaha, guru, dan tokoh pergerakan di Tasikmalaya. Hal tersebut dapat dilihat dalam pendirian Koperasi Mitra Batik yang terdiri dari golongan kelas menengah dengan berbagai latar belakang yang berbeda, seperti Enie sebagai pengusaha batik, Naseh sebagai orang pergerakan dan Sumiratmadja sebagai guru atau kepala sekolah di Tasikmalaya. Golongan kelas menengah inilah yang banyak berperan dalam

⁸² *Ibid.*, hlm. 6.

menggerakkan koperasi di Tasikmalaya, sehingga memberikan harapan bagi masyarakat Tasikmalaya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Beberapa koperasi yang diketahui telah ada sejak tahun 1930-an, antara lain Koperasi Selamat (1931), Koperasi Simpenan Pamengkeut Banda (1933), Koperasi Warga Setia (1934)⁸³, Koperasi Mitra Payung⁸⁴, Koperasi Pangrojong⁸⁵, Koperasi Paguyuban Pasundan Indonesia, Koperasi Paguyuban Guru Bantu, Koperasi Rukun Usaha Pamili, dan Koperasi Mitra Batik (1939).⁸⁶

Tabel 2. Nama dan Jenis Koperasi di Tasikmalaya Tahun 1930-an⁸⁷

Nama Koperasi	Jenis Koperasi
Mitra Payung	Koperasi Produksi
Mitra Batik	Koperasi Produksi
Rukun Usaha Pamili	Koperasi Produksi
Paguyuban Pasundan Indonesia	Koperasi Kredit
Paguyuban Guru Bantu	Koperasi Kredit
Pangrojong	Koperasi Produksi
Selamet	Koperasi Produksi
Simpenan Pamengket Banda	Koperasi Kredit
Warga Setia	Koperasi Kredit

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jenis koperasi yang berkembang di Tasikmalaya ada dua jenis, yakni koperasi kredit (simpan pinjam) dan koperasi produksi. Kedua jenis koperasi tersebut berkembang di Tasikmalaya karena pada tahun 1930-an terjadi krisis ekonomi di Tasikmalaya, terutama akibat pengaruh dari Depresi Ekonomi dunia, seperti harga-harga barang kebutuhan naik,

⁸³ Dinas Koperasi Kota Tasikmalaya, 'Rangking Koperasi berdasarkan Usia Per Desember 2008'.

⁸⁴ Koperasi Mitra Payung diketuai oleh H. Mawardi dan Adjidji selaku pengurus. Tim Penerbitan Buku Dokumenter, *op cit.*, hlm. 15.

⁸⁵ Koperasi Pangrojong merupakan koperasi keperluan batik. Setelah Koperasi Mitra Batik berdiri pada tahun 1939, maka Koperasi Pangrojong dilebur ke dalam Koperasi Mitra Batik.

⁸⁶ Koperasi Selamat, Simpenan Pamengkeut Banda, Paguyuban Pasundan Indonesia, Paguyuban Guru Bantu, dan Rukun Usaha Pamili adalah lima koperasi yang memprakarsai dibentuknya Pusat Koperasi Kabupaten Tasikmalaya (PKKT) pada tahun 1934. Wawancara dengan Nana Rukmana, Selasa, 24 Januari 2012. Lihat juga dokumen pengurus PKKT, *Sejarah Berdirinya Pusat Koperasi Kabupaten Tasikmalaya (PKKT)* (Tasikmalaya: PKKT, 2002), hlm. 1.

⁸⁷ Wawancara dengan Nana Rukmana, Selasa, 24 Januari 2012.

sedangkan pendapatan masyarakat Tasikmalaya tidak ada peningkatan⁸⁸, sehingga dibutuhkan pinjaman modal usaha. Kehadiran koperasi kredit atau simpan pinjam dapat memudahkan masyarakat Tasikmalaya dalam mendapatkan dan mengembalikan pinjaman. Berbeda dengan pinjaman dari para rentenir yang membuat masyarakat Tasikmalaya semakin terjerat utang akibat bunga pinjaman yang besar. Sementara koperasi produksi berkembang akibat keterbatasan bahan baku, sehingga diperlukan wadah untuk menyatukan para pengusaha dan pengrajin dalam mengurus masalah persediaan bahan baku. Selain itu, koperasi produksi diharapkan dapat mencegah terjadinya permainan harga bahan baku oleh para pedagang non-pribumi.

Di antara sekian banyaknya koperasi yang berdiri di Tasikmalaya, dibawah ini akan dijelaskan sejarah pendirian tiga koperasi yang berpengaruh pada tahun 1930-1940-an sebagai percontohan dari perkembangan koperasi di Tasikmalaya, yakni Koperasi Selamat, Koperasi Simpenan Pamengkeut Banda dan Koperasi Mitra Batik.

3.2.1 Koperasi Selamat

Sekitar tahun 1929-1930, para buruh dan karyawan di suatu perusahaan sepatu milik orang Cina telah mengambil suatu inisiatif untuk mendirikan suatu perkumpulan simpan pinjam dengan tujuan dapat membantu meringankan beban para buruh dan karyawan sepatu yang terjerat oleh pinjaman kredit yang diadakan oleh para rentenir Cina. Perkumpulan simpan pinjam tersebut dipelopori oleh Omo Suharma sebagai ketua dan bendahara I, Kurdi selaku sekretaris dan bendahara II, Ejon dan Dina sebagai pembantu.⁸⁹ Setelah perkumpulan simpan pinjam ini dibentuk ternyata mendapatkan sambutan positif dan dukungan dari para buruh sepatu di Tasikmalaya, maka pada awal tahun 1931 didirikanlah suatu perusahaan sepatu Tasikmalaya secara kecil-kecilan yang mengerjakan para buruh sepatu Tasikmalaya. Perusahaan tersebut dapat berkembang dan bersaing dengan perusahaan sepatu milik orang Cina.

⁸⁸ Nina Herlina Lubis (1956) , *op cit.*, hlm. 105.

⁸⁹ Wawancara dengan Nana Rukmana, Selasa, 27 Maret 2012.

Setelah cukup berkembang, maka perusahaan tersebut dibentuk menjadi suatu wadah koperasi yang diberi nama dengan Koperasi Selamat⁹⁰ yang bergerak di bidang produksi, yakni memproduksi alas kaki sepatu. Koperasi Selamat didirikan pada tanggal 29 Maret 1931.⁹¹ Awal mula pemberian nama ‘Selamet’ bermula ketika pada tahun 1931 terdapat 30 anggota dari perusahaan sepatu Tasikmalaya juga bekerja di Toko “Peng Sin” milik orang Cina. Akan tetapi, mereka terjerat oleh orang Cina sendiri karena upah yang mereka dapatkan tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka, sehingga mereka menerima pinjaman dari orang Cina guna menutupi kekurangan biaya hidup mereka. Untuk memperbaiki kehidupan para mereka, timbulah keinginan dari para buruh untuk membuat suatu perkumpulan karena terjerat rentenir-rentenir orang Cina. Jika ingin mewujudkan perkumpulan yang mereka inginkan, maka mereka dikenakan iuran sebesar f25 (gulden) perbulan untuk membiayai perkumpulan tersebut. Setelah dana tersebut terkumpul hingga mencapai f600, maka mereka membangun perkumpulan yang diberi nama ‘Selamet’. Nama tersebut memiliki harapan bahwa para buruh atau karyawan sepatu Tasikmalaya dapat selamat dalam bekerja dan menjalani kehidupannya, serta dapat terbebas dari jeratan para rentenir.⁹²

Setelah terbentuknya Koperasi Selamat, maka dibangunlah kantornya yang didirikan di Jalan Paseh Tasikmalaya. Adapun rapat pertama dari koperasi tersebut adalah untuk membentuk pengurus Koperasi Selamat⁹³ dengan susunan pengurus sebagai berikut:

1. Ketua : Omo Suharma
2. Sekretaris : Kurdi
3. Bendahara : Engkon

⁹⁰ Sekarang Koperasi Selamat berada di Jalan KH. Zaenal Mustofa No. 95, Kota Tasikmalaya.

⁹¹ Dinas KUKM Kota Tasikmalaya, *op cit.*, hlm. 93.

⁹² Wawancara dengan Nana Rukmana, Selasa, 27 Maret 2012.

⁹³ Wawancara dengan Nana Rukmana, Selasa, 27 Maret 2012.

Setelah kepengurusan dibentuk, Koperasi Selamat mengalami kemajuan, sehingga jumlah anggota koperasinya bertambah dari 30 orang yang merupakan anggota awal Koperasi Selamat menjadi 55 orang setelah ditambah jumlah karyawan baru sebanyak 25 orang. Seiring dengan kemajuan yang dicapai oleh Koperasi Selamat sebagai satu-satunya koperasi produksi⁹⁴ alas kaki sepatu di Tasikmalaya, sehingga pada tahun 1940 dikeluarkanlah perizinan dari pemerintah Hindia Belanda terhadap Koperasi Selamat menjadi berbadan hukum koperasi.⁹⁵

Berdirinya Koperasi Selamat telah memberikan dampak positif bagi keberlangsungan para pengrajin sepatu di Tasikmalaya yang menjadi anggota koperasi tersebut dalam mendapatkan pinjaman modal maupun bahan baku, serta ikut memajukan perekonomian di Tasikmalaya. Hal ini diakui oleh pihak pengurus Koperasi SPB, yakni Bapak Komar bahwa Koperasi Selamat merupakan koperasi yang sudah lama berdiri dan mandiri atas kinerja orang-orang Tasikmalaya sendiri sebagai anggotanya.⁹⁶

3.2.2 Koperasi Simpanan Pameungkeut Banda (SPB)

Sejak tahun 1930, kondisi ekonomi dunia mengalami krisis akibat dari Depresi Ekonomi. Hal tersebut membawa dampak pada perekonomian di Indonesia, salah satunya daerah Tasikmalaya. Banyak warga Tasikmalaya yang memerlukan dana untuk menjalankan usaha mereka saat kondisi ekonomi masyarakat Tasikmalaya tidak kondusif. Untuk membantu warga Tasikmalaya, maka diadakanlah upaya untuk mendirikan sebuah perkumpulan koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam. Upaya tersebut dilakukan oleh Kosim Danumihardja⁹⁷ dan Ahmad Atmadja dengan memelopori didirikannya sebuah perkumpulan koperasi yang diberi nama 'Simpanan Pameungkeut Banda' (SPB) dengan harapan dapat membantu masyarakat Tasikmalaya, terutama membantu masyarakat Tasikmalaya yang kekurangan modal usaha, sehingga mereka tidak terjerat oleh para rentenir yang merugikan usaha mereka akibat bunga pinjaman

⁹⁴ Koperasi Produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang, baik dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi. Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *op cit.*, hlm. 24.

⁹⁵ Wawancara dengan Nana Rukmana, Selasa, 27 Maret 2012.

⁹⁶ Wawancara dengan Komar Raksadiwangsa, Rabu, 11 April 2012.

⁹⁷ Lihat Lampiran 10 dalam skripsi ini untuk mengetahui foto Kosim Danumihardja sebagai tokoh pendiri Koperasi Simpanan Pamengkeut Banda (SPB).

yang tinggi. Oleh karena itu, didirikanlah Koperasi Simpanan Pamengkeut Banda (SPB) pada bulan Oktober 1933 di Tasikmalaya⁹⁸. Koperasi ini merupakan salah satu koperasi tertua yang masih ada berdiri di Tasikmalaya.

Adapun Koperasi SPB bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam, sehingga membantu masyarakat Tasikmalaya untuk mendapatkan pinjaman modal usaha.⁹⁹ Adapun susunan kepengurusan Koperasi SPB pertama¹⁰⁰ adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Ahmad Atmadja
2. Sekretaris : Raden Kosim Danumihardja
3. Bendahara : Raden Sulaeman
4. Komisaris I : Raden Ajat Sudrajat
5. Komisaris II : Sujanadibrata

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pendirian Koperasi SPB tidak terlepas dari masyarakat kelas menengah yang memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Mereka membentuk Koperasi SPB agar memberikan kemudahan bagi masyarakat Tasikmalaya dalam memberikan pinjaman modal usaha. Adapun yang menjadi sasaran dalam pemberian pinjaman modal usaha, yakni masyarakat Tasikmalaya yang berpenghasilan kecil karena mereka sering menjadi sasaran para rentenir yang membuat mereka semakin merugi dan terjerat oleh utang akibat bunga yang semakin tinggi apabila tidak dapat dibayar jatuh tempo. Oleh karena itu, kehadiran Koperasi SPB di Tasikmalaya memberikan harapan bagi masyarakat Tasikmalaya dalam menjalankan usahanya dan mendapatkan pinjaman modal usaha tanpa harus ketakutan lagi terjerat utang dari para rentenir.

Adapun tujuan Koperasi SPB tertulis dalam Anggaran Dasar-nya tahun 1934. *Pertama*, menggiatkan hasrat atau keinginan anggota untuk menyimpan pada perserikatan. *Kedua*, akan menolong anggota memberi pinjaman dengan jalan yang mudah dan berarti pendidikan untuk mencapai maksudnya yang

⁹⁸ Pengurus Koperasi Simpanan Pamengkeut Banda (SPB). *Peringatan 50 TH. Koperasi Simpanan Pamengkeut Banda* (Tasikmalaya: SPB, 1983), hlm. 1.

⁹⁹ Wawancara dengan Komar Raksadiwangsa, Rabu, 11 April 2012.

¹⁰⁰ Pengurus Koperasi (SPB), *op cit.*, hlm. 3-4.

mendatangkan faedah.¹⁰¹ Pada akhir tahun 1935 dapat diketahui bahwa jumlah anggota Koperasi SPB ketika itu berjumlah 19 orang dengan jumlah simpanan sebesar f1.035.30. Dari jumlah simpanan tersebut, uang simpanan paling besar adalah f190, sedangkan uang simpanan paling kecil adalah f3. Diketahui juga keterangan mengenai kekayaan dan keuntungan yang diperoleh Koperasi SPB dari salinan neraca tahun 1935 yang menerangkan bahwa Koperasi SPB memiliki kekayaan sebesar f1.179.23 dan keuntungan sebesar f179.055.¹⁰²

Pada tahun 1930-1940-an, Koperasi SPB belum memiliki kantor tetap dan masih berkantor di rumah para pengurus Koperasi SPB disebabkan kondisi masih dalam keadaan perang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, sehingga kantor berpindah-pindah dari rumah ke rumah pengurus Koperasi SPB. Sementara itu, kantor Koperasi Simpanan Pamengkeut Banda juga berpindah-pindah dari rumah ke rumah para pengurusnya dan pada masa awal pendudukan Jepang berkantor di rumah ketua Koperasi SPB, yakni rumah Surjo Argawisastra di Jalan Listrik, Tasikmalaya. Hal itu dikarenakan situasi di Tasikmalaya yang tidak kondusif akibat keadaan perang.¹⁰³ Sementara itu, memasuki masa pendudukan Jepang, Koperasi SPB harus menghadapi kondisi yang kurang kondusif karena ekonomi rakyat digunakan untuk ekonomi perang oleh pemerintah Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, tepatnya pada akhir tahun 1942 terjadi pergantian kepengurusan Koperasi SPB. Ketua Koperasi SPB pertama, yakni Ahmad Atmadja digantikan oleh Surjo Argawisastra. Adapun susunan kepengurusan pada tahun 1942 sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

- | | |
|---------------|---|
| 1. Ketua | : Surjo Argawisastra |
| 2. Sekretaris | : Djumarma |
| 3. Bendahara | : Djawawikarta |
| 4. Pembantu | : Sumari, Sakri, Mawardi, Daspan, Masduki,
dan Karna Purwita |

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 2.

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 4.

¹⁰³ Koperasi SPB baru memiliki kantor tetap di Jalan Kalektoran, Tasikmalaya yang pembangunannya selesai pada tahun 1955. Sekarang kantor Koperasi SPB berada di Jalan R. Ikkik Wiradikarta No. 45, Kota Tasikmalaya. Pengurus Koperasi SPB, *op cit.*, hlm. 6-7. Lihat juga pada Lampiran 15 dalam skripsi ini untuk mengetahui foto bangunan Kantor SPB.

Pada masa pendudukan Jepang, kegiatan ekonomi Tasikmalaya diarahkan untuk ekonomi perang, sehingga semua koperasi desa di Tasikmalaya diharuskan menjadi Rukun Tani, yakni alat distribusi untuk mencapai cita-cita Jepang dalam memenangkan peperangan Asia Timur Raya. Pada saat itu, Koperasi SPB masuk ke dalam koperasi golongan yang khusus mengurus kredit saja. Pada masa pendudukan Jepang, banyak koperasi yang berhenti karena tidak mampu meneruskan kegiatannya. Walaupun demikian, anggota Koperasi SPB masih tetap bertahan dengan anggota sebanyak 230 orang dan besaran uang simpanan f14.708.85 dan sisa uang yang dipinjamkan f18.507.38.

Memasuki tahun 1944, terjadi pergantian kepengurusan lagi dengan diketuai oleh Sakri karena Surjo Argawisastra ikut memilih menjadi bagian tentara Pembela Tanah Air (PETA). Masa kepengurusan Sakri menghadapi banyak perubahan, terutama dalam kepengurusan. Selain Surjo Argawisastra, banyak di antara pengurus tidak bertahan lama karena situasi perang dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan, salah satu pengurus yang masih bertahan adalah Djumarma.¹⁰⁴ Pada akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu pada 1945 dan Indonesia mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah Indonesia merdeka, Koperasi SPB kembali mengalami hambatan dalam menjalankan kegiatannya karena Belanda melancarkan Agresi Militer ke berbagai wilayah Indonesia, termasuk Tasikmalaya. Walaupun demikian, Koperasi SPB masih dapat bertahan menjadi Koperasi Simpan Pinjam tertua di Tasikmalaya dan ikut memperjuangkan ekonomi rakyat.

3.2.3 Koperasi Mitra Batik

Tasikmalaya merupakan kota yang penduduknya banyak berusaha dalam membuat kerajinan, salah satunya adalah batik.¹⁰⁵ Batik menjadi ciri khas pakaian Tasikmalaya dengan motif natural sesuai dengan kondisi alam di Tasikmalaya. Adapun sebutan bagi batik Tasikmalaya dikenal dengan sebutan 'Batik Tasikan'. Pada awal abad ke-20, batik menjadi suatu barang yang begitu berharga, terutama bagi orang-orang di Tanah Jawa. Kehalusan batik dan motifnya seolah-olah memberikan gambaran akan kehalusan tabiat orang Jawa yang membuat batiknya.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 5

¹⁰⁵ Basrah Enic, *op cit.*, hlm. 14.

Selain batik menjadi pakaian sehari-hari, usaha batik ternyata menjadi perdagangan bumiputra yang dapat memajukan taraf hidup bumiputra, sehingga dapat memberikan kehidupan yang lebih baik bagi banyak orang.¹⁰⁶

Kemudian, dalam perkembangan perbatikan di berbagai daerah di Indonesia, seperti Solo, Yogyakarta dan Lasem Pekalongan mulai dirasakan kesukaran dalam menjalankan usaha batik pada tahun 1920-an. Banyak perusahaan batik pribumi yang berpindah tangan dari pribumi ke tangan bangsa asing, seperti bangsa Cina dan Arab, sehingga kaum pribumi banyak yang menjadi buruhnya saja. Hal itu disebabkan oleh kekurangan modal, dikuasainya bahan-bahan keperluan batik oleh para pedagang asing, serta kurangnya pengetahuan akan batik menyebabkan banyak para pengusaha batik yang berlomba-lomba membuat batik dengan cepat, tetapi tidak melihat kehalusan dan keindahan dalam pembuatan batik¹⁰⁷, sehingga mengurangi nilai keindahan batik, baik secara kualitas maupun harganya.

Sementara itu, memasuki tahun 1930, usaha perbatikan di Tasikmalaya juga mengalami kesukaran akibat bahan-bahan batik yang cukup mahal. Selain itu, beranekaragam batik dari luar daerah yang lebih murah, seperti “batik karet” dari Batavia maupun pakaian bercorak menyerupai batik yang berasal dari luar negeri harganya juga lebih murah karena dibuat dengan batuan mesin, sehingga menjadi hambatan bagi perkembangan usaha batik Tasikan. Banyak para pengusaha batik Tasikan yang terpaksa menutup usahanya karena kondisi yang kurang kondusif tersebut, seperti yang terjadi pada para pengusaha batikan Tjipedes (Cipedes). Ada sekitar 270 pengusaha perajin batik yang berhenti bekerja dan 600 buruh batik yang menjadi pengangguran akibat kesukaran yang dialami mereka dalam menjalankan usahanya.¹⁰⁸ Walaupun demikian, para pengusaha batik Tasikan yang masih bertahan tetap melanjutkan usahanya dan berusaha mencari jalan keluar atas kesukaran usaha mereka. Oleh karena itu, para perajin batik Tasikmalaya mulai mencari cara agar penyediaan bahan-bahan batik dapat diperoleh dengan mudah dan terjangkau, sehingga proses pembuatannya dapat berjalan dengan lancar.

¹⁰⁶ *Pelita Dagang*, No.3, 25 Maret 1924, hlm. 58-59

¹⁰⁷ *Pelita Dagang*, No. 10, 25 Agustus 1924, hlm. 2-3.

¹⁰⁸ *Priangan Tengah*, 12 Desember 1931.

Pada awalnya para perajin Tasikmalaya membeli bahan-bahan pembuatan batik berupa *white cambrics* (kain mori) dan cat-cat batik dari toko penyalur yang dikuasai oleh para pedagang non-pribumi. Akibat kepolosan dari para perajin batik yang kurang mengetahui harga bahan-bahan pembuatan batik, maka kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh para pedagang tersebut guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan nasib para perajin batik dalam menjalankan usahanya, sedangkan para perajin batik harus mengeluarkan uang yang tidak cukup kecil agar mendapatkan bahan-bahan batik, sehingga mereka banyak keberatan dalam mengeluarkan biaya.¹⁰⁹

Sebagai jawaban dari permasalahan yang terjadi, maka para perajin mulai membicarakan dan berusaha untuk mendirikan suatu wadah bagi para perajin batik. Usaha tersebut tidak terlepas dari tokoh “tiga serangkai”, yakni Enie, Naseh dan Dion.¹¹⁰ Mereka berkumpul bersama membicarakan berbagai macam masalah dan usaha para perajin guna memajukan para perajin batik di Tasikmalaya. Mereka menginginkan agar para perajin batik tidak dijadikan lagi objek permainan para pedagang non-pribumi penyalur *white cambrics*. Mereka pun merencanakan mendirikan sebuah wadah yang cocok untuk perkumpulan para pengusaha batik di Tasikmalaya, yakni dalam bentuk koperasi.¹¹¹ Maka mereka bertiga mulai mencari orang yang mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi para perajin batik.

Sumiratmadja adalah orang yang dicari karena beliau orang yang aktif dalam menggerakkan koperasi di Tasikmalaya dan beliau mempunyai hubungan dengan para pejabat pada Pemerintahan Belanda. Bermula dari pembicaraan berdua antara Sumiratmadja dan Enie yang membicarakan pokok permasalahan yang serius mengenai bagaimana menanggulangi kesulitan-kesulitan yang dihadapi para pengusaha batik dalam menghadapi permainan para pedagang Cina. Pembicaraan tersebut diadakan di rumah Sumiratmadja di Jalan Kemas, Tasikmalaya pada pertengahan tahun 1938.¹¹² Mereka berdua akhirnya sepakat untuk mengajak para pengusaha batik lainnya bergabung dan merencanakan

¹⁰⁹ A. Basrah Enie, *op cit.*, hlm. 14.

¹¹⁰ Wawancara dengan A. Basrah Enie, 24 Maret 2011.

¹¹¹ A. Basrah Enie, *op cit.*, hlm. 14-15.

¹¹² Tim Penerbitan Buku Dokumenter, *op cit.*, hlm. 11.

pendirian koperasi untuk para perajin batik di Tasikmalaya. Sumiratmaja pun menghubungi RSA Kosasih (Kepala Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri Wilayah Priangan Timur) untuk menyetujui pendirian koperasi bagi para perajin batik.¹¹³

Adapun maksud dari didirikannya koperasi batik pada umumnya. *Pertama*, mempersatukan para pengusaha batik dan mempererat persaudaraannya. *Kedua*, mengusahakan pembelian bersama dan bahan-bahan batik yang dibutuhkan. *Ketiga*, mendirikan pabrik bahan-bahan batik yang dibutuhkan, seperti pabrik kain mori. *Keempat*, memperbaiki kualitas batik. *Kelima*, mengusahakan penjualan bersama dari hasil perusahaannya.¹¹⁴

Sebagai persyaratan pendirian koperasi, maka harus ada sembilan orang sebagai pendiri koperasi. Dikumpulkanlah sembilan orang yang terpilih untuk mendirikan koperasi. Mereka yang terpilih adalah Enie, Dion, Naseh, Badri, Endong, Kartadibrata, Kartasmita, Sayuti, dan Sumiratmadja.¹¹⁵ Lima diantaranya adalah pembatik Tasikmalaya (Enie, Dion, Badri, Endong dan Sayuti), sedangkan Naseh adalah orang pergerakan, Kartasmita dari koperasi, dan Sumiratmadja adalah seorang guru dan kepala sekolah di Tasikmalaya. Setelah terkumpulnya mereka yang berjumlah sembilan orang, maka terpenuhilah persyaratan dalam pendirian suatu koperasi dan pada tanggal 17 Januari 1939 dibentuklah Koperasi Keperluan Perusahaan-Perusahaan Batik yang diberi nama Koperasi Mitra Batik¹¹⁶ yang bergerak dalam bidang pembatikan guna memudahkan para perajin batik dalam memperoleh kain mori dan bahan-bahan batik lainnya.

Munculnya koperasi batik tidak hanya terjadi di Tasikmalaya, melainkan juga di berbagai daerah di Indonesia, seperti Yogyakarta, Solo dan Pekalongan yang terkenal dengan perusahaan atau kerajinan batiknya. Untuk kelancaran usaha para pembatik, maka koperasi-koperasi batik didirikan sejak tahun 1930 guna menguasai bahan-bahan batik yang penting, seperti kain putih mori (*white cambrics*), cat-cat batik, damar dan lainnya¹¹⁷, sehingga tidak dipermainkan lagi

¹¹³ A.Basrah Enie, *op cit.*, hlm. 16.

¹¹⁴ Sagimun M.D., *et al.*, *op cit.*, hlm. 185.

¹¹⁵ Lihat Lampiran 7 dalam skripsi ini.

¹¹⁶ A.Basrah Enie, *op cit.*, hlm. 16-17.

¹¹⁷ Sagimun M.D., *et al.*, *op cit.*, hlm. 186.

oleh para pedagang bahan batik yang mengambil keuntungan sendiri dengan memperlmainkan harga bahan-bahan batik yang lebih mahal dari harga pasar. Oleh karena itu, kehadiran koperasi batik di tengah permasalahan yang dihadapi oleh para pengrajin batik telah memberikan harapan baru yang lebih baik dalam penyediaan bahan-bahan batik.

Sebelum Koperasi Mitra Batik berdiri, sebenarnya sudah ada koperasi lain yang ikut membantu para pembatik, yaitu Koperasi Pangrojong yang sudah ada sejak tahun 1930-an. Hanya saja kegiatannya terbatas pada pengadaan bahan penolong pembuatan batik saja, seperti bahan bakar minyak tanah, arang, *aci* (sagu) aren, merang padi dan *malam*.¹¹⁸ Koperasi Pangrojong diketuai oleh Raden Kartadibrata dan Wahyu Kartasmita sebagai penulis¹¹⁹. Namun, Koperasi Pangrojong ini tidak lama berdiri karena sejak kehadiran Koperasi Mitra Batik yang usahanya lebih besar dan berkembang dengan pesat telah memberikan harapan baru bagi para pembatik di Tasikmalaya. Oleh karena itu, banyak anggota Koperasi Pangrojong yang ikut ke Koperasi Mitra Batik, sehingga pada akhirnya Koperasi Pangrojong dilebur ke dalam Koperasi Mitra Batik¹²⁰ satu wadah koperasi yang menghimpun para pengrajin atau pengusaha batik.

Adapun susunan pengurus Koperasi Mitra Batik saat pertama kali didirikan pada tahun 1939¹²¹, yaitu sebagai berikut:

1. Ketua : Enie
2. Sekretaris : Nasch
3. Bendahara : Dion
4. Penasihat : Sumiratmadja
5. Komisaris : Badri, Endong dan Sayuti

¹¹⁸ *Aci* adalah pati sagu, sedangkan *malam* adalah lilin yang digunakan untuk membatik. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (edisi keempat), Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hlm. 8 dan 906.

¹¹⁹ Jabatan “penulis” sebutan lain dari jabatan “sekretaris”.

¹²⁰ A. Basrah Enie, *op cit.*, hlm. 18.

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 18 dan hasil wawancara dengan Hilman pada tanggal 20 Maret 2011.

Para pengurus Koperasi Mitra Batik tersebut memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda, antara lain Enie, Dion, Badri, Endong dan Sayuti adalah pengusaha batik, Naseh adalah pengusaha tegel dan orang pergerakan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, sedangkan Sumiratmadja adalah seorang cendikiawan (guru sekolah).¹²² Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya rasa kebersamaan di antara masyarakat Tasikmalaya dalam mendirikan koperasi tanpa membeda-bedakan latar belakang guna mensejahterakan masyarakat Tasikmalaya yang menjadi anggota Koperasi Mitra Batik.

Pada awal kepengurusan Koperasi Mitra Batik, jumlah anggotanya mencapai 34 orang dengan mendapatkan bantuan bimbingan dari Pusat Koperasi Kabupaten Tasikmalaya (PKKT) yang dipimpin oleh Kartawisastra. Kegiatan-kegiatannya masih dipegang oleh beberapa orang saja, seperti Enie yang dibantu keluarga Surya dan Nunu Karmana yang membantu administrasi Koperasi Mitra Batik. Koperasi Mitra Batik mulai berusaha membantu para anggotanya yang terus bertambah, terutama dalam penyediaan bahan baku pembuatan batik, seperti kain mori dan cat-cat batik. Akan tetapi, kegiatannya mendapat tantangan dari para pedagang non-pribumi yang masih menguasai perdagangan bahan batik, sehingga dapat mempermainkan harga sesuai kehendak mereka. Permasalahan tersebut membuat para pengusaha batik mendesak Koperasi Mitra Batik supaya dapat membeli *white cambrics* langsung dari importir. Oleh karena itu, utusan Jawatan Koperasi, yakni R.S. Kosasih pada pertengahan 1940 berusaha memperjuangkan kehendak dari para anggota Koperasi Mitra Batik tersebut.¹²³

Sebagai tindak lanjut dari desakan para anggota, maka diadakanlah Rapat anggota Koperasi Mitra Batik di rumah Ketua Koperasi Mitra Batik, yakni di Rumah Enie. Rapat tersebut dihadiri oleh R.S. Kosasih dan 19 anggota Koperasi Mitra Batik dan menghasilkan keputusan bahwa semua anggota dan pengurus menyetujui pembelian secara langsung dari importir untuk mengatasi permasalahan dalam pembelian bahan-bahan batik. Modal pertama pun disepakati sebesar f9.000 untuk membeli *white cambrics* kepada importir. Pengumpulan uang tersebut dikumpulkan dan disimpan di *Moeder Centrale* atau dikenal dengan

¹²² A. Basrah Enie, *op cit.*, hlm. 16-17.

¹²³ *Ibid.*, hlm. 17-22.

sebutan Gabungan Pusat-pusat Koperasi Seluruh Indonesia (GAPKI)¹²⁴ dan akan segera disiapkan jika *white cambrics* sudah siap dikirim importir.

Sehari setelah rapat, Enie, Dion, dan RSA Kosasih berangkat ke Jakarta untuk menemui pihak dari *Departement van Economische Zaken* (Departemen Ekonomi). Mereka bertemu dengan R. M. Margono Djojohadikusumo, R. Suriatmadja, Ir. Teko Soemodiwirdjo dan Ir. Surachman untuk mengemukakan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para pengusaha batik Tasikmalaya, terutama permainan harga bahan-bahan batik oleh para pedagang *white cambrics* non-pribumi. Berkat usaha mereka, maka pada awal tahun 1941 tercapailah keinginan para pengusaha batik Tasikmalaya, sehingga pembelian kain mori langsung dari importir, salah satunya adalah *NV. Internationale Credit en Handelsvereniging Rotterdam* di Cirebon.¹²⁵

Adapun reaksi dari para pedagang *white cambrics* non-pribumi ketika para pengusaha batik Tasikmalaya telah mengalihkan pembelian *white cambrics* kepada Koperasi Mitra Batik melalui importir langsung adalah tidak mau menerima dan menjual hasil produksi para pembatik Tasikmalaya. Oleh karena itu, para pembatik dengan terpaksa harus menjual hasil produksinya sendiri dengan mencari pasar ke luar daerah dan ternyata mereka mendapat keuntungan dengan pesanan yang cukup banyak dan harga yang lebih tinggi, sehingga hal itu mendorong usaha anggota-anggota Koperasi Mitra Batik semakin berkembang.

Koperasi Mitra Batik baru mendapatkan hak Badan Hukum (*rechtspersoon*) No.767 tanggal 28 Agustus 1941 karena pada waktu pertama kali didirikan oleh Panitia Sembilan tahun 1939, Koperasi Mitra Batik belum didaftarkan kepada pemerintah. Sebelumnya telah dibuat Akte Pendirian¹²⁶ dan Anggaran Dasarnya yang ditandatangani pada tanggal 20 Februari 1941 oleh Enie sebagai *voorzitter* dan Dion sebagai *peningmeester*¹²⁷. Adapun jumlah anggota Koperasi Mitra Batik selama sepuluh tahun setelah berdirinya Koperasi Mitra Batik, yaitu sebagai berikut:

¹²⁴ Pada tahun 1940, harga beras adalah Rp. 0,12. Jika dihitung pada tahun 1995, maka modal pada waktu itu mencapai sekitar Rp. 60.000.000.-. *Ibid.*, hlm. 22.

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 29.

¹²⁶ Salinannya dibuat pada tanggal 28 Agustus 1941. Lihat Lampiran 2 dan 3 dalam skripsi ini.

¹²⁷ *Voorzitter* (ketua) dan *peningmeester* (bendahara). *Ibid.*, hlm. 27. Lihat Lampiran 4 dalam skripsi ini.

Tabel 3. Jumlah Anggota Koperasi Mitra Batik Tahun 1939 – 1949 ¹²⁸

Tahun	Jumlah Anggota
1939	9
1940	36
1941	42
1942	42
1943	102
1944	96
1945	70
1946	45
1947	45
1948	48
1949	80

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah anggota Koperasi Mitra Batik dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Hal tersebut disebabkan Koperasi Mitra Batik mengalami krisis, seperti terjadinya pendirian berpuluh-puluh koperasi batik kecil (*bond*) di samping Koperasi Mitra Batik pada tahun 1940-an. Untuk mengatasi dan menanggulangi hal tersebut, pemerintah Tasikmalaya menggabungkan koperasi-koperasi kecil tersebut dalam Federasi Mitra Batik. Akan tetapi, koperasi-koperasi kecil tersebut tidak dapat bertahan lama karena pengelolaan koperasinya kurang profesional dan kurangnya kemampuan dalam meneruskan usaha koperasi, sehingga menyebabkan banyak koperasi kecil yang gulung tikar dan para pengrajin batik banyak yang masuk kembali pada Koperasi Mitra Batik.¹²⁹

Selain itu, terjadinya perang antara sekutu dan Jepang pada awal tahun 1941 menyebabkan perekonomian di Hindia Belanda menjadi kacau, sehingga jumlah anggota koperasi Mitra Batik tidak bertambah. Berbeda halnya dengan realita koperasi-koperasi di Tasikmalaya pada masa awal pendudukan Jepang, kegiatan Koperasi Mitra Batik justru semakin ramai karena banyak *kengkenan* (pesanan) blacu¹³⁰ dari pemerintah Jepang untuk dibuatkan batik. Kondisi tersebut tidak bertahan lama karena masyarakat Tasikmalaya harus melihat realita

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 20.

¹²⁹ N. Kartika, Widodo Nugrahanto dan Tanti Restiasih Skober, *Perkembangan Batik Tulis di Tasikmalaya* (Bandung: Laporan Penelitian, 2008), hlm. 25.

¹³⁰ Kain blacu adalah kain yang dibuat langsung dari bahan baku benang, sedangkan kain mori adalah kain blacu yang sudah di-*finishing* (proses pemutihan). Wawancara dengan Hilman, 05 Juni 2012.

terjadinya Perang Dunia II, sehingga masyarakat Tasikmalaya mengungsi ke wilayah yang lebih aman dari peperangan, seperti ke daerah Sukaratu dan kemudian ke daerah Ciamis.¹³¹ Pada masa pengungsian tersebut, kegiatan koperasi mengalami hambatan karena kantor Koperasi Mitra Batik berpindah-pindah tempat sesuai tempat pengungsian yang disarankan pemerintah, sehingga Koperasi Mitra Batik mengalami kelesuan menjalankan usahanya.

Sementara itu, pada masa revolusi setelah kemerdekaan Indonesia, Koperasi Mitra Batik mengalami kondisi kurang menguntungkan dalam menjalankan usahanya juga karena pada masa revolusi, masyarakat Tasikmalaya berada pada masa-masa genting dalam menghadapi ancaman dan serangan dari Belanda yang akan melancarkan agresi militernya. Akan tetapi, setelah pihak Republik Indonesia mengadakan perundingan dengan Belanda untuk gencatan senjata, maka kondisi masyarakat Tasikmalaya pun normal kembali dan Koperasi Mitra Batik dapat menjalankan kegiatannya kembali.

Sebelum memiliki kantor tetap, kantor sementara Koperasi Mitra Batik berlokasi di rumah Enie, tepatnya di Jalan Gudang Jero III No. 27. Setelah Koperasi Mitra Batik sudah berkembang, para pengurus dan anggotanya dapat membeli gedung baru yang dapat dijadikan kantor tetap Koperasi Mitra Batik, yakni gedung yang berlokasi di Jalan Ciawi No.17 Tasikmalaya.¹³² Sejak terjadi pengungsian warga Tasikmalaya akibat agresi militer Belanda pertama, kantor dikosongkan dan kantor dipindahkan kembali ke rumah Enie. Namun setelah kondisi membaik, kantor tersebut digunakan kembali dengan peralatan seadanya dan serba bekas.¹³³ Oleh karena itu, kehadiran Koperasi Mitra Batik mampu menjadi wadah bagi para pengusaha batik Tasikmalaya dalam menjalankan usahanya, terutama dalam hal penyediaan bahan-bahan batik lainnya.

¹³¹ A.Basrah Enie, *op cit.*, hlm. 31.

¹³² Jalan Ciawi berada dekat dengan Simpang Lima Kota Tasikmalaya. Sekarang kantor Koperasi Mitra Batik telah pindah ke Jalan SL Tobing, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Wawancara dengan A.Basrah Enie, 24 Maret 2011. Lihat Lampiran 6 dalam skripsi ini.

¹³³ A. Basrah Enie, *op cit.*, hlm. 33.

3.3 Peranan Perkoperasian bagi Masyarakat Tasikmalaya

Pada awal perkembangannya koperasi diterapkan di kalangan para pegawai pemerintah (pamong praja), kemudian akhirnya berkembang dan diterapkan di pedesaan¹³⁴, sehingga peranan koperasi tidak sebatas berada di kalangan kelas menengah, melainkan koperasi berdiri karena untuk membantu kalangan kelas bawah. Peranan Perkoperasian di Tasikmalaya tidak terlepas dari usaha pemerintah Tasikmalaya dan kalangan kelas menengah yang memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Tasikmalaya.

Peranan golongan menengah dapat dilihat dari para pendiri Koperasi Mitra Batik yang terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda, seperti Enie sebagai pengusaha batik, Naseh sebagai orang pergerakan dan Sumiratmadja sebagai guru atau kepala sekolah di Tasikmalaya. Golongan kelas menengah inilah yang banyak berperan dalam menggerakkan koperasi di Tasikmalaya, sehingga memberikan harapan bagi masyarakat Tasikmalaya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Peranan perkoperasian di Tasikmalaya banyak memberikan andil dalam kehidupan masyarakat Tasikmalaya, terutama membantu masyarakat Tasikmalaya dalam menjalankan usahanya dalam penyediaan pinjaman modal maupun bahan baku, sehingga mereka tidak khawatir lagi terjerat oleh para rentenir. Peranan tersebut seperti yang diperlihatkan oleh Koperasi Simpanan Pamengkeut Banda sebagai Koperasi Simpan Pinjam yang mampu mambatu memutar roda perekonomian masarakat Tasikmalaya dalam memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat Tasikmalaya dengan persyaratan yang tidak mempersulit maupun bunga yang besar seperti bank karena dilakukan dengan sistem bagi hasil. Masyarakat Tasikmalaya, sehingga dengan pinjaman modal yang mudah diharapkan dapat memberikan faedah¹³⁵ dan dapat menghindari para rentenir yang sering merugikan masyarakat Tasikmalaya.

Kehadiran koperasi dalam kehidupan masyarakat Tasikmalaya telah mambantu masyarakat dalam membuka lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan ditawarkan oleh koperasi, terutama koperasi yang berbentuk koperasi produksi,

¹³⁴ Tim Penyusun, *Album Emas 60 Tahun Koperasi Indonesia* (Jakarta: DEKOPIN, 2007), hlm.35.

¹³⁵ Pengurus Koperasi Simpanan Pamengkeut Banda (SPB). *Peringatan 50 TH. Koperasi Simpanan Pamengkeut Banda* (Tasikmalaya: SPB, 1983), hlm. 2.

seperti Koperasi Mitra Batik yang memproduksi batik dalam jumlah besar, sehingga koperasi memerlukan karyawan untuk bekerja dalam menjalankan produksinya, sehingga roda perekonomian di Tasikmalaya ikut terbantu dengan kehadiran koperasi dalam memajukan taraf hidup masyarakat di Tasikmalaya. Oleh karena itu, kehadiran koperasi di Tasikmalaya menambah kesempatan kerja bagi masyarakat di Tasikmalaya.

Pendirian koperasi-koperasi di Tasikmalaya juga ikut menumbuhkan industri-industri dan usaha-usaha kecil masyarakat Tasikmalaya, seperti industri kerajinan tangan, usaha batik dan alas kaki. Kehadiran koperasi membantu usaha masyarakat Tasikmalaya dalam menyediakan bahan baku usaha mereka, seperti Koperasi Mitra batik menjadi wadah bagi para pengrajin batik dalam mendapatkan kain mori dan bahan-bahan batik lainnya yang didatangkan dari luar daerah Tasikmalaya, sehingga mereka tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan bahan-bahan batik¹³⁶ dan dapat menghemat biaya produksi dalam menjalankan usahanya. Sementara itu, Koperasi Selamat menjadi wadah bagi para perajin alas kaki dalam menghimpun modal usaha¹³⁷, mendapatkan bahan baku dan menjadi tempat pemasaran hasil usaha mereka, sehingga tidak tergantung lagi kepada orang luar maupun rentenir yang sering memberatkan mereka dalam menjalankan usahanya, sedangkan Koperasi Simpan Pinjam, seperti Koperasi Pamengkeut Banda membantu masyarakat Tasikmalaya dalam menyediakan modal usaha, terutama bagi masyarakat Tasikmalaya yang berpenghasilan kecil dan perlu bantuan pinjaman modal usaha.¹³⁸ Kehadiran koperasi di Tasikmalaya ikut menumbuhkan berbagai macam industri dan usaha-usaha kecil.

Pendirian koperasi-koperasi di Tasikmalaya telah menjadi bagian kehidupan masyarakat Tasikmalaya dalam menjalankan usahanya, terutama bagi masyarakat berpenghasilan kecil agar mampu meningkatkan taraf hidup mereka. Koperasi mampu meningkatkan ekonomi masyarakat Tasikmalaya, sehingga menjadi suatu wadah atau badan usaha ekonomi rakyat yang peduli terhadap rakyat kecil dalam menghadapi tantangan dan persaingan ekonomi yang semakin besar.

¹³⁶ Wawancara dengan A. Basrah Enie, 24 Maret 2011.

¹³⁷ Wawancara dengan Nana Rukmana, 05 Juni 2012.

¹³⁸ Wawancara dengan Komar Raksadiwangsa, 11 April 2012.

BAB 4

KONGRES KOPERASI SEBAGAI ALAT PERJUANGAN EKONOMI BANGSA INDONESIA

4.1 Latar Belakang Kongres Koperasi Indonesia Pertama

Perkembangan perkoperasian setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia masih diwarnai suasana revolusi dan ancaman Belanda masih mewarnai suasana di Tasikmalaya. Selain itu, banyak pemimpin pada waktu itu yang menggunakan koperasi sebagai alat untuk kepentingan golongan. Oleh karena itu para pemimpin koperasi berusaha meluruskan asas dan sendi koperasi agar tidak disalahgunakan. Untuk mencapai hal itu, maka para pemimpin koperasi menginginkan adanya kesepakatan tentang prinsip-prinsip koperasi. Akan tetapi, keinginan tersebut terbentur oleh kenyataan bahwa di beberapa bagian di tanah air masih dalam keadaan perang melawan Belanda. Walaupun demikian, keadaan tersebut tidak membuat gentar para pemimpin koperasi untuk terus berjuang dalam mengembangkan ekonomi di daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, para pemimpin bersepakat untuk menyelenggarakan konferensi di Ciparay hingga menuju kongres koperasi yang akan dilaksanakan di Tasikmalaya guna membangkitkan kembali perkoperasian di Indonesia.

Tasikmalaya dipilih menjadi tempat Kongres Koperasi Indonesia pertama karena memiliki keunggulan daripada daerah lainnya di Indonesia. Sebelumnya, para tokoh Pusat Koperasi¹³⁹ memutuskan Bandung karena merupakan pusat perkoperasian Indonesia sekaligus sebagai ibukota Jawa Barat, kemudian Garut pun direncanakan sebagai tempat dibangunnya Pusat Koperasi Keresidenan Priangan dan tempat diadakannya Kongres Koperasi Indonesia pertama. Akan tetapi, ada beberapa kendala yang menyebabkan Bandung tidak menjadi tempat kongres koperasi karena faktor keamanan yang tidak memungkinkan karena

¹³⁹ Pusat Koperasi atau Koperasi Pusat adalah Koperasi yang anggota-anggotanya terdiri atas perkumpulan-perkumpulan koperasi. Kamaralasyah, *Tentang Pengertian Hal Organisasi Perkumpulan Ko-operasi* (Jakarta: J.B. Wolters-Groningen, 1954), hlm. 160. Lihat juga Sagimun M.D., *et al.*, *op cit.*, hlm. 203.

wilayah tersebut rawan terhadap pertempuran melawan sekutu dan NICA. Pada tahun 1947, Belanda merencanakan melakukan agresi militer di Indonesia, terutama Bandung menjadi sasaran agresi tersebut, sehingga Bandung tidak dipilih demi keamanan dalam keberlangsungan kongres koperasi. Sementara itu, Garut merupakan markas dari gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang dipimpin oleh Kartosuwiryo, sehingga hal tersebut dapat memperburuk keberlangsungan kongres jika diadakan di Garut.¹⁴⁰

Selain Kota Bandung dan Garut, Kota Malang pun disebut-sebut akan menjadi tempat Konferensi Koperasi Seluruh Rakyat Jawa dan Madura tersebut¹⁴¹. Akan tetapi, kondisi di Kota Malang kurang kondusif, maka Kota Malang tidak dijadikan tempat kongres, sehingga Tasikmalaya yang terpilih menjadi tempat kongres tersebut.¹⁴² Sejak Bandung diduduki oleh Belanda pada tahun 1947, Tasikmalaya pun menjadi ibukota Provinsi Jawa Barat dan Divisi Siliwangi telah dibentuk di Tasikmalaya dengan Pimpinan Kolonel A.H. Nasution pada tahun 20 Mei 1946.¹⁴³ Hal itu menjadi faktor pendorong Tasikmalaya dipilih menjadi tempat kongres tersebut.

Sebelum diadakan Kongres Koperasi Indonesia pertama, para tokoh Pusat Koperasi mengadakan suatu rapat untuk membentuk suatu wadah yang menghimpun seluruh Pusat Koperasi yang ada di Priangan. Atas prakarsa tokoh-tokoh Pusat Koperasi Kabupaten Bandung yang dipelopori oleh Niti Sumantri di Ciparay, Bandung diadakanlah Rapat Bandung Selatan. Rapat tersebut dihadiri oleh utusan-utusan dari pusat-pusat koperasi seluruh Keresidenan Priangan.¹⁴⁴ Para utusan yang menghadiri rapat tersebut berasal dari Pusat Koperasi Kota Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Bandung. Adapun nama-nama peserta yang hadir dalam rapat tersebut, sebagai berikut:

¹⁴⁰ Wawancara dengan Nana Rukmana pada 24 Januari 2012.

¹⁴¹ 'Kongres Koperasi Indonesia Pertama' dikenal juga dengan sebutan 'Konferensi Koperasi Seluruh Rakyat Jawa dan Madura' karena kebanyakan yang hadir adalah dari daerah Jawa dan Madura.

¹⁴² *Berita Indonesia*, 29 Djoeli 1947, hlm. 2.

¹⁴³ Momo Surtama, *op cit.*, hlm. 5.

¹⁴⁴ Pengurus Pusat Koperasi Kabupaten Tasikmalaya (PKKT), *Sejarah Hari Koperasi 12 Juli 1947 di Tasikmalaya*, Tasikmalaya: PKKT.

1. Suliadinata dari Pusat Koperasi Kota Bandung
2. Kartawisastra dari Pusat Koperasi Kabupaten Tasikmalaya
3. Suriadwidjaja dari Pusat Koperasi Kabupaten Garut
4. Surawikarta dari Pusat Koperasi Kabupaten Ciamis
5. Kastura dari Pusat Koperasi Kabupaten Bandung

Selain itu, hadir juga dalam rapat tersebut utusan dari Jawatan Koperasi R. S. Kosasih dan Slamet Sudiby. Adapun pokok bahasan yang disarankan oleh Niti Sumantri ialah:

1. Menyusun kembali organisasi koperasi karena koperasi telah menyimpang haluannya dai semula akibat pendudukan Jepang, yakni koperasi hanya dipakai untuk melayani kebutuhan balatentara Jepang.
2. Meninjau kembali azas-azas koperasi.
3. Menyusun konsepsi Koperasi Desa¹⁴⁵ dan pengertian koperasi ekonomi¹⁴⁶.

Selain bahan-bahan tersebut tentang penyusunan Undang-Undang Koperasi Indonesia pun dibahas karena pada waktu itu belum mempunyai Undang-Undang Koperasi dan masih berpijak kepada Ordonasi Koperasi No.108 tahun 1933 buatan Pemerintah Hindia Belanda. *Pertama*, Anggaran Dasar koperasi harus ditulis dalam Bahasa Belanda. *Kedua*, pengesahan harus disetujui oleh notaris. *Ketiga*, harus diumumkan melalui Berita Negara yang berbahasa Belanda.¹⁴⁷ Rapat memutuskan mendirikan Pusat Koperasi Keresidenan Priangan, pada waktu di Ciparay keadaan genting akibat ancaman dan serangan dari tentara Belanda yang akan melakukan agresi militernya di Indonesia, sehingga Pusat Koperasi Keresidenan Priangan pindah ke Garut, di Garut pun tidak lama terus pindah ke Tasikmalaya.¹⁴⁸ Adapun sususan dari pengurus Pusat Koperasi Keresidenan Priangan sebagai berikut:

¹⁴⁵ Pengertian koperasi desa bahwa pada suatu desa ada satu koperasi desa yang meliputi segala usaha menurut kebutuhan penduduk desa. Sagimun M.D., *et al.*, *op cit.*, hlm. 187.

¹⁴⁶ Koperasi Ekonomi adalah koperasi yang berdasarkan asas-asas ekonomi pasar yang rasional dan kompetitif. Pengertian tersebut dikutip dari tulisan M. Dawam Rahardjo, 'Apa Kabar Koperasi Indonesia', dalam Rikard Bagun (editor), *op cit.*, hlm. 295.

¹⁴⁷ Edilius dan Sudasono, *op cit.*, hlm. 39-40.

¹⁴⁸ Pengurus Pusat Koperasi Kabupaten Tasikmalaya (PKKT), *Sejarah Hari Koperasi 12 Juli 1947 di Tasikmalaya*, Tasikmalaya: PKKT.

1. Ketua : Niti Sumantri
2. Sekretaris : Dunga
3. Anggota :
 - a. H. Adam (Bandung)
 - b. Admihardja (Garut)
 - c. Durahim (Ciamis)
 - d. Kartawisastra (Tasikmalaya)
 - e. Anggadiredja (Bandung)
 - f. Kastura (Bandung)
 - g. Nani Karta Kusumah (Sumedang)
 - h. Kosasih Natawidjaja (Bandung)
 - i. Suprayogi (Bandung)¹⁴⁹
4. Penasihat : Isa Ansori, Suparman, Ny. Suprpto dan Samaun Sakri
5. Badan Pemeriksa : Endun Serawikarta (Ciamis) dan Wasoma (Kota Bandung)

Pusat Koperasi Keresidenan Priangan didirikan di Ciparay, Kecamatan Bandung Selatan, kemudian berpindah ke Garut, dan terakhir berpindah ke Tasikmalaya pada saat kondisi perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pusat Koperasi Keresidenan Priangan diresmikan pada akhir bulan Maret 1946 di Tasikmalaya dan kantornya didirikan di Jalan Gunung Ladu Kota Tasikmalaya.¹⁵⁰ Pusat Koperasi Keresidenan Priangan didirikan karena ingin membela hak Bangsa Indonesia berupa kewajiban-kewajiban sebagai manusia merdeka dan berdaulat. Para tokoh koperasi berpendapat bahwa perjuangan Indonesia tidak cukup dengan jalan merebut kekuasaan dari tangan penjajah saja karena bilamana ekonomi kolonial masih tumbuh mekar dan berakar di bumi Indonesia, hal ini masih merupakan penjajahan pula, yakni penjajahan di bidang ekonomi.¹⁵¹

¹⁴⁹ Momo Surtama, *op cit.*, hlm. 4.

¹⁵⁰ Jalan Gunung Ladu sekarang berganti nama menjadi Jalan Yudhanegara dekat dengan Mesjid Agung Kota Tasikmalaya.

¹⁵¹ Pengurus Pusat Koperasi Kabupaten Tasikmalaya (PKKT), *Sejarah Hari Koperasi 12 Juli 1947 di Tasikmalaya*, (Tasikmalaya: PKKT).

Adapun tiga tugas pokok dari Pusat Koperasi Keresidenan Priangan. *Pertama*, mengoordinasi gerakan koperasi yang sudah ada di wilayah Jawa Barat. *Kedua*, mendorong terbentuknya koperasi di seluruh Jawa Barat. *Ketiga*, secepat-cepatnya menyelenggarakan Kongres Seluruh Indonesia.¹⁵² Oleh karena itu, perjuangan dalam ekonomi menjadi kewajiban Bangsa Indonesia dalam menumbangkan stelsel ekonomi yang sifatnya kolonial dari muka bumi Indonesia karena telah menyebabkan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Dengan demikian, tokoh-tokoh koperasi tersebut bersepakat dengan kebulatan tekad untuk menghapuskan penjajahan ekonomi warisan kolonial. Untuk melaksanakan maksud tersebut ialah dengan jalan mengadakan kongres koperasi seluruh Indonesia.

Pengurus Pusat Koperasi Keresidenan Priangan sekaligus membentuk panitia penyelenggaraan kongres dan dilengkapi oleh tenaga dari Pusat Koperasi Kabupaten Tasikmalaya (PKKT) sebagai tuan rumah ialah A. Bachaki, Lukman Sasmita, Sahuri dan Suwarman.¹⁵³ Sementara itu, panitia kongres koperasi tersebut adalah Niti Sumantri sebagai ketua kongres, A.D. Dunga sebagai penulis dan Ny. Djoeaningsih sebagai pembantu. Mereka bertiga berasal dari Pusat Koperasi Priangan.¹⁵⁴ Pada saat itu, ketua PKKT adalah A. Kartawisastra¹⁵⁵ yang merupakan pendiri PKKT sekaligus dipilih menjadi bendahara kongres tersebut.

Saat-saat menjelang diselenggarakan kongres koperasi, para pemimpin Gerakan Koperasi di Jawa Barat (Priangan) menetapkan utusan ke Yogyakarta yang merupakan ibukota Republik Indonesia untuk menemui Mohammad Hatta yang tidak hanya sekadar wakil presiden, melainkan juga sebagai ahli ekonomi dan penganjur gerakan koperasi. Utusan tersebut terdiri dari Niti Sumantri, Kastura, Much Muchtar dan Kyai Lukman Hakim.

Adapun tujuan utusan tersebut dikirim adalah untuk membicarakan tentang berbagai masalah yang dihadapi oleh gerakan koperasi dalam mengembangkan koperasi. Khususnya di Jawa Barat.¹⁵⁶ Utusan Gerakan Koperasi

¹⁵²Husni Rasyad, Indriana dan Yuzri Suhud, *Selayang Pandang Gerakan Koperasi Indonesia* (Jakarta: DEKOPIN, 2007), hlm. 3.

¹⁵³ Momo Surtama, *op cit.*, hlm. 5.

¹⁵⁴ Kamaralsyah, *et al.*, *op cit.*, hlm. 9.

¹⁵⁵ Wawancara dengan Nana Rukmana pada 24 Januari 2012.

¹⁵⁶R. Unang Sunardjo, *et al.*, *op cit.*, hlm. 6.

juga bertemu dengan R.S. Soeria Atmadja, Kepala Jawatan Koperasi yang berkedudukan di Magelang dan R. M. Margono Djojohadikusumo, Presiden Direktur bank Negara Indonesia. Utusan Gerakan Koperasi sependapat dengan R. M. Margono Djojohadikusumo bahwa akan diadakan “Kamar Koperasi” yang bertugas untuk menyelenggarakan kredit bagi bagi seluruh gerakan koperasi di Indonesia. Oleh karena itu, setelah persiapan sudah matang, maka Pusat Koperasi Priangan mengambil prakarsa untuk menyelenggarakan Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya.¹⁵⁷

Ada beberapa alasan mengapa Tasikmalaya dipilih menjadi tempat diadakannya Kongres Koperasi Indonesia pertama. *Pertama*, Tasikmalaya merupakan daerah yang strategis dan memiliki banyak fasilitas yang menunjang diadakannya kongres koperasi. Pabrik Tenun PKKT dijadikan ruangan Kongres Koperasi pertama yang dapat menghimpun para peserta kongres yang hadir. Untuk mendukung kelancaran kongres koperasi tersebut, pemerintah dan masyarakat Tasikmalaya bahu membahu merenovasi bangunan PKKT agar layak dan kondusif untuk keberlangsungan kongres. Keadaan alam di Jalan Ciamis yang sekarang Jalan Moh.Hatta masih terdapat banyak *leuweung* (kebun liar atau hutan semak belukar), terutama di samping kanan bangunan kongres koperasi (PKKT), sehingga perlu ditata daerah di sekitar bangunan PKKT. Adapun tokoh pemimpin bangsa Indonesia yang pernah berkunjung ke lokasi bangunan PKKT setelah selesai direnovasi adalah Presiden Soekarno, kemudian Mohammad Hatta.¹⁵⁸

Kemudian, untuk penginapan peserta kongres, maka pihak PKKT menyediakan tempat penginapan di Jalan Dewi Sartika.¹⁵⁹ Tempat penginapan tersebut merupakan usaha pemondokan yang dimiliki PKKT. Selain itu, tempat penginapan juga dibantu oleh masyarakat di sekitar lokasi PKKT dengan menyediakan tempat tinggalnya sebagai tempat penginapan para peserta kongres koperasi.¹⁶⁰ Bahkan para wanita Tasikmalaya mempersiapkan makanan untuk para peserta kongres yang datang dari berbagai wilayah di luar Tasikmalaya.

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 7.

¹⁵⁸ Wawancara dengan Udin Karto pada tanggal 11 April 2012.

¹⁵⁹ Sekarang lokasi penginapan PKKT berada di dekat SMA Pasundan Tasikmalaya. Tempat penginapan tersebut terdiri dari 14 kamar.

¹⁶⁰ Pengurus PKKT, *Sejarah Berdirinya Pusat Koperasi Kabupaten Tasikmalaya (PKKT)*, (Tasikmalaya: PKKT, 2002), hlm. 3.

Menjamu mereka merupakan suatu kehormatan bagi masyarakat Tasikmalaya dalam memberikan pelayanan bagi para pejuang bangsa Indonesia.¹⁶¹ Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Tasikmalaya memberikan andil dan bersimpati terhadap para pemimpin koperasi yang memperjuangkan diadakannya kongres koperasi untuk masa depan koperasi di Indonesia. *Kedua*, faktor keamanan bahwa daerah Tasikmalaya merupakan daerah yang paling aman, bahkan Tasikmalaya menjadi daerah tujuan para pengungsi dari segala penjuru tanah air. Pengurus Pusat Koperasi Priangan pun ikut berhijrah ke Tasikmalaya yang pada awalnya berpusat di Bandung. Selain itu, di Tasikmalaya terdapat markas besar Pasukan Siliwangi Jawa Barat sehingga daerahnya lebih aman dengan perlindungan Pasukan Siliwangi apabila suatu saat pasukan tentara Belanda menyerang ke daerah Tasikmalaya.

4.2 Suasana Kongres Koperasi Indonesia Pertama di Tasikmalaya

Kongres Koperasi Indonesia Pertama berlangsung di Gedung Pabrik Tenun Perintis¹⁶² milik Pusat Koperasi Kabupaten Tasikmalaya (PKKT) yang terletak di Jalan Ciamis No. 40, dari tanggal 11-14 Juli 1947 mengundang 500 orang utusan tokoh koperasi dari 51 Kabupaten di Indonesia.¹⁶³ Utusan yang hadir pada saat kongres koperasi tersebut adalah utusan dari Jawa, Madura dan Sumatra, sedangkan utusan dari Sulawesi dan Kalimantan tidak dapat hadir mengikuti kongres koperasi tersebut disebabkan oleh lalu lintas antarpulau yang tidak aman.¹⁶⁴ Hal tersebut disebabkan oleh blokade jalur perairan laut oleh Belanda sejak bulan November 1945¹⁶⁵, sehingga menyebabkan terhambatnya jalur transportasi perairan menuju Pulau Jawa, sehingga tidak semua utusan dari

¹⁶¹ Wawancara dengan Nana pada 24 Januari 2012.

¹⁶² Gedung Pabrik Tenun Perintis mulai dibangun sejak awal tahun 1947. Di gedung tersebut terdapat mesin tenun dengan hasil perhitungan \pm 1.000 meter kain per hari. Disamping, gedung tersebut dibangun juga sebuah penggilingan beras 'Perintis'. Pembangunan kedua gedung tersebut tidak terlepas dari hasil perjuangan masyarakat Tasikmalaya dengan melakukan pengumpulan modal guna membuka jalan dalam mengadakan penyusunan usaha berskala nasional. *Soeara Merdeka*, 4 Januari 1947, hlm. 3.

¹⁶³ Sekarang Jalan Ciamis No. 40 telah berubah menjadi Jalan Moh. Hatta No. 40, Kel. Sukamanah, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya. Dinas KUKM Kota Tasikmalaya, *op cit.*, hlm.160. Lihat juga Momo Surtama, *op cit.*, hlm. 4.

¹⁶⁴ Momo Surtama, *op cit.*, hlm. 4.

¹⁶⁵ Marwati Djoened dan Nograho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, cetakan keenam (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 173.

luar Pulau Jawa yang dapat hadir dalam kongres koperasi tersebut. Keterangan dari salah satu koran harian Tasikmalaya, yaitu koran *Soeara Merdeka* menerangkan bahwa utusan yang hadir mencapai 116 orang.¹⁶⁶

Para utusan yang hadir kebanyakan berasal dari utusan Jawa dan Madura, kecuali Banten, sehingga Kongres Koperasi ini dikenal juga sebagai Konferensi Koperasi Rakyat Seluruh Jawa-Madura.¹⁶⁷ Dalam kongres tersebut hadir pula Gubernur Jawa Barat, yaitu Sewaka, kemudian Rusli Rahim mewakili Jawatan Koperasi Pusat dan Patih Tasikmalaya, yaitu Kartaatmadja yang mewakili Bupati Tasikmalaya.¹⁶⁸ Pada waktu itulah para tokoh Koperasi memperjuangkan ekonomi rakyat guna menghapus pengaruh-pengaruh ekonomi warisan kolonial dari muka bumi Indonesia dan menjadikan koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat Indonesia.

Sebagai acara pertama dari Kongres Koperasi Indonesia Pertama diadakanlah malam perkenalan dengan tujuan saling mengenal satu sama lain di antara para utusan dari berbagai wilayah di Indonesia. Setelah acara perkenalan selesai pada pukul 20.00, maka acara dilanjutkan dengan acara pertemuan tertutup untuk merundingkan hal-hal yang akan diputuskan dalam acara kongres tersebut. Sebelum acara rapat dimulai, dinyanyikan lagu Indonesia Raya bersama dengan seluruh peserta kongres. Setelah dinyanyikan lagu tersebut, Niti Sumantri sebagai ketua rapat dalam kongres tersebut menyampaikan kata-kata hasrat dari para panitia penyelenggara kongres untuk mengadakan acara kongres tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari latar belakang para panitia penyelenggara yang berbeda satu sama lain, antara lain dari orang partai, jawatan, badan perdagangan hingga ahli kesehatan pun hadir menjadi panitia penyelenggara.¹⁶⁹

¹⁶⁶ *Soeara Merdeka*, 12 Djoeli 1947, hlm. 3.

¹⁶⁷ Wawancara dengan Nana Rukmana pada 24 Januari 2012, Udin Karto pada 11 April 2012, Ude Kurnaedi pada 2 Mei 2012. Dapat dilihat juga penyebutan 'Konferensi Koperasi Rakyat Seluruh Jawa-Madura' pada koran *Soeara Merdeka*, 12 Djoeli 1947, hlm. 3 dan *Berita Indonesia*, 29 Djoeli 1947, hlm. 2, sedangkan dalam laporan penelitian Dr. H. Masngudi menyebut Kongres Koperasi Indonesia pertama dengan 'Kongres Koperasi Se-Jawa' yang pertama. Masngudi, *Penelitian Tentang Sejarah Perkembangan Koperasi Di Indonesia* (Jakarta: Laporan Penelitian Badan Penelitian Pengembangan Koperasi, Departemen Koperasi, 1990).

¹⁶⁸ Arsip Pusat Koperasi Kabupaten Tasikmalaya (PKKT), *Sejarah Hari Koperasi 12 Juli 1947 di Tasikmalaya*, (Tasikmalaya: PKKT).

¹⁶⁹ *Soeara Merdeka*, 12 Djoeli 1947, hlm. 3.

Niti Sumantri menerangkan juga bahwa kesadaran masyarakat terhadap koperasi masih belum mempunyai pendirian dan tegas akan arti koperasi, sehingga banyak anggapan dari masyarakat mengenai keberadaan koperasi, diantaranya adalah anggapan masyarakat yang menilai koperasi hanya sebagai badan distribusi semata, bahkan tidak ketinggalan masih ada masyarakat yang menilai negatif keberadaan koperasi. Niti Sumantri mengharapkan koperasi dapat menjadi front ekonomi rakyat seluruhnya. Selain itu, koperasi belum membuktikan apa yang sebenarnya koperasi dan perlu adanya tindakan tegas dari pemerintah kearah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Sebagai penutup, ketua kongres menerangkan bahwa koperasi tidak dapat berdiri dan subur hidupnya jika Indonesia adakah negara yang kapitalis, negara jajahan, ataupun setengah jajahan. Oleh karena itu, perjuangan dan keberadaan koperasi rakyat memiliki hubungan dengan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Saat acara pembukaan Kongres Koperasi Indonesia pertama, kongres dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, yakni Mohammad Hatta. Adapun keinginan-keinginan Wakil Presiden Mohammad Hatta mengenai koperasi bahwa koperasi bukanlah penahan kapitalisme maupun mempertahankan diri dari kapitalisme yang dapat menyengsarakan manusia, melainkan koperasi ekonomi yang semuanya hasil dari kecerdasan peradaban manusia.¹⁷⁰ Oleh karena itu, diharapkan kehadiran koperasi menjadi suatu wadah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat karena koperasi bukanlah perkumpulan modal, melainkan perkumpulan orang yang menentukan koperasi itu berkembang.

Selain wakil presiden, Gubernur Jawa Barat, yakni Sewaka juga memberikan kata sambutan, sedangkan Kepala Jawatan Perekonomian Pusat, R.S Soeria Atmadja yang bekedudukan di Magelang tidak dapat hadir dalam kongres koperasi tersebut, sehingga ia mengirimkan utusannya, yaitu Notokusumo.¹⁷¹ Gubernur Jawa Barat Sewaka menyatakan bahwa koperasi tidak dapat tumbuh dari atas, melainkan bahwa koperasi harus dihidupkan dari desa karena letak kekuatan-kekuatan negara berasal dari desa.

¹⁷⁰ *Soeara Merdeka*, 12 Djoeli 1947, hlm. 3.

¹⁷¹ Kamaralsyah, *et al.*, *op cit.*, hlm. 7.

Adapun penerangan dari Notokusumo sebagai Wakil Jawatan Perekonomian Pusat menerangkan bahwa koperasi zaman Hindia Belanda dan Jepang merupakan koperasi yang politik dan ekonominya bertentangan dengan pendirian dan asas-asas koperasi yang sebenarnya. Selain itu, diterangkan pula arti masyarakat desa dalam koperasi yang semuanya harus berdasarkan atas politik ekonomi pemerintah Indonesia, yaitu tegas dan konstruktif.¹⁷² Sementara itu, suasana saat kongres koperasi tersebut diceritakan oleh Niti Sumantri, sebagai berikut:

“Sungguhpun dalam rapat-rapat itu sering terjadi kehebatan pengaruh dan arus revolusi, tapi saya pujikan bahwa kongres dapat melancarkan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Hanya satu kali terjadi insiden ialah di kala perdebatan yang memuncak antara wakil koperasi Cirebon dan Sragen, dimana pihak ketentaraan teh turut bertindak. Sungguhpun timbul kegaduhan, tetapi seketika itu juga rapat berlangsung lagi dengan tertawa gelak karena justru dalam perdebatan tadi turut campurnya pihak ketentaraan itu, timbul karena salah paham. Bahkan kedua kawan itu adalah orang-orang dari satu partai”¹⁷³

Pada saat sidang dimulai, terjadi perdebatan dalam memutuskan hasil sidang sebagaimana yang dijelaskan oleh Niti Sumantri sebagai ketua kongres tersebut bahwa terjadi kesalahpahaman di antara wakil-wakil koperasi dalam bersidang, tetapi hal tersebut merupakan jalannya bersidang untuk menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan bersama. Kondisi sidang kembali dalam keadaan normal dan berjalan dengan lancar menghasilkan keputusan yang memberikan andil untuk keberlangsungan perkoperasian Indonesia selanjutnya.¹⁷⁴

Hal tersebut menjelaskan bahwa dalam kondisi Indonesia yang sangat genting akibat serangan Belanda, para tokoh koperasi mampu dan berhasil mengadakan kongres koperasi Indonesia pertama guna memajukan perkoperasian di Indonesia. Hal tersebut merupakan prestasi yang besar karena mereka mampu mengadakan suatu kegiatan besar yang menghimpun utusan-utusan dari berbagai wilayah di Indonesia pada saat kondisi Indonesia tidak kondusif.

¹⁷² *Soeara Merdeka*, 12 Djoeli 1947, hlm. 3.

¹⁷³ *Ibid.*, hlm. 7-8.

¹⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 7-8.

Adapun pokok-pokok pembahasan dalam kongres koperasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Azas dan tujuan koperasi rakyat sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33.
2. Politik koperasi rakyat untuk memakmurkan negara.
3. Modal dan usaha yang lebih diperlukan untuk koperasi rakyat terutama koperasi desa.
4. Merubah dan menyempurnakan GAPKI (Gabungan Pusat Koperasi Indonesia) yang asalnya “Moeder Centrale”.
5. Menetapkan hari koperasi.

Itulah bahan-bahan yang menjadi pokok persoalan dalam kongres tersebut pada 11-14 Juli 1947. Kemudian, acara puncak dari Kongres Koperasi Indonesia Pertama terjadi pada tanggal 12 Juli 1947 dengan diadakannya rapat dalam kongres koperasi dilakukan hingga malam hari dan melahirkan sepuluh butir keputusan yang berarti bagi perkembangan koperasi di Indonesia selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Membentuk organisasi koperasi dengan tugas baru ialah yang disebut dengan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI).¹⁷⁵
2. Azas koperasi adalah gotong royong
3. Menetapkan Peraturan Dasar SOKRI
4. Kemakmuran rakyat harus dilaksanakan berdasarkan Pasal 33 dengan Koperasi Rakyat, koperasi ekonomi sebagai alat pelaksana.
5. Mendirikan Bank Koperasi Sentral
6. Ditetapkannya konsepsi Koperasi Rakyat Desa yang meliputi tiga usaha: kredit, konsumsi dan produksi dengan pernyataan bahwa Koperasi Rakyat Desa harus dijadikan dasar susunan SOKRI.
7. Memperhebat dan memperluas pendidikan koperasi rakyat di kalangan masyarakat.
8. Distribusi barang-barang penting harus diselenggarakan oleh koperasi.¹⁷⁶

¹⁷⁵ SOKRI merupakan cikal bakal dibentuknya DEKOPIN (Dewan Koperasi Indonesia). Momo Surtama, *op cit.*, hlm. 6.

¹⁷⁶ Kamaralsyah, *et al.*, *op cit.*, hlm. 8.

9. Membuat presidium yang diketuai oleh Bapak Niti Sumantri dan A.D. Dunga sebagai Sekretaris Jenderal dan tiap keresidenan menjadi anggota presidium.
10. Kongres menetapkan tanggal 12 Juli menjadi Hari Koperasi dan tiap tahun wajib diperingati dan dianggap hari istimewa untuk kemekaran koperasi¹⁷⁷.

Adapun arti penting dalam memperingati hari Koperasi 12 Juli. *Pertama*, Hari Koperasi 12 Juli harus dijadikan untuk menambah semangat bekerja dengan mengadakan rupa-rupa kegiatan usaha yang mendorong kemajuan dalam bidang perekonomian. *Kedua*, Hari Koperasi 12 Juli harus dipakai memperteguh atau mempertebal tekad dan semangat untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 (mengisi kemerdekaan). *Ketiga*, Hari Koperasi 12 Juli diharapkan oleh kongres supaya menjadi tenaga pendorong untuk kemakmuran hidup dan kehidupan rakyat Indonesia pada umumnya, baik dalam arti materi dan kultural.¹⁷⁸

Tasikmalaya telah menjadi daerah yang memiliki arti penting dalam sejarah perkoperasian di Indonesia sebagai tempat didirikannya Pusat Koperasi Keresidenan Priangan sekaligus tempat diadakannya Kongres Koperasi Indonesia pertama pada tanggal 11-14 Juli 1947 yang dihadiri oleh berbagai utusan tokoh koperasi di Indonesia. Sebagai tanda untuk memperingati kongres tersebut, maka pemerintah membangun Monumen Nasional Kongres Koperasi Indonesia Pertama yang dibangun di lahan kantor Pusat Koperasi Kabupaten Tasikmalaya (PKKT).¹⁷⁹ Peletakan batu pertama Tugu Koperasi¹⁸⁰ dilakukan pada pagi hari setelah bersidang. Tugu koperasi tersebut adalah salah satu monumen kebanggaan warga Tasikmalaya karena dengan dibangunnya tugu tersebut menandakan telah terjadi hal penting di Tasikmalaya yang perlu diingat oleh bangsa Indonesia

¹⁷⁷ Momo Surtama, *op cit.*, hlm. 5-6.

¹⁷⁸ Pengurus Pusat Koperasi Kabupaten Tasikmalaya (PKKT), *Sejarah Hari Koperasi 12 Juli 1947 di Tasikmalaya*, (Tasikmalaya: PKKT), hlm. 3.

¹⁷⁹ Momo Surtama, *op cit.*, hlm. 4.

¹⁸⁰ Pembangunan tugu koperasi tersebut dilaksanakan pada awal tahun 1950, dan diresmikan pada tanggal 12 Juli 1950. Kamaralsyah, *et al.*, *op cit.*, hlm. 9. Menurut Bapak Nana Rukmana, cucu dari Kartasmita (peserta Kongres Koperasi Indonesia pertama dan perintis perkoperasian Tasikmalaya) bahwa tugu koperasi tersebut diresmikan oleh Mohammad Hatta. Bahkan, untuk mengenang jasa-jasa Mohammad Hatta dalam memajukan perkoperasian di Indonesia, khususnya di Tasikmalaya, maka Jalan Ciamis diganti menjadi Jalan Moh.Hatta (Wawancara dengan Nana Rukmana pada 24 Januari 2012).

mengenai kegiatan besar berskala nasional, yakni berlangsungnya Kongres Koperasi Indonesia Pertama pada 11-14 Juli 1947.¹⁸¹ Sementara itu, pada siang harinya diadakan pameran hasil produksi dan kerajinan koperasi Kabupaten Tasikmalaya yang dihimpun dari koperasi-koperasi di Tasikmalaya bertempat di ruangan kongres¹⁸², sehingga memberikan nuansa lebih dalam menyelenggarakan kongres koperasi tersebut dan dapat memberikan wawasan kepara para pengunjung pameran tersebut.

4.3 Pengaruh Kongres Koperasi Indonesia Pertama

Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya telah menjadi bukti bahwa para pemimpin bangsa memiliki keinginan untuk mengubah perekonomian Indonesia lebih baik. Kongres tersebut menjadi alat perjuangan Indonesia dalam bidang ekonomi guna melawan penjajahan dalam perekonomian Indonesia. Bersama-sama para utusan koperasi dari berbagai wilayah Indonesia bersatu dalam sebuah kongres besar koperasi guna bertukar pikiran dan menghasilkan keputusan bersama yang akan diterapkan dalam perkoperasian Indonesia di masa yang akan datang, sehingga memberikan stimulus dalam meningkatkan perekonomian rakyat Indonesia.

Adapun situasi tanah air setelah diadakannya Kongres Koperasi Indonesia pertama yang masih tetap diwarnai oleh suasana revolusi dengan ditandai pertempuran di beberapa daerah melawan Belanda, termasuk di Tasikmalaya. Tasikmalaya hendak dijadikan salah satu markas tentara Belanda untuk menguasai Indonesia. Salah satu sasaran yang diincar oleh Belanda adalah wilayah yang memiliki sumber daya alam maupun manusianya.¹⁸³ Tasikmalaya merupakan salah satu yang diincar tentara Belanda karena daerah Tasikmalaya merupakan daerah yang subur. Tentara Belanda semakin tertarik setelah diketahui bahwa di Tasikmalaya telah dilaksanakan Kongres Koperasi Indonesia pertama yang membuat daerah Tasikmalaya diketahui secara luas oleh masyarakat Indonesia. Bahkan setahun setelah kongres koperasi, Belanda memasuki daerah

¹⁸¹ Enjang Sobarudin, 'Tugu Koperasi', <http://www.kabar-priangan.com/news/detail/2073>, diunduh pada Kamis, 12 April 2012, pukul 20:38 WIB.

¹⁸² Kamaralsyah, *et al.*, *op. cit.*, hlm. 9.

¹⁸³ Hasil wawancara dengan Udin Karto pada tanggal 11 April 2011.

Tasikmalaya, sehingga membuat masyarakat Tasikmalaya dalam keadaan penuh kekhawatiran. Adapun bangunan yang pernah dipakai sebagai Kongres Koperasi Indonesia pertama, yakni bangunan PKKT menjadi sasaran tentara Belanda karena bangunan PKKT merupakan bangunan paling megah dan memiliki banyak sarana. Bangunan ini memiliki loteng yang tinggi dan tanah yang luas, sehingga dari kejauhan dapat terlihat loteng tersebut karena bangunan paling tinggi di antara bangunan sekitarnya.¹⁸⁴ Demi menyelamatkan warga Tasikmalaya dan agar bangunan tersebut tidak dikuasai tentara Belanda, maka yang dilakukan oleh pemerintah Tasikmalaya adalah membombardir dan hanguskan bangunan tersebut guna membuat Belanda tidak tertarik dan menghentikan maksudnya untuk menguasai daerah Tasikmalaya.¹⁸⁵

Walaupun bangunan tempat Kongres Koperasi dibombardir dan hanguskan, bukan berarti perjuangan para tokoh koperasi pupus begitu saja. Keputusan bersama yang telah dihasilkan dalam kongres koperasi tersebut tetap dijalankan guna memajukan perekonomian rakyat Indonesia, khususnya menjadikan koperasi sebagai alat perjuangan Indonesia di bidang ekonomi dalam menghadapi ancaman dari luar seperti kapitalisme dan liberalisme ekonomi yang dapat menyengsarakan rakyat Indonesia, terutama rakyat yang memiliki ekonomi lemah.

Sesuai dengan keputusan kongres bahwa distribusi barang-barang penting diselenggarakan oleh koperasi¹⁸⁶. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam pendistribusian barang-barang penting yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Tasikmalaya mengalami pemboman oleh Belanda setelah kongres diselenggarakan sehingga membuat keputusan kongres terhambat dalam pelaksanaannya. Meskipun demikian, para pemimpin koperasi desa di keresidenan-keresidenan Jawa masih sempat diberikan kursus koperasi oleh Jawatan Koperasi¹⁸⁷ sebagai bukti penerapan hasil kongres bahwa pendidikan koperasi di kalangan masyarakat akan diperluas guna meyakinkan masyarakat akan pentingnya koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat Indonesia yang

¹⁸⁴ Menurut Udin Karto sebagai saksi mata Kongres Koperasi Indonesia pertama, loteng bangunan PKKT memiliki dua lantai dan terlihat kemegahannya walau dari kejauhan. Akan tetapi, setelah bangunan tersebut dibombardir dan hanguskan, maka loteng tersebut tidak terlihat lagi karena saat bangunan PKKT dibangun kembali yang masih ada hingga sekarang sudah tidak memiliki loteng lagi.

¹⁸⁵ Hasil wawancara dengan Udin Karto pada tanggal 11 April 2011.

¹⁸⁶ Kamaralasyah, *et al.*, *op cit.*, hlm. 8

¹⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 9.

berazaskan kekeluargaan. Bahkan setelah kongres, tidak henti-hentinya Wakil Presiden sekaligus tokoh Koperasi, yakni Mohammad Hatta menyuarakan akan pentingnya koperasi bagi perekonomian rakyat Indonesia sesuai pencantuman koperasi pada penjelasan ayat 1 Pasal 33 dengan Undang-Undang Dasar 1945:

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan itu ialah koperasi. Perkataan Undang-Undang Dasar ini bukanlah hanya suatu pernyataan dari pada ideal bangsa kita, tetapi juga suruhan untuk bekerja ke jurusan itu. Suatu perekonomian nasional yang berdasarkan asas koperasi, inilah ideal kita.”¹⁸⁸

Hal tersebut menunjukkan bahwa para pendiri Republik Indonesia memandang koperasi sebagai sarana pengembangan ekonomi yang paling sesuai dengan pribadi bangsa Indonesia, sehingga semakin kuatlah semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya berbagai jenis koperasi dengan pesat sebagai alat perjuangan di bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pada akhir 1946 hingga tahun 1947 di Jawa yang merupakan daerah perjuangan utama telah tercatat ±2.500 koperasi yang diawasi oleh pemerintah Republik Indonesia.¹⁸⁹

Adapun arti penting Kongres Koperasi Indonesia pertama bagi perkembangan koperasi di Tasikmalaya. *Pertama*, meningkatkan semangat berkoperasi di kalangan masyarakat Tasikmalaya, sehingga koperasi mendapatkan citra yang baik di mata masyarakat Tasikmalaya. *Kedua*, semakin banyak masyarakat Tasikmalaya yang bergabung dalam koperasi. Setelah kongres tersebut diselenggarakan, banyak koperasi-koperasi baru didirikan dan jumlah anggota yang meningkat secara pesat. *Ketiga*, koperasi menjadi alat perjuangan ekonomi masyarakat Tasikmalaya dalam melawan bentuk ekonomi penjajah.¹⁹⁰ Oleh karena itu, kongres tersebut mampu menjadi awal kebangkitan perkoperasian di Tasikmalaya pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, serta sebagai tanda perjuangan ekonomi bangsa Indonesia. Hasil kongres kongres tersebut memberikan stimulus untuk keberlangsungan koperasi dimasa yang akan datang, sehingga koperasi dapat menjadi rekan pemerintah dalam memajukan perekonomian Indonesia yang sesuai dengan pribadi bangsa Indonesia.

¹⁸⁸ Mohammad Hatta (1971), *op cit.*, hlm. 1-2.

¹⁸⁹ Edilius dan Sudasono, *op cit.*, hlm. 44.

¹⁹⁰ Wawancara dengan Nana Rukmana, Selasa, 27 Maret 2012.

BAB 5

KESIMPULAN

Koperasi merupakan perkumpulan yang terdiri dari orang-orang yang bekerjasama dalam berbagai usaha untuk mencapai perbaikan dan tingkat kehidupan yang layak dengan berdasarkan azas kekeluargaan dalam hubungan tolong menolong untuk kepentingan bersama. Sikap tolong menolong dan kerjasama sudah merupakan pembawaan masyarakat Indonesia, khususnya Tasikmalaya dalam menjalani kehidupan. Sikap bekerjasama merupakan dasar utama dalam pendirian koperasi, sehingga koperasi merupakan badan usaha paling cocok diterapkan dalam sistem perekonomian di Indonesia yang mengutamakan kepentingan bersama.

Adapun sejarah perkoperasian di Tasikmalaya tidak terlepas dari keinginan masyarakat Tasikmalaya untuk memperbaiki perekonomian mereka. Koperasi-koperasi di Tasikmalaya berdiri sesuai dengan lingkungan masyarakat Tasikmalaya. Pada umumnya masyarakat Tasikmalaya memiliki pekerjaan sebagai petani, pedagang dan buruh. Koperasi pun muncul sesuai dengan jenis pekerjaan masyarakat Tasikmalaya guna mendukung usaha mereka, sehingga mereka tidak kesulitan lagi dalam mendapatkan pinjaman modal usaha maupun bahan baku untuk usaha produksi mereka. Berdirilah PKKT yang memiliki usaha penggilingan beras, Koperasi Selamat yang menghimpun para pengusaha dan buruh sepatu Tasikmalaya dan Mitra Batik menjadi wadah bagi para pengusaha dan pengrajin Batik Tasikmalaya.

Perkembangan di Indonesia dan khususnya di Tasikmalaya, sejak sebelum mendapatkan kemerdekaan telah dipengaruhi oleh dua kekuatan yang tidak dapat dihilangkan. *Pertama*, awal perkembangan koperasi di Indonesia tidak dapat lepas dari peranan atau campur tangan pemerintah, seperti pejabat atau tokoh politik penting. Di Tasikmalaya dikenal Bupati Raden Aria Adipati Wiratanuningrat (1908-1937) yang berjasa dalam pembangunan Tasikmalaya, kemudian Gubernur Jawa Barat Sewaka, Rusli Rahim dari Jawatan Koperasi Pusat dan Patih Kartaatmadja yang ikut mendukung perkembangan koperasi di Tasikmalaya.

Kedua, kekuatan yang berpengaruh dalam mendorong berdirinya koperasi di Tasikmalaya adalah golongan kelas menengah pribumi. Seperti halnya para intelektual Budi Utomo dan para pedagang batik Jawa yang bergabung dalam Sarekat Dagang Islam (SDI) membentuk asosiasi koperasi dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang Cina dan menjadi kekuatan pengontrol terhadap pemerintah kolonial dan nilai-nilai *entrepreneurship* dalam arti sebenarnya, sehingga memunculkan semangat perjuangan ekonomi dan politik di lingkungan masyarakat.

Di Tasikmalaya, para pencetus dalam pendirian koperasi adalah dari golongan kelas menengah, antara lain ada dari para pengusaha, guru, dan tokoh pergerakan di Tasikmalaya. Hal tersebut dapat dilihat dalam pendirian Koperasi Mitra Batik yang terdiri dari golongan kelas menengah dengan berbagai latar belakang yang berbeda, seperti Enie sebagai pengusaha batik, Naseh sebagai orang pergerakan dan Sumiratmadja sebagai guru atau kepala sekolah di Tasikmalaya. Golongan kelas menengah inilah yang banyak berperan dalam menggerakkan koperasi di Tasikmalaya, sehingga memberikan harapan bagi masyarakat Tasikmalaya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Setelah Indonesia merdeka, perkoperasian di Tasikmalaya mendapatkan dukungan dari pemerintah sehingga Tasikmalaya dipilih menjadi tempat kongres Koperasi Indonesia Pertama pada tanggal 11-14 Juli 1947. Selain itu, lahirnya Hari Koperasi Indonesia terjadi pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya, tepatnya di Gedung Pusat Koperasi Kabupaten Tasikmalaya (PKKT) yang terletak di Jalan Ciamis. Dilahan tersebut juga berdiri tegak tugu atau monumen Hari Koperasi Indonesia 12 Juli 1947 sebagai tanda bahwa di Tasikmalaya pernah diadakan Kongres Koperasi Pertama yang berhasil mengumpulkan utusan-utusan dari berbagai wilayah di Indonesia yang berjuang dalam membangun perekonomian rakyat di saat kondisi sedang genting dalam menghadapi pasukan Belanda yang hendak melancarkan agresi militernya. Kongres Koperasi tersebut pun menjadi tanda perjuangan ekonomi bangsa Indonesia.

Relevansi koperasi dengan perkembangan ekonomi Tasikmalaya saat ini bahwa koperasi menjadi suatu badan usaha yang sangat berpengaruh dalam mengembangkan ekonomi masyarakat Tasikmalaya. Hal tersebut dapat diketahui dari kuantitas koperasi yang semakin banyak dari tahun ke tahun. Menurut data dari Dinas Koperasi Kota dan Kabupaten Tasikmalaya diketahui bahwa pada akhir tahun 2007 jumlah koperasi di Kota Tasikmalaya berjumlah 374 koperasi sampai akhir tahun 2009 mencapai 452 koperasi. Sementara itu, jumlah koperasi di Kabupaten Tasikmalaya sampai akhir tahun 2011 mencapai 675 koperasi, sehingga total dari penggabungan jumlah koperasi di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya mencapai di atas 1.000 koperasi.

Banyaknya koperasi yang berdiri di Tasikmalaya menggambarkan bahwa peranan koperasi sangat berarti bagi masyarakat Tasikmalaya dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, masyarakat Tasikmalaya masih mempercayakan usahanya dengan bergabung di koperasi sebagai badan usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama. Beberapa koperasi di Tasikmalaya pun mendapatkan reputasi yang baik di tingkat kota dan kabupaten maupun tingkat nasional, sehingga mendapatkan berbagai penghargaan dari pemerintah sebagai koperasi berprestasi dan teladan, seperti Koperasi Simpenan Pamengkeut Banda sebagai Koperasi Teladan Tingkat Nasional Jenis Simpan Pinjam Tahun 1993 sampai 1997 dan Koperasi Teladan Utama Tingkat Nasional Tahun 2001, 2002 dan 2003, serta Koperasi Simpan Pinjam Berprestasi Tingkat Kota Tasikmalaya Tahun 2008.

Latar belakang sejarah perkembangan koperasi di Tasikmalaya dengan diselenggarakannya Kongres Koperasi Indonesia pertama dan banyaknya koperasi yang berdiri di Tasikmalaya membuat Tasikmalaya dikenal sebagai daerah koperasi di Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari peranan pemerintah dan masyarakat Tasikmalaya yang bersama-sama membangun koperasi untuk memajukan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Tasikmalaya, terutama membantu masyarakat kecil yang membutuhkan pinjaman modal dan bahan baku untuk menjalankan usahanya, sehingga koperasi menjadi suatu badan usaha yang berdiri dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dalam mencapai usaha bersama.

Adapun relevansi koperasi dengan perekonomian rakyat bahwa koperasi merupakan perkumpulan atau badan usaha yang paling cocok dengan perekonomian rakyat Indonesia. Hal itu disebabkan koperasi menjunjung tinggi azas kekeluargaan dan kepentingan bersama yang merupakan pembawaan atau ciri khas dari sikap rakyat Indonesia pada umumnya dan Tasikmalaya pada khususnya. Hal ini senada dengan pemikiran dari Mohammad Hatta yang dirumuskan dalam UUD 1945 Pasal 33 mengenai demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kemakmuran bagi seluruh rakyat. Demokrasi ekonomi atau sekarang lebih dikenal dengan ekonomi kerakyatan memiliki peran dan kekuatan sebagai suatu strategi pembangunan karena dengan kegiatan ekonomi rakyat akan lebih menjamin nilai tambah ekonomi secara optimal yang dapat secara langsung diterima oleh rakyat. Selain itu, ekonomi kerakyatan dapat memberdayakan rakyat dan meningkatkan daya beli rakyat yang kemudian akan menjadi energi rakyat untuk lebih membangun dirinya sendiri.

Sementara itu, relevansi koperasi dengan perekonomian Indonesia saat ini bahwa Koperasi dalam perspektif normatif merupakan badan usaha yang sesuai dengan amanat salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Nilai-nilai khas perekonomian Indonesia dilembagakan secara formal dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 1 yang menerangkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Oleh karena itu, hendaknya koperasi mampu menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan roda perekonomian Indonesia. Pengelolaan koperasi Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai dasar yang terkandung dalam UUD 1945 seharusnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun kontribusi positif koperasi terhadap perekonomian nasional masih belum optimal. Keberadaan koperasi dalam perekonomian Indonesia akan berjalan jika ada korelasi yang baik dengan pemerintah sebagai penentu kebijakan ekonomi dan politik di Indonesia dan pihak swasta yang membantu dalam mengembangkan ekonomi rakyat di Indonesia. Hal ini diperlukan agar perekonomian Indonesia dapat menghadapi tantangan dalam persaingan ekonomi global, sehingga dapat mencegah dampak kapitalisme dan liberalisme yang dapat mematikan perekonomian rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

I. Arsip

Koleksi Arsip Kartografi Indonesia 1913-1946. No. 339. 'Tasikmalaja'. Jakarta: ANRI, 1944.

II. Dokumen yang diterbitkan

Arsip Nasional Republik Indonesia. *Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Barat)*. Jakarta: Penerbitan Sumber-sumber Sejarah Arsip Nasional Republik Indonesia, 1976.

Pengurus Pusat Koperasi Kabupaten Tasikmalaya (PKKT). *Sejarah Hari Koperasi 12 Juli 1947 di Tasikmalaya*. Tasikmalaya: PKKT.

Pengurus Pusat Koperasi Kabupaten Tasikmalaya (PKKT). *Sejarah Berdirinya Pusat Koperasi Kabupaten Tasikmalaya*. Tasikmalaya: PKKT, 2002.

III. Koran/Surat Kabar

Berita Indonesia, 29 Djoeli 1947. Tahoen Rep. II No. 348.

Priangan Tengah. No. 3-4. 12 Desember 1931. Tahoen ka-1.

Soeara Merdeka, 4 Djanuari 1947. Tahoen III.

Soeara Merdeka, 12 Djoeli 1947. Tahoen III.

IV. Wawancara

Enie, A. Basrah. (24 Maret 2011).

Hatta Swasono, Meutia. (16 Mei 2012)

Hilman. (20 Maret 2011 dan 05 Juni 2012).

Karto, Udin. (11 April 2012).

Kurnaedi, Ude. (2 Mei 2012).

Raksadiwangsa, Komar. (11 April 2012 dan 05 Juni 2012).

Rukmana, Nana. (24 Januari 2012, 27 Maret 2012 dan 05 Juni 2012).

V. Buku

- Anoraga, Pandji dan Ninik Widiyanti. *Dinamika Koperasi*. Cetakan keempat. Jakarta: PT Bina Adiaksara dan PT. Rineka Cipta, 2003.
- Bagun, Rikard (editor). *Seratus Tahun Bung Hatta*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.
- Baswir, Revrison. *Agenda Ekonomi Kerakyatan*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 1997.
- Dick, Howard, et al. *The Emergence of A National Economy (An Economic History of Indonesia, 1800–2000)*. New South Wales dan Honolulu: Allen & Unwin dan University of Hawai'i Press, 2002.
- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Kota Tasikmalaya. *Direktori Koperasi Kota Tasikmalaya Tahun 2010*. Tasikmalaya: Dinas KUKM Kota Tasikmalaya, 2010.
- Djoened, Marwati dan Nograho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Cetakan keenam. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Edilius dan Sudasono. *Koperasi dalam teori dan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Enie, A. Basrah. *Enie Sosok Pengusaha Batik Tasik (1906-1966)*. Bogor: A.Basrah Enie, 1995.
- Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah* (Nugroho Notosusanto, Penerjemah.), cetakan keempat. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.
- Hatta, Mohammad. *Meninjau Masalah Kooperasi*. Djakarta: P.T. Pembangunan, 1954.
- . *The Co-operative Movement in Indonesia*. New York: Cornell University Press, 1957.
- . *Membangun Kooperasi dan Kooperasi Membangun*. Cetakan pertama. Jakarta: Pusat Koperasi Pegawai Negeri Djakarta-Raja (PKPN), 1971.
- . *Pikiran-Pikiran dalam Bidang Ekonomi*. Jakarta: Yayasan Idayu, 1972.
- Lubis, Nina Herlina. *Sejarah Tatar Sunda Jilid II*. Bandung: CV. Satya Historika, 1956.
- . *Sejarah Kota-Kota Lama di Jawa Barat*. Bandung: Alqaprint, 2000.

- Kamaralsyah. *Tentang Pengertian Hal Organisasi Perkumpulan Ko-operasi*. Jakarta: J.B. Wolters-Groningen, 1954.
- Kamaralsyah, et al. *Panca Windu Gerakan Koperasi Indonesia (12 Juli 1947-1987)*. Jakarta: Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN), 1987.
- Munkner, Hans H. *Masa Depan Koperasi* (Djabaruddin Djohan, Penerjemah.). Jakarta: DEKOPIN, 1997.
- M.D., Sagimun. et al. *Indonesia Berkoperasi*. Cetakan ke-II. Djakarta: P.N. Balai Pustaka, 1965.
- Pengurus Badan Perencanaan dan pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Tasikmalaya. *Sejarah Kota Tasikmalaya*. Tasikmalaya: BAPPEDA, 2003.
- Pengurus Koperasi Simpanan Pamengkeut Banda (SPB). *Peringatan 50 TH. Koperasi Simpanan Pamengkeut Banda*. Tasikmalaya: SPB, 1983.
- Rasyad, Husni, Indriana dan Yuzri Suhud. *Selayang Pandang Gerakan Koperasi Indonesia*. Jakarta: DEKOPIN, 2007.
- Simorangkir, J.C.T dan B. Mang Reng Say, *Tentang dan Sekitar Undang-Undang Dasar 1945*. Cetakan kesebelas. Jakarta: Djembatan, 1987.
- Sunardjo, R. Unang, et al. *Hari Jadi Tasikmalaya*. Cetakan pertama. Tasikmalaya: Pemerintah Daerah Tingkat II Tasikmalaya, 1978.
- Surtama, Momo. *Sekitar Lahirnya Hari Koperasi Indonesia 12 Juli 1947 dan Kehadiran Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) beserta kegiatannya*. Tasikmalaya: DEKOPINDA Kabupaten Tasikmalaya, 2000.
- Sya, M. Ahman. *Bukit Sepuluh Ribu Tasikmalaya*, cetakan pertama. Tasikmalaya: CV. Gajah Poleng, 2004.
- Tim Penerbitan Buku Dokumenter. *Setengah Abad Koperasi Mitra Batik*. Tasikmalaya: Koperasi Mitra Batik, 1989.
- Tim Penyusun. *Album Emas 60 Tahun Koperasi Indonesia*. Jakarta: DEKOPIN, 2007.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Universitas Bung Hatta. *Pemikiran Pembangunan Bung Hatta*. kumpulan tulisan. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1995.

VI. Artikel

Bulkin, Farchan. 'Kapitalisme, Golongan Menengah dan Negara: Sebuah Catatan Penelitian'. *Prisma*. No.2, Februari 1984. Jakarta: LP3ES.

Djarcasie. 'Boemipoetra Hindia pada Zaman Doeloe dan Sekarang'. *Pelita Dagang*. No.10, 25 Agustus 1924. Pekalongan: Batikhandel M. Djarcasie & co.

Mudzakkir Amin, 'Pergulatan Pengusaha Santri di Tasikmalaya dan Kebijakan Ekonomi Pemerintah di Tingkat Lokal', *Jurnal Pesantren Ciganjur*, Edisi 04/Tahun II/2007.

Muhaimin, Yahya A. 'Politik, Pengusaha Nasional, dan Kelas Menengah'. *Prisma*. No.3, Maret 1984, Thn. XIII. Jakarta: LP3ES.

Saripudin, Didin dan Ahmad Ali Seman, 'Tradisi Merantau *Tukang Kiridit* dari Tasikmalaya', *Makalah Simposium Kebudayaan Indonesia-Malaysia (SKIM)*, Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 2007.

Sukotjo, Wahyu. 'Sejarah Perkembangan Permasalahan dan Peranan Koperasi.' *Prisma*, No. 6 Juli 1978. Tahun VII. Jakarta: LP3ES.

_____. 'Kain Batik, mendjadi Industrie Jang Penting di Indonesia'. *Pelita Dagang*. No. 10 25 Agustus 1924. Pekalongan: Batikhandel M. Djarcasie & co.

VII. Laporan Penelitian

Kartika, N., Widodo Nugrahanto dan Tanti Restiasih Skober. *Perkembangan Batik Tulis di Tasikmalaya*. Bandung: Laporan Penelitian Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran, 2008.

Masngudi, *Penelitian Tentang Sejarah Perkembangan Koperasi Di Indonesia*, Jakarta: Laporan Penelitian Badan Penelitian Pengembangan Koperasi, Departemen Koperasi, 1990.

Nugrahanto, Widyono, *et al.* *Perkreditan Rakyat di Tasikmalaya Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda dan Republik Indonesia (1900-2003)*. Bandung: Laporan Penelitian Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran, 2008.

VIII. Sumber elektronik

Sobarudin, Enjang. 'Tugu Koperasi'.

<http://www.kabar-priangan.com/news/detail/2073> diunduh pada Kamis, 12 April 2012, pukul 20:38 WIB.

_____. 'Dari Bank Priayi ke Bank Rakyat'.

<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1999/02/09/INT/mbm.19990209.INT9.3448.id.html> diunduh pada Selasa, 26 Juni 2012, pukul 19:11 WIB.

IX. Gambar dan Foto Lampiran

Bagun, Rikard (editor). *Seratus Tahun Bung Hatta*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002. 'Foto Bersama Mohammad Hatta dan Para Utusan Kongres Koperasi Pertama di Tasikmalaya'.

Buku Dokumenter Koperasi Mitra Batik. *Setengah Abad Koperasi Mitra Batik 17 Januari 1939*. Tasikmalaya: Koperasi Mitra Batik, 1989. 'Tokoh-tokoh Koperasi Mitra Batik'.

-----'. 'Pabrik Tenun Koperasi Mitra Batik'.

-----'. 'Para Pengrajin Batik Tasikmalaya'.

Dinas KUKM Kota Tasikmalaya, *Direktori Koperasi Kota Tasikmalaya Tahun 2010*, (Tasikmalaya: Dinas KUKM, 2010). 'Gedung Kantor Koperasi Simpenan Pamengkeut Banda'.

Enie, A. Basrah. *Enie Sosok Pengusaha Batik Tasik (1906-1966)*. Bogor: A. Basrah Enie, 1995. 'Salinan Akte Pertama Koperasi Mitra Batik Tahun 1941'.

Kamaralsyah, *et al.* *Panca Windu Gerakan Koperasi Indonesia (12 Juli 1947-1987)*. Jakarta: DEKOPIN, 1987. 'Akte Pendirian Koperasi Mitra Batik Tahun 1941 (Penulisan kembali oleh Tim Penyusun Dokumenter Koperasi Mitra Batik)'.

-----'. 'Monumen Kongres Koperasi Indonesia Pertama di Tasikmalaya'.

-----'. 'Gedung PKKT: Tempat Kongres Koperasi Indonesia Pertama'.

-----'. 'Foto Niti Sumantri: Ketua Kongres Koperasi Indonesia Pertama'.

Koleksi Arsip Kartografi Indonesia 1913-1946. No. 339. *Tasikmalaja*. Jakarta: ANRI. 'Peta Topografi Tasikmalaya Tahun 1944'.

Koleksi Foto Pengurus Simpenan Pameungkeut. 'Raden Kosim Danumihardja'.

Koleksi Pribadi A. Basrah Enie. 'Akta Pendirian Koperasi Mitra Batik yang asli'.

-----, 'Kantor Koperasi Mitra Batik Sementara'.

-----, 'Kantor Tetap Koperasi Mitra Batik (Jalan Ciawi No. 17)'.

-----, 'Surjo Argawisastra'.

Koleksi Pribadi Tahun 2012. 'Gedung Kantor Koperasi Mitra Batik'.

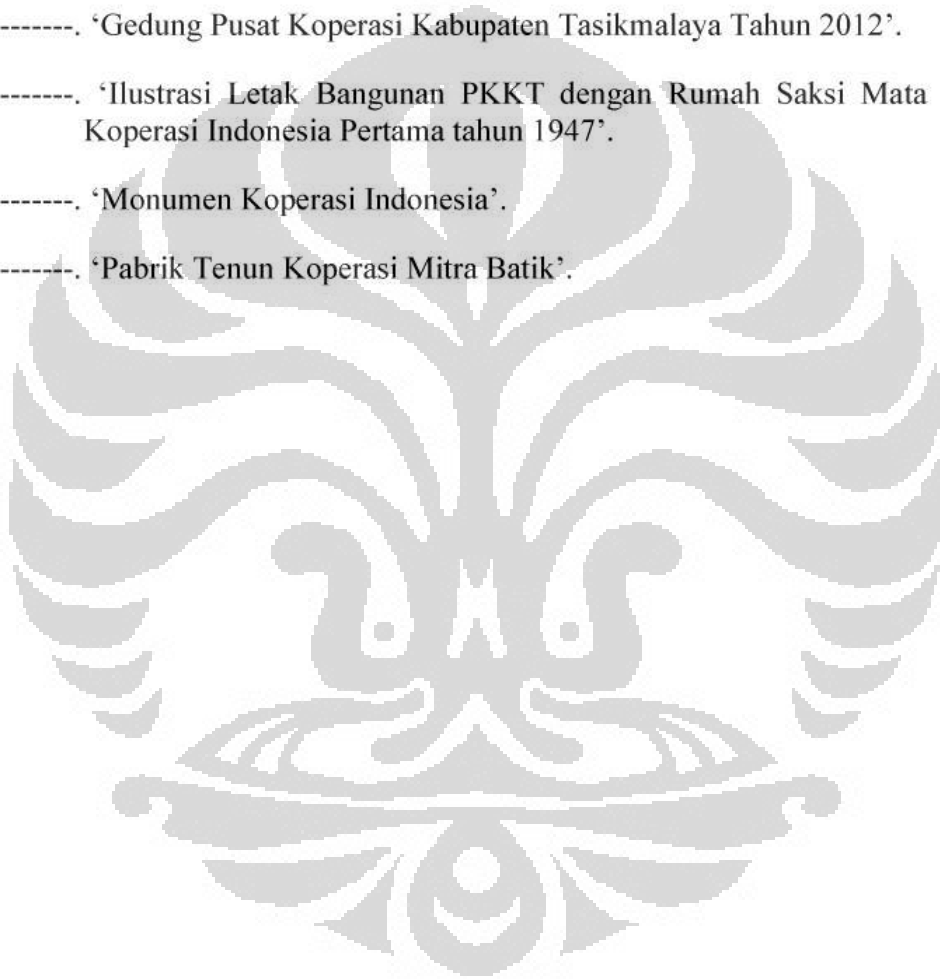
-----, 'Gedung Kantor Koperasi Selamat'.

-----, 'Gedung Pusat Koperasi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012'.

-----, 'Ilustrasi Letak Bangunan PKKT dengan Rumah Saksi Mata Kongres Koperasi Indonesia Pertama tahun 1947'.

-----, 'Monumen Koperasi Indonesia'.

-----, 'Pabrik Tenun Koperasi Mitra Batik'.



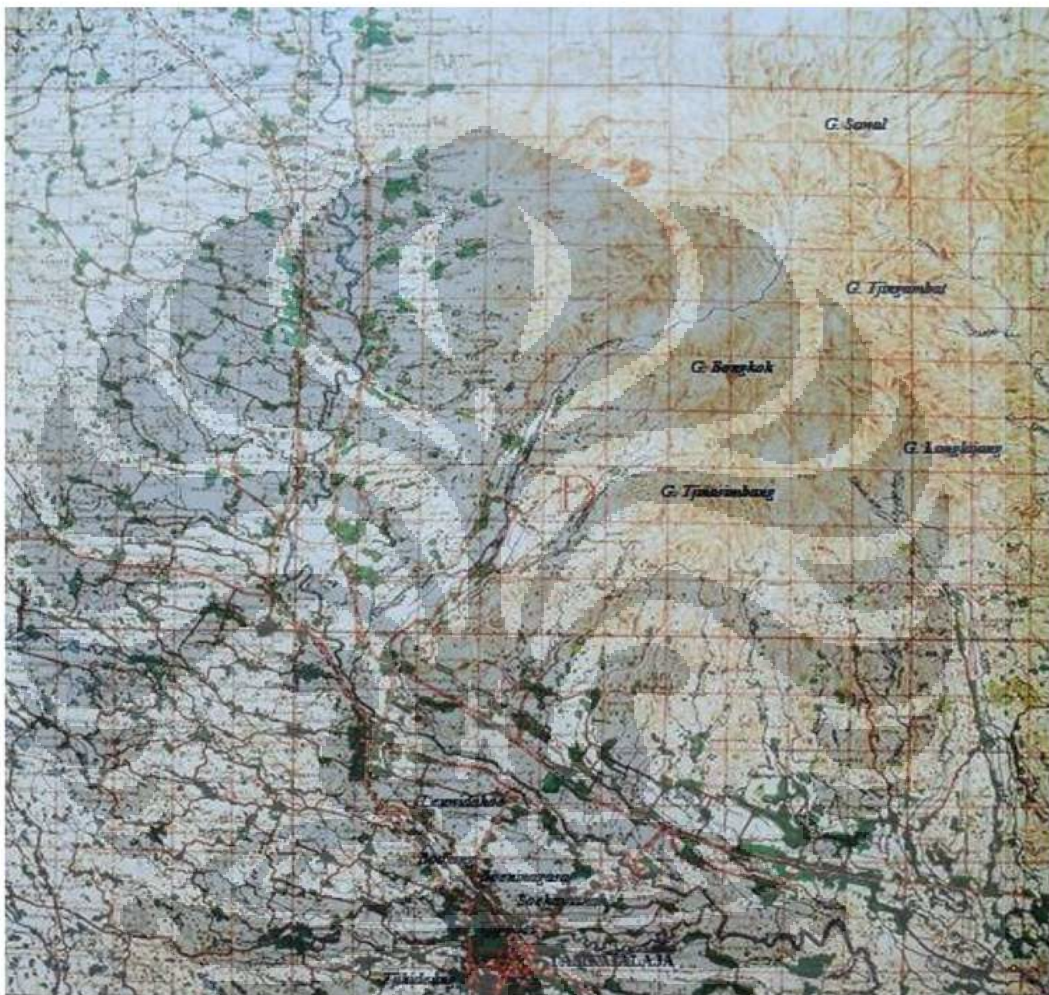
INDEKS

- Ahmad Atmadja, 35**
A.D. Dunga, 51, 52
Badri, 40, 41, 42
Bandung, 3, 6, 7, 11, 17, 19, 30,
48, 49, 51, 54
Banjar, 14, 17
Budi Utomo, 24, 26, 64
Ciamis, 13, 14, 17, 24, 45, 49, 50,
51
Ciparay, 30, 48, 49, 50, 51
De Wolff van Westerode, 23
Depresi Ekonomi, 5, 11, 15, 16,
31, 34
Dion, 2, 39, 40, 41, 42, 43
Jawatan Koperasi, 26, 27, 30,
42, 50, 53, 55, 61, 63
Ekonomi rakyat, 3, 4, 5, 12, 36,
37, 47, 55, 56, 61, 66
Enie, 2, 7, 10, 30, 39, 40, 41, 42,
43, 45, 46, 64
Garut, 3, 6, 7, 13, 17, 48, 49, 50,
51
Hindia Belanda, 13, 15, 16, 23,
24, 34, 44, 50, 57
Hari Koperasi, 22, 58, 59, 64
***Hulp en Spaar Bank*, 23**
***Indonesische Studie Club*, 26**
Jalan Ciamis, 3, 22, 53, 54, 64
Ciawi, 45
Dewi Sartika, 53
Gudang Jero, 45
Gunung Ladu, 51
Kemasan, 39
Manonjaya, 22
Otto Iskandardinata, 22
Paseh, 33
J.H. Boeke 25
Jepang 11, 16, 18, 19, 20, 21, 27,
36, 37, 44, 45, 50, 57
Kain Mori 39, 40, 42, 43, 47
Kartadibrata 40, 41
Kartasasmita 40, 41
Kongres Koperasi 3, 4, 5, 6, 8, 9,
10, 12, 22, 30, 48, *passim*
Koperasi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, *passim*
Koperasi Kredit Pusat, 17
Simpanan SPB, 3, 9, 10, 34, 35,
36, 37
Selamet, 3, 7, 11, 27, 31, 32, 33,
34, 47, 63
Mitra Batik, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 16,
27, 30, 31, 32, 37, *passim*
Mitra Payung, 31
Paguyuban Guru Bantu 31
Paguyuban Pasundan Indonesia,
31
Pangrojong, 31, 41
Rukun Usaha Pamili 31
Warga Setia 31
Kosim Danumirardja 34, 35
***Kumiai*, 20**
Mohammad Hatta, 2, 7, 11, 27, 28, 29, 52,
53, 56, 62, 66
Naseh, 2, 30, 39, 40, 41, 44, 46, 64
Niti Sumantri, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 59
Notokusumo, 56, 57
Omo Suharma, 32, 33
***Onderneming*, 13**
Pemberontakan Sukamanah, 20
PKKT, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 22, 42, 52, 53, 54,
59, 61, 63, 64
Raiffesien, 23
Raden Aria Wiraatmadja, 23
Rapat Bandung Selatan, 49
Sarekat Dagang Islam, 24, 64
Schulze-Delitzsch, 23
Sewaka, 22, 20, 55, 56, 63
Koran *Soeara Merdeka*, 8, 10, 55
Soeria Atmadja, 53, 56
Sukapura, 13, 14, 15, 17, 18, 21
Sumiratmadja, 30, 39, 40, 41, 42, 46, 64
Sunarya, 17, 18, 21, 22
Surjo Argawisastra, 36, 37
SOKRI, 58
Undang-Undang Agraria, 13
***White cambrics*, 3, 16, 39, 40, 42, 43**
Wiradiputra, 17, 18, 21
Wiratanuningrat, 15, 17, 21, 30, 63
Wiranatakusumah, 17
Zaenal Mustofa, 20

LAMPIRAN

Lampiran 1

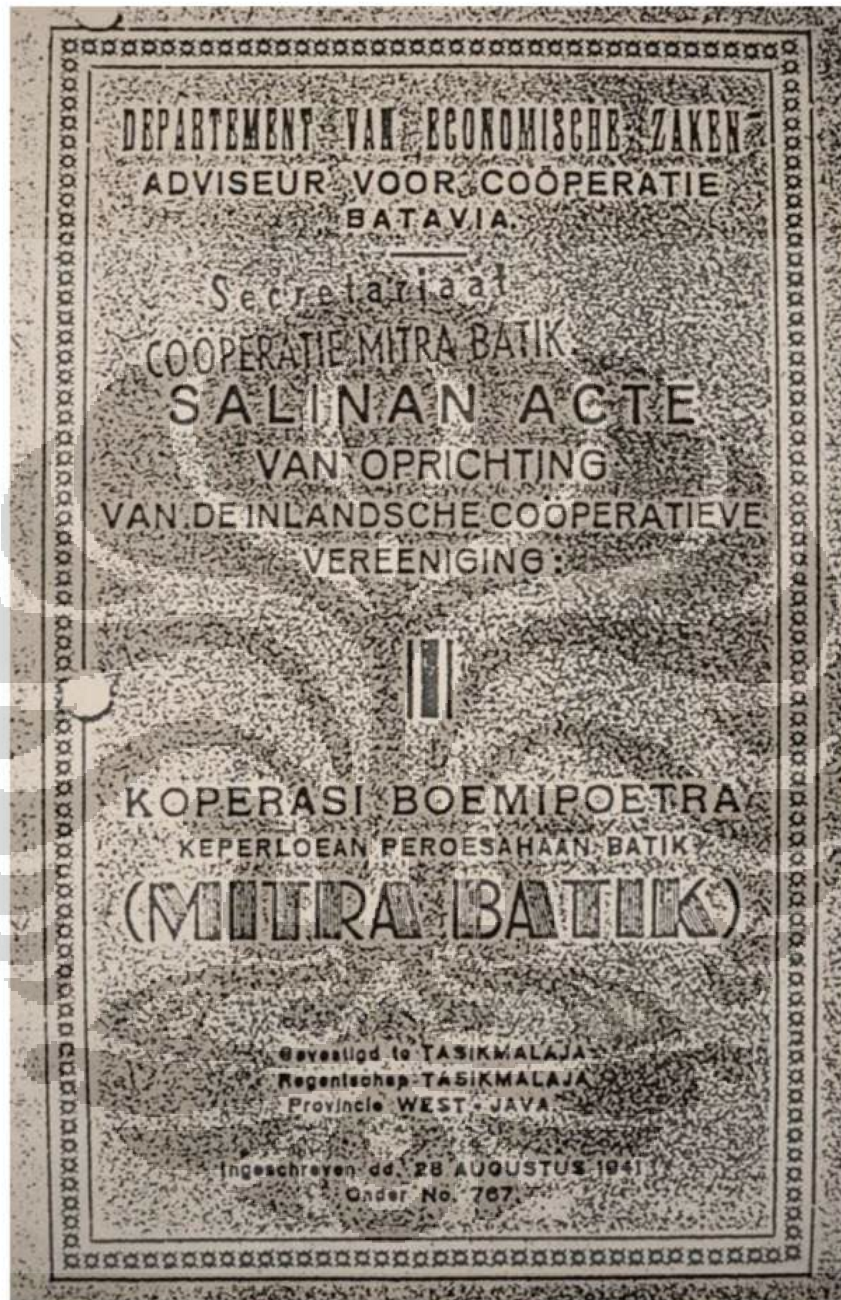
Peta Topografi Tasikmalaya Tahun 1944



Daerah Tasikmalaya bagian Barat dan Selatan umumnya berwarna hijau yang menunjukkan banyak perkampungan (tempat tinggal) dan warna coklat kebiru-biruan menunjukkan daerah pertanian sawah basah (*wet rice field*), sehingga mayoritas masyarakat Tasikmalaya pekerjaannya bercocok tanam padi. Sementara itu, bagian Utara dan Timur Tasikmalaya umumnya berwarna coklat menunjukkan daerah pegunungan dan tanah berbatu, sebagian bekerja sebagai petani irigasi (*irrigated upland rice field*), pekebun, pengrajin, maupun menjadi buruh ke pusat daerah.

Sumber: Koleksi Arsip Kartografi Indonesia 1913-1946. No. 339. 'Tasikmalaja'. Jakarta: ANRI.

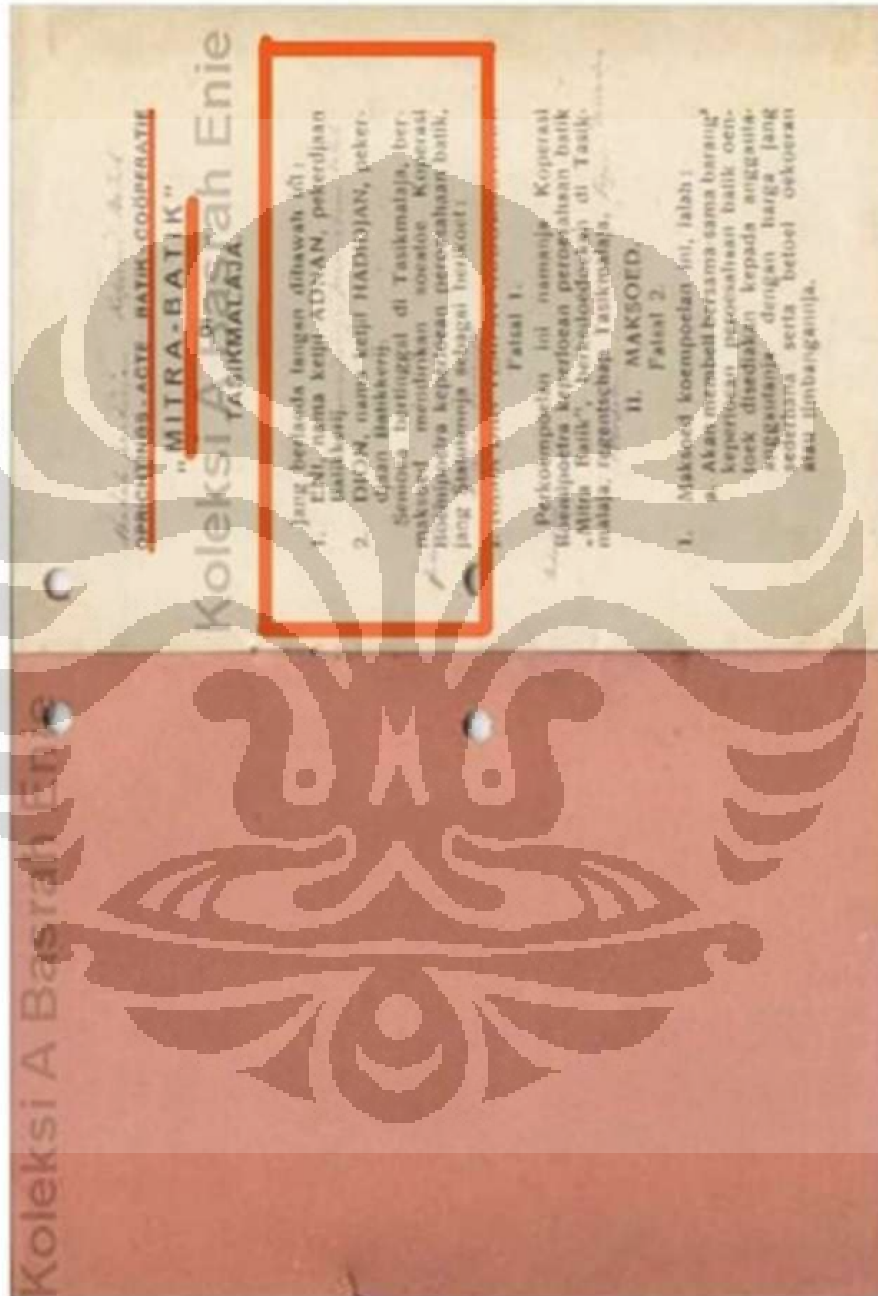
Salinan Akte Pertama Koperasi Mitra Batik Tahun 1941



Salinan Akte tersebut menjadi bukti bahwa Koperasi Mitra Batik resmi terdaftar di Pemerintahan Hindia Belanda sebagai koperasi bumiputra yang menjadi wadah atau badan usaha bagi para pengrajin batik Tasikmalaya dalam menyediakan bahan-bahan keperluan batik.

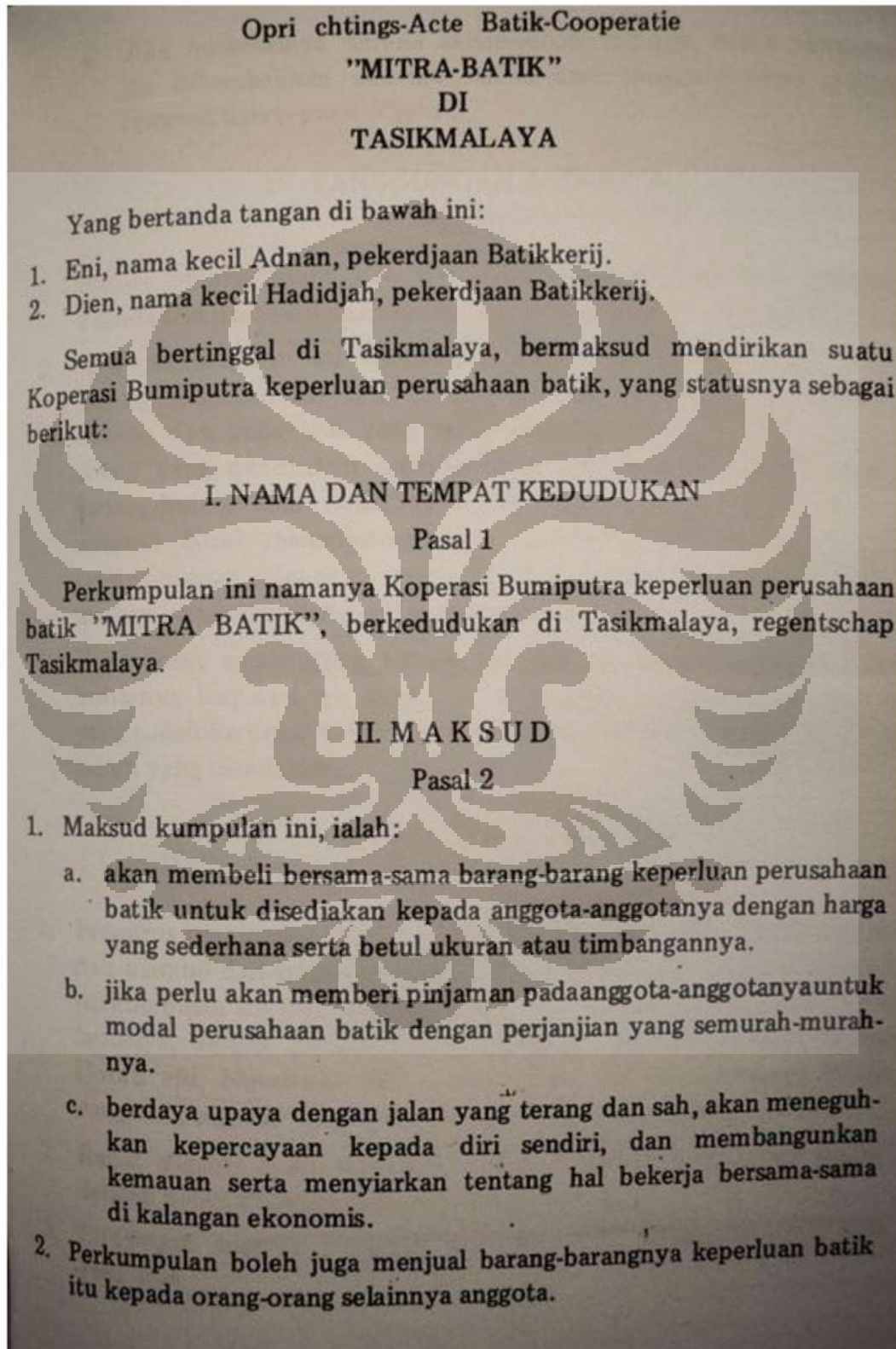
Sumber: A. Basrah Enie, *Enie Sosok Pengusaha Batik Tasik (1906-1966)*, (Bogor: A.Basrah Enie, 1995), hlm. 19.

Akte Pendirian Koperasi Mitra Batik yang Asli



Sumber: Koleksi Pribadi A. Basrah Enie

**Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Koperasi Mitra Batik
(Penulisan kembali oleh Tim Penyusun Dokumenter Koperasi Mitra Batik)**



III. HAL MENJADI ANGGOTA

Pasal 3

1. Yang diterima menjadi anggota perkumpulan Koperasi ini hanyalah orang-orang Bumiputra penduduk kota Tasikmalaya yang mengusahakan batikkerij kecuali orang-orang yang mendirikan perkumpulan ini dan waktu sekarang masih menjadi anggota.
2. Mereka yang sama menyatakan mendirikan dan yang sudah masuk menjadi anggota perkumpulan ini, harus tertulis dalam daftar.
3. Hak menjadi anggota itu sekali-kali tidak boleh diserahkan kepada orang lain.
4. Jika seseorang telah menjadi anggota, maka tidaklah ia boleh menjadi anggota pada Koperasi lain yang semacam itu.
5. Permintaan menjadi anggota harus dengan surat, sedang pengurus yang memutuskan.
Tentang permintaan yang ditolak oleh pengurus, maka peminta menjadi anggota itu, boleh minta pertimbangannya rapat anggota umum.

Pasal 4

1. Hak menjadi anggota itu hilang:
 - a. sebab meninggal dunia.
 - b. karena permintaan berhenti sendiri.
 - c. sebab diberhentikan oleh pengurus, karena ia tidak mempunyai lagi syarat-syarat untuk menjadi anggota.
 - d. karena dipecat oleh pengurus sebab tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota dan banyak melanggar peraturan perkumpulan, terutama dalam hal keuangan atau dengan sengaja berbuat sesuatu yang merugikan dan mendatangkan keburukan bagi perkumpulan itu.
2. Anggota yang dipecat ini boleh minta pertimbangan dan putusan dari rapat anggota umum.
3. Hilangnya hak menjadi anggota itu baru sah, jika ada catatannya dalam daftar (register) perkumpulan Koperasi itu.
Uang simpanan dari anggota yang berhenti itu:

- a. Jika berhentinya karena sebab-sebab lainnya, maka simpanan itu dikembalikan sesudah bebas dari tanggungannya sebagai tersebut dalam pasal 5 ayat 3.

IV. TANGGUNGAN ANGGOTA

Pasal 5

1. Semua hutang-hutang dan perjanjian yang dibikin oleh Koperasi kepada lain orang itu ditanggung bersama-sama oleh segenap anggota.
2. Jika perkumpulan ini dibubarkan dan kelak ternyata, bahwa kekayaan Koperasi ini tidak cukup untuk melunasi segala hutang-hutang dan perjanjian yang telah dibikin, maka terhadap kepada orang yang ditentukan membereskan dan membersihkan sekalian hutang-hutang dan kekurangan itu (vereeffenaar), maka sekalian anggota harus menanggung akan membayar kekurangannya itu, masing-masing menurut pertimbangan banyak sedikitnya orang urunan. (naar evenredigheid van de aandelen).
3. Yang turut menanggung hutang itu segenap anggota yang sewaktu bubarnya Koperasi itu masih tetap menjadi anggota dan sekalian yang sudah berhenti menjadi anggota pada jalannya tahun atau dalam tahun yang mendahului.

V. PENGURUS

Pasal 6

1. Pengurus perkumpulan ini terjadi sekurang-kurangnya dari 5 anggota dan diambil dari anggota perkumpulan tersebut oleh anggota-anggota perkumpulan itu juga, dengan suara yang terbanyak buat dua tahun lamanya, dengan persetujuannya Adviseur voor de Cooperatie dan Hoofd afd. Nijverheid dari Departement van Economische Zaken Anggota pengurus yang baru saja berhenti, boleh dipilih kembali.
2. Rapat anggota boleh memperhentikan pengurus pada setiap waktu, dengan persetujuannya seperti tersebut ayat 1.
3. Lowongan anggota pengurus itu harus diisi selekas-lekasnya oleh Pengurus.

Pasal 7

1. Pengurus mewakili perkumpulan, di dalam dan di luar hukum tetapi dalam beberapa hal bolehlah mereka itu memberi kuasa kepada salah seorang anggota atau kepada orang yang mengurus pekerjaan sehari-harinya, atau advocaat-perkumpulan, untuk mewakili perkumpulan itu.
2. Tiap-tiap anggota-pengurus harus mengusahakan kebbaikannya perkumpulan dan menjaga keselamatannya; dan segala kerusakan atau kerugian yang terjadi karena kesalahan anggota-pengurus itu ditanggung oleh yang kesalahan itu.
Kecuali jika orang itu dapat menerangkan beserta alasan dan bukti, bahwa kerugian atau kerusakan itu tak dapat dihindarkan lagi, sekalipun hal itu sudah dijaga baik-baik dan diikhtiarkan sesungguhnya, maka bebaslah ia dari tuntutan sebagai yang tersebut itu.
3. Terhadap orang lain, maka yang berlaku lid pengurus, ialah mereka yang namanya tertulis selaku itu dalam daftar perkumpulan ini.

VI. URUSAN BUKU

Pasal 8

1. Urusan buku-buku perkumpulan ini dikerjakan menurut contoh-contoh dan petunjuk yang diberikan oleh Adviseur de Cooperatie atau wakilnya yang sah.
2. Apabila menurut pertimbangannya rapat anggota tak ada seorang juga daripada anggota yang banyak itu sanggup memelihara dan mengerjakan urusan buku itu dengan tertib, rapi dan beres, maka pekerjaan itu boleh diserahkan kepada seorang boekhouder dengan persetujuannya Adviseur voor de Cooperatie.

VII. PITUWAS BAGI PENGURUS

Pasal 9

1. Pituwas kepada pengurus haruslah ditetapkan oleh rapat-anggota dari perkumpulan itu, dengan mufakatnya. Adviseur voor de Cooperatie.

Pasal 10

1. Gaji-gaji dan prosen-tahunan kepada semua pegawai Koperasi itu ditetapkan juga oleh rapat-anggota

VIII. TUZICHT DAN CONTROLE

Pasal 11

1. Perkumpulan Koperasi ini berlindung di bawah pengawasannya Adviseur voor de Cooperatie atau wakilnya yang sah.
2. Controle pada buku-buku Koperasi ini dilakukan dan diatur menurut petunjuk dari Adviseur tersebut di atas.

Pasal 12

1. Pengurus perkumpulan memberi kesempatan kepada ambtenaar-ambtenaar tersebut dalam pasal 11, dan kepada controle voerder (orang yang menjalankan) untuk memeriksa pekerjaan buku-buku, rekening-rekening serta surat-surat dan orang kepunyaan Koperasi itu.
2. Ambtenaar itu boleh minta diadakan rapat pengurus atau rapat anggota umum, serta boleh turut merencanakan agenda rapat itu, dan boleh hadir juga di dalamnya dan turut berbicara.
3. Mereka itu diwajibkan merahasiakan benar-benar segala hasil pendapatannya pemeriksaan dan segala sesuatu yang dianggap rahasia bagi Koperasi itu, terhadap orang lain.

IX. KEADAAN TERBUKA BAGI UMUM

Pasal 13

1. Pada waktu kantor perkumpulan itu dibuka, maka tiap-tiap orang boleh melihat akte pendirian dan perubahan-perubahan statuten.
2. Tiap-tiap orang yang berkepentingan boleh membaca statuten Koperasi dan balans tahunan serta rencana-rencana pemeriksaan.

X. MODAL PERUSAHAAN

Pasal 14

1. Modal perusahaan dari perkumpulan ini terjadi dari uang simpanan

Lanjutan

dari anggota, uang deposito kepunyaan anggota atau orang lain, pinjaman-pinjaman, reserve-fonds dan lain-lain.

2. Rapat umum menentukan berapa banyaknya uang yang boleh disimpan dalam Kas kumpulan itu dan kelebihanannya uang simpanan itu harus dengan lekas oleh sedikitnya 2 orang anggota pengurus disimpan atas nama perkumpulannya itu pada Volks-Credietbank, Postspaarbank atau pada Bank lain, dengan mufakatnya Adviseur voor de Cooperatie.
3. Uang simpanan kumpulan yang ada pada Bank itu tidak boleh diambil kembali, kalau tidak dengan kwitansi yang ditandatangani oleh 2 orang anggota pengurus itu.

XI. AZAS PERUSAHAAN

Pasal 15

1. Dari barang-barang keperluan perusahaan batik yang dijual kepada anggota, harganya ditetapkan oleh pengurus.
2. Penjualan itu boleh dilakukan dengan jalan kredit kepada anggota-anggotanya, dan melulu kontan kepada yang bukan anggota.
3. Adapun tentang caranya dan lamanya tempo pembayaran diatur oleh pengurus.

XII. TAHUN BUKU

Pasal 16

Tahun buku perkumpulan ini dimulai dari tanggal 1 Januari sampai pada tanggal 31 Desember.

XIII. RAPAT ANGGOTA

Pasal 17

1. Rapat anggota umum sewaktu-waktu boleh diadakan di mana dirasa perlu oleh pengurus atau atas usulnya anggota dan paling sedikit 3 bulan sekali.
2. Putusan rapat anggota, baru dianggap sah kalau putusan itu diambil dalam rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlahnya semua anggota, dengan suara yang terbanyak.

3. Kalau rapat anggota tak dapat dilangsungkan karena jumlahnya yang hadir tak cukup, maka haruslah diadakan lagi yang keduanya. Rapat yang kedua ini diakui sah dan boleh mengambil putusan dengan zonder memandang banyak sedikitnya anggota yang hadir, asal suara yang terbanyak mufakat. Antara rapat yang pertama dan rapat yang kedua itu haruslah ada temponya 3 hari sedikitnya, dan surat undangan harus sudah disiarkan 3 hari sebelumnya rapat itu berlaku.
4. Untuk membubarkan perkumpulan itu atau untuk mengubah bunyinya statuten, maka haruslah diadakan rapat yang tersendiri dan sedikitnya harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlahnya anggota semua, dan dimufakati oleh $\frac{2}{3}$ dari anggota yang hadir itu.
5. Dalam rapat anggota, tiap-tiap anggota mempunyai satu suara. Anggota yang tidak hadir tidak boleh diwakili oleh orang lain. Kalau pada waktunya hendak memutuskan sesuatu usul, maka suara yang dan yang tidak mufakat itu sama banyaknya, usul itu ditiadakan, jika saja akan memutuskan perkara benda; dan jika usul itu penting atau mengenai persennya, maka diputuskanlah dengan diundi.
6. Semua putusan-putusan rapat anggota yang sah itu wajib diturut oleh segenap anggota.
7. Semua putusan-putusan itu harus dituliskan di atas sebuah daftar yang harus ditandatangani oleh anggota pengurus yang hadir dalam rapat itu.

XIV. SISA PERUSAHAAN

Pasal 18

1. Sisa perusahaan yang terdapat pada tiap-tiap tahun harus dibagi sebagai di bawah ini:
 - a. 25% untuk reserve-fonds.
 - b. 15% guna sociaal-fonds MITRA BATIK.
 - c. 60% dibagi kepada segenap anggota Koperasi. Yang 30% dibagi menurut besar kecilnya simpanan masing-masing dan yang 30% lagi dibagi menurut besar kecilnya pembelian anggota kepada Koperasinya.

2. Kalau kumpulan ini dibubarkan, maka sekalian kelebihan harta-benda sesudahnya diambil untuk melunasi sekalian hutang-hutang kumpulan, maka akan digunakan menurut putusannya rapat anggota akan tetapi tidak boleh dibagikan kepada anggota.

XV. HAL PERSELISIHAN

Pasal 19

1. Pengurus kumpulan ini haruslah senantiasa berusaha supaya segala sesuatu yang bisa mendatangkan perselisihan antara anggota atau gaduh di dalam kumpulan, dijauhkan dan dilenyapkan.
2. Perselisihan yang hanya mengenai kepentingan urusan dalamnya koperasi atau perselisihan antara anggota dengan anggota, hendaklah diselesaikan dengan aman dan tertib di dalam rapat anggota, jika usaha pengurusnya sendiri itu tidak berhasil baik. Dalam hal yang demikian itu, maka orang harus cakap memisahkan antara urusan persoonlijk dan zakelijk menimbangannya harus pula dengan seadil-adilnya, tidak berat sebelah.

XVI. HAL MEMBUBARKAN PERKUMPULAN

Pasal 20

1. Kalau kumpulan ini dibubarkan, baik atas permintaan rapat anggota atau dengan kehendaknya Adviseur voor de Cooperatie, maka kumpulan itu hanyalah tinggal hidup selama perkaranya sedang diurus dan diselesaikan.
2. Jika perlu atas kemauannya rapat anggota atau Adviseur voor de Cooperatie itu, boleh mengangkat seorang pegawai penyelidikan dan kepada pegawai ini jatuhlah segala hak pengurus dan hak anggota dan lagi ia berhak:
 - a. memanggil segala anggota dan bekas anggota, baik seseorang ataupun bersama-sama di dalam sesuatu rapat.
 - b. menetapkan tanggungannya satu-satunya atau bekas anggota kumpulan itu yang harus dibayarnya.
 - c. menetapkan siapa-siapa yang harus menanggung ongkos penyelidikan dan penyelesaian itu dan berapa bagiannya tiap tiap orang atau bekas anggota itu.

Lanjutan

- d. kalau kumpulan masih mempunyai kelebihan uang atau kekayaan maka haruslah digunakan untuk sesuatu maksud yang terlebih dulu harus diputuskan dalam rapat anggota. Buku-buku dan arsip kumpulan itu harus digunakan menurut jalan yang sebaik-baiknya.

XVII. PENGUMUMAN STATUTEN

Pasal 21

Pengurus perkumpulan ini berusaha supaya statuten ini dimengerti dan diketahui oleh segenap anggota, agar kelak tak ada seorangpun yang akan berkata, belum mengerti atau tidak mengetahui tentang bunyinya statuten ini, dengan menyatakan dan menyiarkan statuten ini kepada segenap anggota dengan percuma.

Demikianlah sudah ditetapkan oleh kami yang mendirikan yang tersebut, di Tasikmalaya pada tanggal 20 Pebruari 1941.

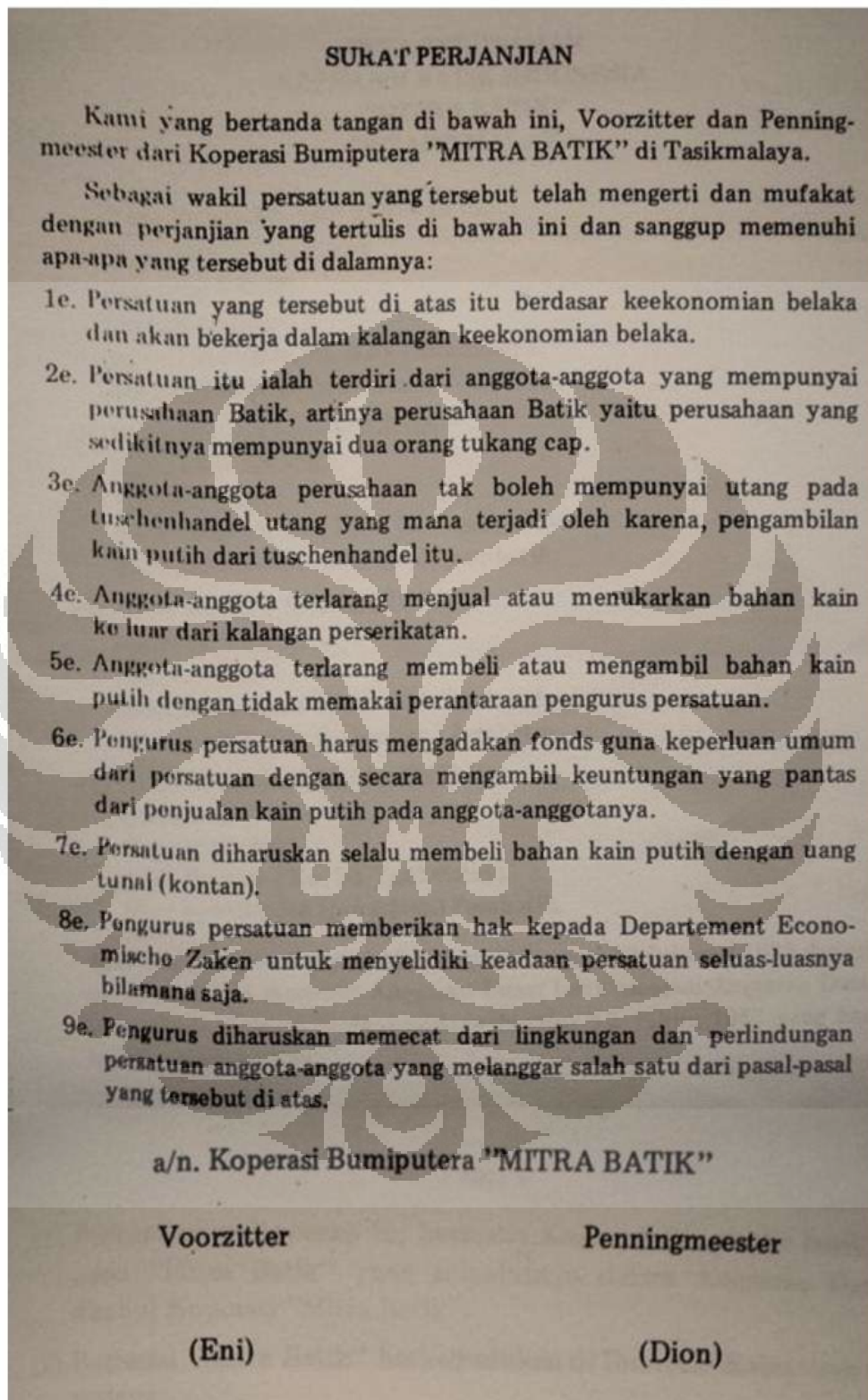
1.

(Eni)

2.

(Dion)

Lanjutan



Sumber: Tim Penerbitan Buku Dokumenter Koperasi Mitra Batik, *Setengah Abad Koperasi Mitra Batik 17 Januari 1939*, (Tasikmalaya: Koperasi Mitra Batik, 1989), 364-374.

Kantor Pertama (Sementara) Koperasi Mitra Batik (1938)



Kantor pertama (sementara) Koperasi Mitra Batik (1938). Kantor ini letaknya di salah satu rumah Enie, Jalan Gudangjero III No. 23. Sumber: Koleksi A. Basrah Enie

Kantor Tetap Koperasi Mitra Batik (Jalan Ciawi 17)



Kantor ini merupakan kantor permanen yang sangat bersejarah karena dari sinilah pengurus bersama-sama anggota dan karyawan mengerjakan KMB sehingga menjadi KOPERASINYA TUKANG BATIK yang besar pada tahun 1940-1950-an. Pada foto ini ada Enie, Dion, pengurus, karyawan dan anggota sedang berfoto. Sumber: Koleksi A. Basrah Enie

Tokoh-Tokoh Koperasi Mitra Batik Tahun 1939



ENIE
Ketua Koperasi Mitra Batik Pertama
Pengusaha Batik



DION
Pengurus Koperasi Mitra Batik
Pengusaha Batik



NASEH
Pengurus Koperasi Mitra Batik
Pengusaha Tegel dan orang pergerakan

Lanjutan



SUMIRATMADJA
Pengurus Koperasi Mitra Batik
Guru Sekolah



BADRI
Pengurus Koperasi Mitra Batik
Pengusaha Batik



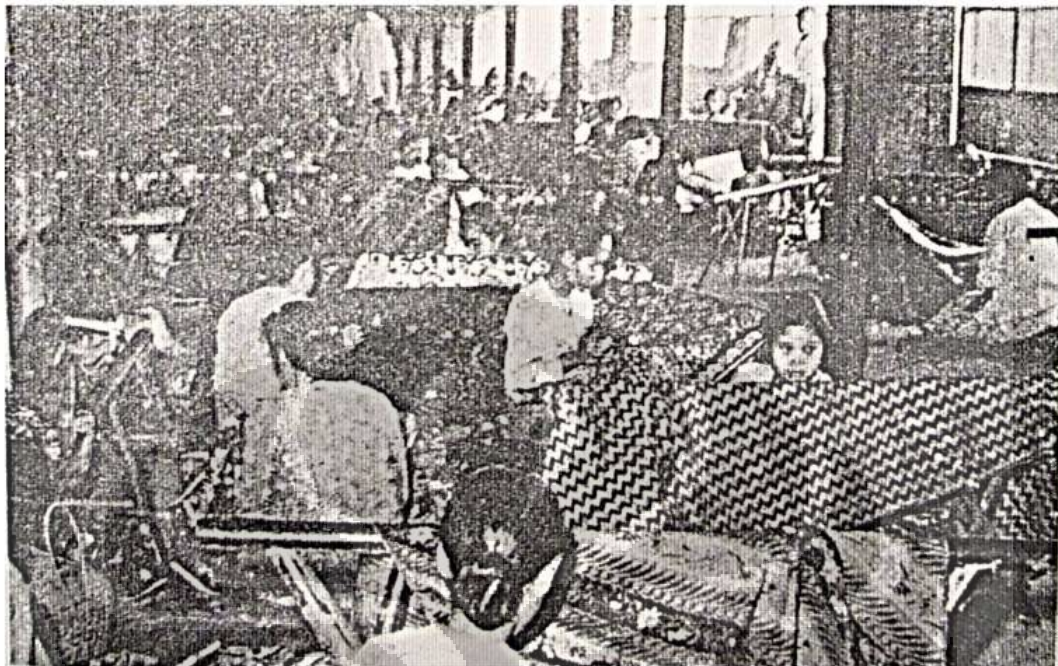
ENDONG
Pengurus Koperasi Mitra Batik
Pengusaha Batik



KARTADIBRATA
Anggota Panitia Sembilan
Koperasi Mitra Batik

Sumber: Buku Dokumenter Koperasi Mitra Batik, *Setengah Abad Koperasi Mitra Batik 17 Januari 1939*, (Tasikmalaya: Koperasi Mitra Batik, 1989), hlm. 19-21.

Para Pengrajin Batik Tasikmalaya



Pemandangan di salah satu perusahaan batik tulis Tasikan. Rata-rata pengrajin batik tulis berusia senja karena diperlukan keahlian dalam membatik untuk menghasilkan corak batik yang berseni dan bernilai tinggi.

Sumber: Tim Penerbitan Buku Dokumenter Koperasi Mitra Batik, *Setengah Abad Koperasi Mitra Batik 17 Januari 1939*, (Tasikmalaya: Koperasi Mitra Batik, 1989), hlm. 43.

Tokoh-Tokoh Koperasi Simpanan Pamengkeut Banda

Raden Kosim Danumihardja:
Pendiri Koperasi Simpanan Pameungkeut Banda
(1933-1939)



Surjo Argawisastra:
Ketua Koperasi Simpanan Pamengkeut Banda ke-2
(1939-1976)

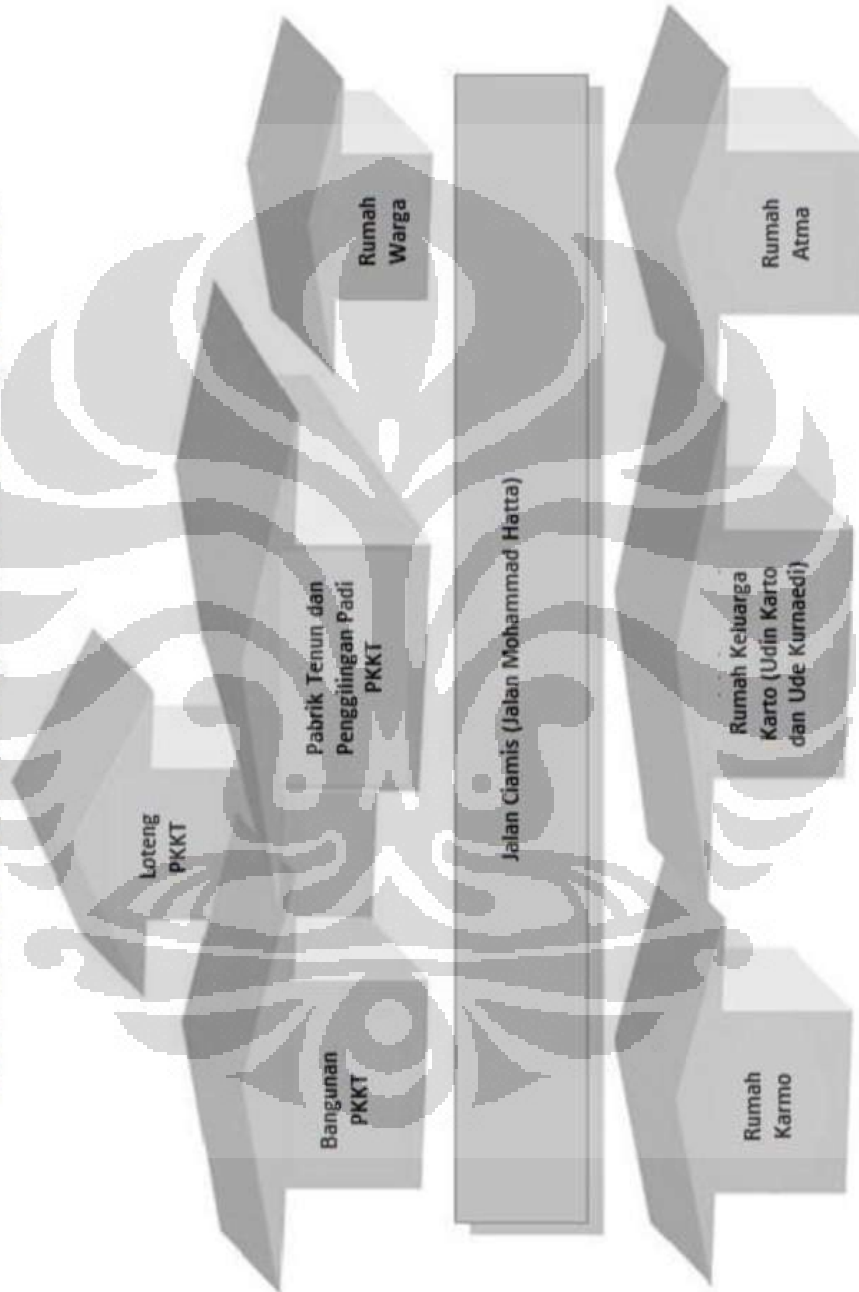
Sumber: Koleksi Pribadi Koperasi Simpanan Pameungkeut Banda (SPB).

Foto Bersama Mohammad Hatta dengan Para Utusan
Kongres Koperasi Indonesia Pertama di Tasikmalaya



Sumber: Rikard Bagun (editor), *Seratus Tahun Bung Hatta*
(Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), hlm. 199.

**Ilustrasi Letak Bangunan Pusat Koperasi Kabupaten Tasikmalaya
dan Rumah Saksi Mata Kongres Koperasi Indonesia Pertama pada tahun 1947**



Sumber: Koleksi Pribadi Tahun 2012 dari hasil wawancara dengan Udin Karto dan Ude Kurnaedi pada tanggal 2 Mei 2012

Kongres Koperasi: Koperasi Hasil Kecerdasan Peradaban

Koperasi boekan penahan kapitalisme

Tapi hasil ketjerdasan peradaban

TASIKMALAJA, 12 Djoei.

DENGAN dikoendjoengi oleh 116 orang oetoesah dan pe-
nindjau koperasi ra'jat seloeroeh Djawa dan Madoera,
ketjoeali dari Banten, tadi malam bertempat digeoeeng Poe-
sat Koperasi Tasikmalaja, Djl. Tjiamis, diadakan malam per-
kenalan sebagai atjara pertama (pembeekaan) oari konfe-
rensi Koperasi Ra'jat seloeroeh Djawa dan Madoera jang
pertama itoe.

• Setelah pertemoean perkena-
lan kira2 djam 29.00 malam
selesai, maka dilandjoetkan de-
ngan pertemoean tertoeoep,
dimana diantaranya sebagai
atjara diroendingkan soal pen-
dirian Sentral Organisasi Ko-
perasi Ra'jat dsb.

Setelah dinjanjikan lagoo In-
donesia Raya bersama, Niti
Soemantri, sebagai ke-
toea rapat menjampaikan ka-
te2 hasrat dari panitia penje-
lenggara betapa besar keingi-
nan oentoek menjelenggara-
kan dan ini dapat dilihat bah-
wa panitia penjeleenggara ter-
diri dari partai2, djawata2,
kalangan ahli kesenatar ba-
dan2 perdagangan dll. Pendek-
nja dari segala lapisan masja-
rakat menghendaki terlaksana
nja konferensi ini.

Dalam membentangkan pandangan masjarakat terhadap koperasi, ditegaskannya bahwa memang ra'jat beloem mempoenjai pendirian jang tegas akan arti koperasi, sehingga poela anggapan2 terhadap koperasi beraneka warna. Diantaranja dianggapnja, bahwa koperasi itoe hanja ladan distribusi semata-mata dan tidak joela ketinggalan djertjaan dan sangka2 dari masjarakat terhadap koperasi. Dalam pada itoe pembitjara mengemukakan keinginan2 wakil residen jang mengatakan, bahwa koperasi boekantlah pefitjan kapitalisme dan mempey tahankan diri dari kelombangk kapitalisme jang menjebaakan kesengsaraan ra'jat, tapi koperasi ekonomi jang semoanja hasil dari ketjerdasan eradaban mepoesia.

Karena itoe pemiliki n pembitjara selandjoetaja koperasi haroes mendjadi front ekonomi ra'jat seloeresehnja.

Selandjoetnja dibentangkan dengan teroes terang, bahwa tarboelnja koperasi itoe beboen dapat memboektikan apa jang sebenarnya dan tindakan tegas dari pemerintah kearah oendang2 dasar pasal 33 hingga kini teroes ditoeenggoe laberapa lama.

Sebagai penoetop oleh ketoca dinjatakan, bahwa koperasi tak dapat langsoeng dan sceboer hidoepnja oalan, negara jang kapitalistis, djedjahan ataupoen setengan djadjahan. Dari sebab itoe perdjoeangan koperasi ra'jat rapat hoeboengannja dengan perdjoeangan kita oentoek mempertahankan kemerdekaan.

Sumber: *Soeara Merdeka*, 12 Djoeli 1947, hlm. 3.

Monumen Kongres Koperasi Indonesia Pertama di Tasikmalaya

Sumber: Kamaralsyah *et al.*, *Panca Windu Gerakan Koperasi Indonesia (12 Juli 1947-1987)* (Jakarta: Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN), 1987), hlm. 10.

Gedung PKKT: Tempat Kongres Koperasi Indonesia Pertama



Sumber: Kamaralsyah, *Panca Windu Gerakan Koperasi Indonesia (12 Juli 1947-1987)* (Jakarta: Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN), 1987), hlm. 12. Lihat juga Tim Penyusun, *Album Emas 60 Tahun Koperasi Indonesia* (Jakarta: DEKOPIN, 2007), hlm. 35, serta Husni Rasyad, Indriana dan Yuzri Suhud, *Selayang Pandang Gerakan Koperasi Indonesia* (Jakarta: DEKOPIN, 2007), hlm 4.

Foto Niti Sumantri: Ketua Kongres Koperasi Indonesia Pertama

Foto Niti Sumantri berada paling kiri yang memakai kopiah hitam sebagai Ketua Kongres Koperasi pertama Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 11-14 Juli 1947 di Tasikmalaya.

Sumber: Kamaralsyah, *et al.*, *Panca Windu Gerakan Koperasi Indonesia (12 Juli 1947-1987)* (Jakarta: Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN), 1987), hlm. 12.

Lampiran 16

Gedung Kantor Koperasi Simpanan Pamengkeut Banda

Kantor SPB sekarang (2012) berlokasi di Jalan Raden Ikik Wiradikarta No. 45, Kota Tasikmalaya. Kantor ini berada di samping kiri Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kota Tasikmalaya.

Sumber: Dinas KUKM Kota Tasikmalaya, *Direktori Koperasi Kota Tasikmalaya Tahun 2010*, (Tasikmalaya: Dinas KUKM, 2010).

Gedung Kantor Koperasi Mitra Batik



Gedung kantor ini merupakan aset dari Koperasi Mitra Batik yang membuka unit usaha perdagangan batik. Saat ini (2012), gedung kantor ini dikontrakan menjadi Toko Swalayan Yogya Toserba, Jalan R.E. Martadinata, Kota Tasikmalaya. Sebelum dikontrakan, gedung ini merupakan kantor koperasi terbesar di Tasikmalaya. Sekarang kantornya pindah ke Jalan Mayor SL. Tobing, Gunung Jambe, Kota Tasikmalaya.

Sumber: Koleksi Pribadi Tahun 2012

Pabrik Tenun Koperasi Mitra Batik

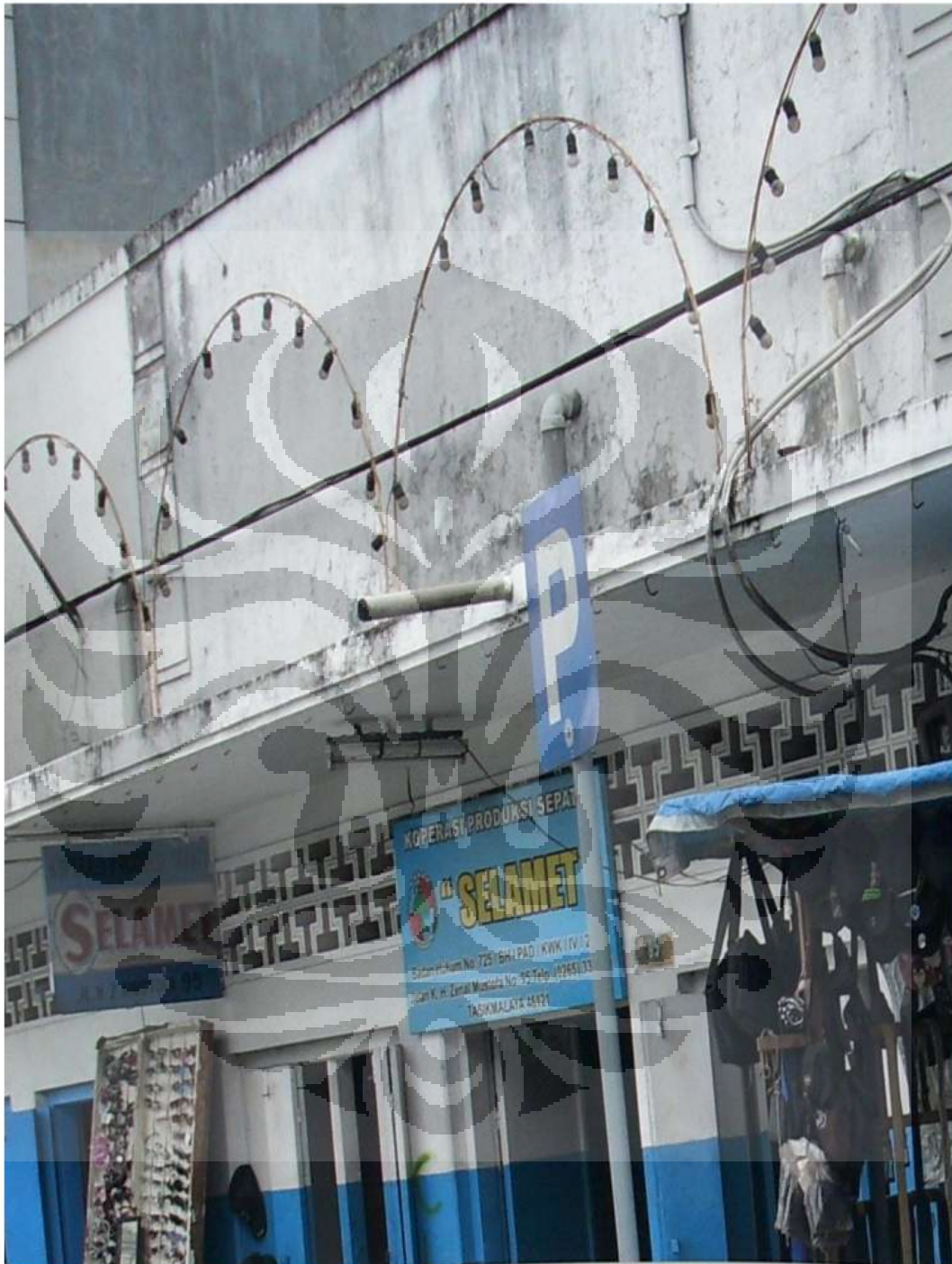


Pabrik tenun ini berlokasi di Jalan Mayor SL. Tobing, Gunung Jambe, Kota Tasikmalaya.

Kantor Koperasi Mitra Batik saat ini (2012) berada di pabrik tenun tersebut.

Sumber: Tim Penerbitan Buku Dokumenter Koperasi Mitra Batik, *Setengah Abad Koperasi Mitra Batik 17 Januari 1939*, (Tasikmalaya: Koperasi Mitra Batik, 1989)

Gedung Kantor Koperasi Selamat



Kantor ini sekarang (2012) berada di Jalan KH. Zaenal Mustofa No. 95, Kota Tasikmalaya.

Sumber: Koleksi Pribadi Tahun 2012.

Gedung Pusat Koperasi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012



Gedung Pusat Koperasi Kabupaten Tasikmalaya (PKKT) ini telah direnovasi, sehingga memiliki perbedaan dengan gedung PKKT pada tahun 1947. PKKT sekarang menjadi salah satu koperasi sekunder di Tasikmalaya.

Sumber: Koleksi Pribadi Tahun 2012

Monumen Koperasi Indonesia



Foto 1

Foto 2

Foto 1 adalah Monumen Koperasi sebagai tanda peringatan Kongres Koperasi Indonesia pertama, sedangkan Foto 2 adalah plang yang berisi keterangan bahwa tempat berdirinya plang tersebut adalah tempat berlangsungnya Kongres Koperasi Indonesia pertama yang berlokasi di gedung Pusat Koperasi Kabupaten Tasikmalaya (PKKT).

Sumber: Koleksi Pribadi Tahun 2012

BIODATA SUMBER LISAN

Nama : Ir. Achmad Basrah Enie, M.Sc.
 Pekerjaan : Pensiunan ahli peneliti bidang pangan dan mantan Kepala Balai Besar Industri Hasil Pertanian (Bogor) dan Direktur Industri Kimia Hasil Pertanian dan Perkebunan (Jakarta), Kementerian Perindustrian.
 Sekarang tenaga ahli dan konsultan bidang pangan dan sedang menggali sejarah pembatikan Tasikmalaya dan sejarah lembaga litbang hasil pertanian di Bogor (1909-2003), dengan buku pertama: "Enie: Sosok Pengusaha Batik Tasik (1909-1966). Menguak Sejarah Pembatikan di Tasikmalaya".
 Anak kelima dari Enie Adnan, perintis, pendiri dan Ketua Koperasi Mitra Batik Tasikmalaya 1939-1950.
 TTL : Tasikmalaya, 27 April 1947
 Alamat : Komplek BBIA (BBIHP) No. 9, Cikaret, Bogor Selatan 16132.

Nama : Nana Rukmana
 Pekerjaan : Manajer Pusat Koperasi Kabupaten Tasikmalaya 1991-2012.
 Mantan Ketua Bidang Pembukuan PKKKT 1963-1990
 TTL : Kelahiran Tahun 1940-an
 Usia 68 tahun
 Alamat : Cisayong, Kota Tasikmalaya

Nama : Drs. H. Komar Raksadiwangsa
 Pekerjaan : Bendahara Koperasi Simpenan Pamengkeut Banda Periode 2007-2011 dan 2012-2016.
 TTL : Tasikmalaya, 14 September 1940
 Usia 72 tahun
 Alamat : Jalan Bantar No. 40 RT. 07 RW. 01 Kel. Argasari, Kec.Cihideung, Kota Tasikmalaya.

Nama : Udin Karto
 Pekerjaan : Wiraswasta (Tukang Warung)
 TTL : Tasikmalaya, 11 April 1936
 Usia 76 tahun
 Alamat : Jln. Moh. Hatta No. 46 RT.04/02 Kel. Sukamanah, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya. Rumahnya berada di depan Gedung PKKT, tempat Kongres Koperasi Indonesia Pertama.
 Udin Karto adalah salah seorang warga Tasikmalaya yang pernah menyaksikan kedatangan para utusan Kongres Koperasi Indonesia Pertama. Pada saat Kongres tersebut, Udin Karto berusia 11 tahun dan masih sekolah di Sekolah Rakyat (SR).

Nama : Ude Kurnaedi
 Pekerjaan : Buruh
 TTL : Tasikmalaya, 1938
 Usia 74 tahun
 Alamat : Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya.
 Ude Kurnaedi adalah salah seorang warga Tasikmalaya yang pernah menyaksikan kedatangan para utusan Kongres Koperasi Indonesia Pertama. Pada saat Kongres tersebut, Ude Kurnaedi masih sekolah di Sekolah Rakyat (SR). Adik dari Udin Karto.

Nama : Hilman
 Pekerjaan : Pembantu Harian Gudang di Pabrik Cambrics Koperasi Mitra Batik 1970-1975 dan Staf Pembukuan 1976-1997. Sekarang Seksi *Acoounting* di Koperasi Mitra Batik 1999-2012.
 TTL : Tasikmalaya, 01 Februari 1949
 Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan No.17 RT 03 RW 02 Padayungan Kota Tasikmalaya.

Nama : Prof. Dr. Meutia Hatta Swasono, SS, MA.
 Pekerjaan : Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
 Dosen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia (FISIP UI).
 TTL : Yogyakarta, 21 Maret 1947
 Alamat : Jl. Daksinapati Timur No.9 Rawamangun, Jakarta Timur. Kode Pos 13220.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama lengkap penulis adalah Nurul Iman. Penulis lahir di tempat Persalinan Bidan Patonah, dekat Pasar Sayuran, Kota Tasikmalaya pada tanggal 29 Juli 1989 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 26 *Rayagung* (Haji) 1409 Hijriah, malam Minggu, *ba'da* Maghrib. Ayahnya adalah seorang ustadz di kampung Leuwidahu, Mesjid Atthoyyibah, Kelurahan Parakannyasag, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, sedangkan ibunya seorang Ibu Rumah Tangga. Penulis memiliki lima saudara kandung, yakni Siti Nursyafa'ah, Isyeu Siti Aisyah, Ervin Syamsul Arifin, Shofia (Alm.), dan Muhammad Fajar Nugraha. Seorang lagi adalah sepupu yang sudah dianggap adik sendiri, yakni Dali Mutiara Jamilah. Sejak balita hingga dewasa penulis tinggal dan dibesarkan oleh orangtuanya di Jalan Leuwidahu No.91 RT.01 RW.04, Kelurahan Parakannyasag, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya.

Adapun jenjang pendidikan penulis dari tingkat dasar sampai perkuliahan:

- | | | |
|----|-----------------------------------|-----------|
| 1. | TK Miftahutthoyyibah Tasikmalaya | 1995-1996 |
| 2. | SD Parakannyasag II Tasikmalaya | 1996-2001 |
| 3. | MTs Negeri Rarangjami Tasikmalaya | 2001-2004 |
| 4. | SMA Negeri 2 Tasikmalaya | 2004-2008 |
| 5. | Universitas Indonesia | 2008-2012 |